





LAPORAN
KEBERLANJUTAN
2021

Meningkatkan Resiliensi Perubahan Iklim



Laporan *Task Force on Climate-Related Financial Disclosures*

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) membuat rekomendasi pengungkapan keuangan sukarela terkait iklim guna membantu pasar keuangan dalam memahami risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan, serta bagaimana perusahaan mengawasi dan mengelolanya. Rekomendasi TCFD mendefinisikan tata kelola, strategi, manajemen risiko,

metrik, dan target perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim sebagai elemen inti. Selain itu, TCFD juga memberikan panduan tentang pengungkapan yang relevan.

Elemen-elemen inti dari rekomendasi TCFD adalah sebagai berikut :



			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Menguatkan Ketahanan Tata Kelola

BRI telah mengimplementasikan rekomendasi TCFD dan hasilnya adalah sebagai berikut: [F.26]

Tata Kelola	Strategi	Manajemen Risiko	Metrik dan Target
Pembentukan ESG Desk di bawah Divisi Kepatuhan yang memiliki tugas memonitor aspek LST BRI.	Membuat ESG <i>Roadmap</i> .	BRI menyesuaikan kebijakan pemberian kredit, terutama pada pembiayaan berwawasan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). Persyaratan kredit di BRI memuat daftar periksa (<i>checklist</i>) terkait aspek LST. [FS3]	BRI sedang menyusun ESG <i>Roadmap</i> yang berisi target kinerja lingkungan.
	Menganalisis risiko dan peluang yang disebabkan oleh perubahan iklim.	BRI menetapkan kebijakan risiko LST untuk sektor kelapa sawit serta dalam proses pengembangan kebijakan risiko LST untuk sektor pulp dan kertas.	
	Penerapan keuangan berkelanjutan melalui penyusunan RAKB		
	Meluncurkan produk yang beraspek LST seperti pinjaman dan obligasi berkelanjutan.		
	Berpartisipasi dalam menciptakan lapangan kerja yang mendukung efisiensi energi. Misalnya mendukung proyek pembangunan LRT, pembangunan produksi energi bersih seperti PLT Bayu, atau Mikrohidro, dan pembangunan pabrik biodiesel yang berasal dari sawit yang tersertifikasi. [GRI 203-1]		

Risiko dan Peluang Perubahan Iklim [GRI 201-2] [GRI 102-15] [FS1] [FS2]

BRI menyadari bahwa perubahan iklim memiliki dampak signifikan yang secara tidak langsung mempengaruhi performa ekonomi perbankan. Risiko perubahan iklim ini dapat mempengaruhi kegiatan operasional debitur perbankan dan performa ekonomi mereka yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar pinjaman yang telah diberikan oleh bank. Oleh sebab itu, sangat penting bagi BRI untuk dapat menganalisa risiko perubahan iklim yang dihadapi oleh calon debitur untuk mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi oleh perusahaan pada pinjaman yang diberikan, seperti *physical risk*, risiko yang muncul dari perubahan kondisi iklim yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap konsumsi energi perusahaan, kemampuan untuk menggunakan jaringan perusahaan, status dari setiap gedung dan bangunan yang digunakan, pasokan bahan mentah dan lainnya, *regulatory risk*, seperti risiko yang muncul dari pemerintah dan regulator lainnya dari perusahaan yang membatasi emisi GRK perusahaan yang mewajibkan perusahaan melakukan investasi pada teknologi ramah lingkungan, dan *reputation risk*, seperti risiko yang muncul dari kurangnya produk-produk yang ramah lingkungan dan kebijakan pro lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan. Namun di sisi lain, perubahan iklim juga menciptakan peluang bisnis signifikan bagi perusahaan yang ingin berinovasi dan memanfaatkan tantangan menjadi peluang untuk berkembang. [GRI 103-1]

Pembahasan isu lingkungan dilakukan dalam rapat Direksi dan Komite Manajemen Risiko yang dihadiri oleh Direksi, Divisi Bisnis, Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Internal, dan divisi-divisi yang memiliki relevansi dengan pembahasan rapat. BRI belum menggunakan metode pemungutan suara (*voting*) berdasarkan kepemilikan saham, melainkan menggunakan metode pembahasan langsung yang menghasilkan kesepakatan bersama. Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain isu lingkungan seperti hutan dan perubahan iklim, yang mungkin berdampak pada debitur BRI. [GRI 102-30] [FS9] [FS12]

Pada periode pelaporan, BRI telah melakukan pemetaan terhadap risiko dan peluang dari perubahan iklim, namun belum melakukan perhitungan implikasi biaya atau finansial yang diakibatkan oleh risiko dan peluang perubahan iklim. Sebabnya, risiko dan peluang tersebut memberikan dampak secara tidak langsung bagi perusahaan. Walaupun demikian, BRI tetap menyadari pentingnya menganalisis nilai finansial dari risiko atau peluang akibat dari perubahan iklim. Saat ini, BRI sedang dalam tahap pembahasan rencana pengembangan sistem untuk menghitung implikasi finansial serta membuat proyeksi pendapatan dari risiko dan peluang perubahan iklim. [GRI 201-2] [FS10]

Hasil pemetaan peluang dan risiko perubahan iklim disajikan sebagai berikut: [GRI 102-11] [GRI 201-2] [FS10]

			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Menguukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Jenis Risiko	Pemicu Risiko	Kemungkinan Terjadinya Risiko	Uraian	Strategi untuk Merespons Risiko
Regulasi yang Berlaku	Pengaturan dan pengawasan risiko terkait iklim di sektor keuangan.	Mungkin (<i>Likely</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Risiko yang timbul akibat munculnya regulasi terkait perubahan iklim seperti POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris. Risiko yang timbul akibat munculnya regulasi iklim kepada pelaku usaha 	<ol style="list-style-type: none"> BRI telah membentuk ESG Desk yang berada di bawah Divisi Kepatuhan. ESG Desk BRI bertanggung jawab atas penerapan Keuangan Berkelanjutan BRI yang mengacu pada ketentuan yang berlaku seperti POJK 51/POJK.03/2017 dan POJK 60/POJK.04/2017 tentang keuangan berkelanjutan dan regulasi yang berlaku bagi debitur (regulasi risiko calon debitur juga dipertimbangkan dalam proses <i>due diligence</i>). BRI telah membuat <i>Loan portfolio guideline</i> dan <i>loan sectoral policy (palm oil)</i> untuk mendukung isu lingkungan dan mendorong nasabah melakukan praktik-praktik yang <i>sustainable</i>
Teknologi	Pergantian produk dan layanan yang ada dengan opsi emisi yang lebih rendah.	Mungkin (<i>Likely</i>)	Risiko teknologi merupakan salah satu risiko transisi yang cenderung memiliki dampak strategis dan substantif terhadap bisnis Perusahaan. Dampak tidak langsung yang dihasilkan yaitu penurunan nilai aset dan penghentian dini aset karena perubahan teknologi sebagai akibat dari penggantian produk dan layanan yang ada dengan opsi emisi yang lebih rendah.	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan teknologi informasi (TI) menjadi salah satu fokus BRI. Pengembangan sistem teknologi informasi mengarah pada transformasi menuju perbankan digital untuk semua produk dan aktivitas layanan. Melalui BRI <i>Hybrid Banking</i>, BRI menjadi yang pertama menyediakan perbankan swalayan (<i>self-service banking</i>) di Indonesia. Layanan perbankan berbasis teknologi juga dibawa BRI ke pelosok tanah air, seperti agen CRM dan BRILink. Tidak hanya pada produk, BRI juga mewujudkan komitmen meningkatkan efisiensi operasional yaitu penghematan penggunaan kertas melalui kegiatan "<i>Love Tree Angel</i>". Dalam merespon <i>emerging issue</i> terkait digitalisasi, BRI membentuk Digital Risk Division.
Hukum	Tuntutan hukum akibat perubahan iklim.	Mungkin (<i>Likely</i>)	Risiko yang dapat timbul adalah tuntutan terkait regulasi perubahan iklim dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris. Regulasi tersebut berkaitan dengan pengurangan emisi nasional.	BRI memiliki Divisi Hukum sebagai Koordinator Risiko Hukum. Pembinaan dilakukan kepada seluruh pekerja dalam rangka meningkatkan kompetensi pengendalian risiko hukum. Selain itu, dengan dibentuknya ESG Desk, BRI berharap dapat memenuhi seluruh regulasi terkait perubahan iklim.

Jenis Risiko	Pemicu Risiko	Kemungkinan Terjadinya Risiko	Uraian	Strategi untuk Merespons Risiko
Pasar	Perubahan preferensi pelanggan.	Mungkin (<i>Likely</i>)	Risiko pasar merupakan risiko yang timbul akibat adanya perubahan preferensi pelanggan atau nasabah ke arah produk yang rendah emisi. Risiko ini dapat menyebabkan berkurangnya permintaan pada produk yang ditawarkan oleh Perusahaan, yang berpotensi mengakibatkan penurunan pendapatan.	Dalam merespons risiko ini, BRI telah menerapkan inisiatif antara lain: meluncurkan <i>Sustainability Loan</i> , melakukan pembiayaan berbasis <i>green funding</i> , dan membuat kriteria pada <i>green sector</i> . Di samping itu, BRI telah membuat persyaratan kredit untuk sektor kelapa sawit serta dalam proses pengembangan kebijakan risiko LST untuk sektor pulp dan kertas.
Reputasi	Publikasi negatif atas dukungan terhadap proyek atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap iklim.	Mungkin (<i>Likely</i>)	Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh publikasi negatif atas kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank perihal kepatuhan terhadap regulasi perubahan iklim.	Sebagai upaya meminimalkan risiko reputasi, BRI berpartisipasi dalam inisiatif berkelanjutan berupa pembiayaan (kredit) sesuai ketentuan <i>Loan Portfolio Guidelines</i> (LPG) yang tercantum dalam Kriteria Risiko Yang Dapat Diterima (KRD). KRD BRI meliputi persyaratan kredit pada sektor kelapa sawit, persyaratan lingkungan bagi kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan, dan ketentuan green sector. Selain itu, BRI berharap pembentukan ESG Desk dapat membantu upaya pemenuhan seluruh regulasi terkait perubahan iklim. Selanjutnya, Divisi Sekretariat Perusahaan telah ditunjuk untuk menangani informasi negatif. Proses manajemen risiko reputasi tersebut tertuang dalam deskripsi bidang kerja dan Buku Panduan Operasi Divisi Sekretariat Perusahaan.
Fisik Akut dan Kronis	Meningkatnya keparahan dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem seperti angin topan dan banjir.	Mungkin (<i>Likely</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Risiko fisik akut dan kronis merupakan risiko yang memiliki dampak bagi bisnis Perusahaan maupun debitur Perusahaan. Meningkatnya keparahan dan frekuensi bencana iklim dapat mempengaruhi lokasi dan kegiatan operasional. Secara geografis Indonesia merupakan negara yang khatulistiwa yang rentan terhadap bencana seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Pada saat yang sama terdapat kondisi pertemuan lempengan yang dapat menyebabkan Indonesia berpotensi gempa bumi, tanah longsor dan erupsi gunung berapi. BRI yang merupakan Bank dengan unit kerja terbesar dan terluas memiliki potensi terdampak risiko operasional dan risiko kredit akibat <i>physical risk</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Risiko fisik akut dan kronis menjadi salah satu kriteria BRI dalam pemberian kredit. BRI akan menilai bagaimana nasabah tersebut terpapar risiko fisik akut dan kronis. Selain itu, untuk merespon risiko fisik akut dan kronis terhadap operasional, BRI melakukan studi kelayakan di setiap pembangunan kantor operasional yang berada di lokasi yang rawan bencana. Di samping itu, BRI memiliki asuransi guna mengurangi potensi dampak keuangan dari risiko iklim fisik yang dihadapi. <i>Business Continuity Management</i>, K3, asuransi bangunan dan rutin sosialisasi, simulasi bencana

			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Menguatkan Ketahanan Tata Kelola

Jenis Risiko	Pemicu Risiko	Kemungkinan Terjadinya Risiko	Uraian	Strategi untuk Merespons Risiko
Pasar	Ketidakmampuan debitur untuk melunasi pinjaman.	Mungkin (Likely)	Risiko yang dapat timbul akibat dampak perubahan iklim yang mempengaruhi bisnis para debitur dan pada akhirnya meningkatkan risiko kredit BRI. [FS2]	Sebagai upaya meminimalkan risiko kredit, BRI telah melakukan proses seleksi dan evaluasi yang melibatkan mitigasi risiko lingkungan dan sosial. Selain itu, BRI menyesuaikan kebijakan pemberian kredit, terutama pada pembiayaan berwawasan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) melalui checklist terkait aspek LST.
Produk dan Jasa	Peningkatan diversifikasi aset keuangan (misalnya, obligasi hijau dan infrastruktur).	Sangat Mungkin (Very Likely)	Perubahan preferensi pelanggan atau nasabah ke produk yang rendah emisi memberikan peluang bagi Perusahaan dalam meningkatkan diversifikasi aset keuangan. Salah satunya yaitu dengan menerbitkan obligasi yang memiliki tujuan LST sehingga dapat memenuhi syarat sebagai obligasi hijau dan menarik para investor yang memiliki minat dan fokus pada isu LST.	BRI memanfaatkan perubahan preferensi pelanggan yang tidak hanya ingin menuai keuntungan finansial tetapi juga dampak positif terhadap lingkungan dengan menerbitkan Sustainability Loan pada tahun 2021. BRI telah menerbitkan <i>Sustainability Bond</i> pertama di Indonesia pada tahun 2019. Penerbitan obligasi dengan skema berwawasan lingkungan dan sosial senilai US\$500 juta atau Rp7.025 miliar ini merupakan yang pertama bagi perusahaan BUMN maupun lembaga keuangan di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Penerbitan <i>Sustainability Bond</i> BRI telah memenuhi <i>ASEAN Sustainability Bond Standards</i> (ASEAN SUS).
Produk dan Jasa	Penggunaan teknologi baru.	Sangat Mungkin (Very Likely)	Era digital memberikan berbagai peluang bagi Perusahaan. Produk dan jasa yang berbasis digital menjadi daya tarik tersendiri dan cocok untuk situasi pandemi. Selain itu, proses digitalisasi berpotensi mendukung penurunan emisi dan penghematan kertas.	BRI telah membentuk platform ekosistem digital dalam berbagai pelayanan kepada nasabah maupun kegiatan operasional yang dapat dilakukan oleh pekerja. Pada era pandemi Covid-19, digitalisasi yang dilakukan BRI merupakan jawaban atas kebutuhan nasabah. BRI juga terus mendorong kegiatan digitalisasi sebagai inisiatif penurunan emisi. Sebagai hasilnya, secara performa lingkungan, kegiatan digitalisasi BRI telah mendorong penghindaran emisi sebesar 1.233 kg CO ₂ eq di tahun 2021.

Jenis Risiko	Pemicu Risiko	Kemungkinan Terjadinya Risiko	Uraian	Strategi untuk Merespons Risiko
Pasar	Peningkatan peringkat oleh indeks keberlanjutan/LST.	Mungkin (<i>Likely</i>)	Pengungkapan Perusahaan terhadap aspek LST memberikan peluang pada peningkatan peringkat (<i>rating</i>) oleh lembaga pemeringkat eksternal. Di samping itu, terdapat peluang untuk memperoleh dana investasi dari investor yang memiliki minat dan fokus pada Bank dengan kinerja yang berkelanjutan dan transparan terhadap pengungkapan LST.	BRI menyadari pentingnya transparansi pada pengungkapan LST dengan menerbitkan Laporan Keberlanjutan tahunan yang menggunakan standar Global Reporting Initiative (GRI), POJK 51, SUSBA, SASB, TCFD, dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. BRI juga telah menyelesaikan kuesioner Carbon Disclosure Project (DCP) yaitu CDP Financial Service Questionnaire: Climate Change & Forest Pilot 2021. Sebagai pencapaian, BRI masuk ke dalam indeks IDX ESG Leaders yang diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia pada 14 Desember 2020. BRI juga telah terdaftar dalam indeks SRI-KEHATI sejak didirikan tahun 2009. Indeks SRI-KEHATI adalah indeks keanekaragaman hayati investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab (SRI) dengan menggunakan prinsip-prinsip LST.
Sumber Energi	Penggunaan sumber energi dengan emisi lebih rendah.	Mungkin (<i>Likely</i>)	Faktor keberlanjutan seperti penggunaan sumber energi yang rendah emisi merupakan salah satu faktor yang semakin dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi. Hal ini menjadi peluang bagi Perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan melalui operasional Perusahaan.	Salah satu target BRI adalah menjadi green office. Upaya yang dilakukan oleh BRI yaitu dengan menerapkan manajemen lingkungan yang baik di lingkungan perkantoran. Strategi yang dilakukan antara lain dengan menggunakan sumber energi yang rendah emisi seperti lampu LED dan solar cells. Selain itu, BRI juga dalam tahap membuat ESG Roadmap yang mendukung komitmen BRI untuk mencapai penurunan emisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris dan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan.

BRI menyadari adanya risiko sosial dan ekonomi yang dapat timbul dari perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Seluruh jenis risiko dan peluang di atas dapat berdampak terhadap kondisi finansial perusahaan baik berupa pendapatan, pengeluaran atau perubahan substantif dalam operasi.

Risiko ekonomi, sosial dan lingkungan terbesar adalah jika perusahaan tidak mau turut serta dalam melawan perubahan iklim adalah terjadinya pemanasan global dengan dampak negatif yang diketahui bersama seperti kenaikan muka laut, banyaknya badai, dan rusaknya keseimbangan ekosistem. Pada masa

mendatang, BRI berkomitmen untuk mengukur dan menyusun strategi pengelolaan risiko dan peluang, tindakan yang diambil, serta biaya yang muncul akibat pengelolaan risiko dan peluang tersebut.

Seluruh jenis risiko dan peluang di atas dapat berdampak terhadap kondisi finansial perusahaan baik berupa pendapatan, pengeluaran, atau perubahan substantif dalam operasi. Pada masa mendatang, BRI berkomitmen untuk mengukur dan menyusun strategi pengelolaan risiko dan peluang, tindakan yang akan diambil, serta biaya yang muncul akibat pengelolaan risiko dan peluang tersebut.

			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Menguatkan Ketahanan Tata Kelola

Memperkuat Strategi Perubahan Iklim

[FS1]

BRI memperkuat strategi terhadap perubahan iklim dengan pembentukan struktur tata kelola LST yaitu ESG Desk di bawah Divisi Kepatuhan guna menyelaraskan kinerja LST. Pembentukan ESG Desk ditujukan untuk mengoptimalkan pemantauan dan pengelolaan isu-isu LST dalam kinerja ekonomi Perusahaan. Pengelolaan isu-isu terkait LST dilakukan melalui upaya-upaya seperti melakukan kegiatan pendanaan berbasis *green funding*, melakukan pemetaan portofolio, mengelola operasional perusahaan secara efisien dan ramah lingkungan, perumusan kebijakan berkaitan dengan penyaluran kredit, pengembangan produk, layanan, maupun inovasi berwawasan lingkungan serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja, nasabah, maupun masyarakat untuk menciptakan kesadaran keuangan berkelanjutan. [FS4][FS11]

ESG Desk memperkuat upaya BRI dalam melaksanakan prinsip keuangan berkelanjutan dan mendukung BRI untuk berkontribusi lebih besar terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sebagai pedoman penerapan dan strategi pelaksanaan keuangan berkelanjutan oleh seluruh jajaran, BRI telah mengesahkan Surat Keputusan Direksi yang menetapkan pihak yang bertanggung jawab serta jenjang kewenangan dalam implementasi keuangan berkelanjutan sebagai berikut: [GRI102-26]

- a. Surat Keputusan Nokep: 17 – Dir/DMR/04/2017 tentang Strategi Implementasi Keberlanjutan (*Sustainability*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- b. Surat Keputusan Nokep: S.05 – Dir/EMP/07/2018 tentang Kebijakan Keberlanjutan (*Sustainability*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Sebagai bentuk keseriusan terhadap isu LST, BRI sedang dalam tahap penyusunan ESG Roadmap yang akan digunakan sebagai acuan dalam peningkatan kinerja LST. Dalam mengelola isu-

isu terkait LST, terdapat empat aspek utama yakni melakukan kegiatan pendanaan berbasis *green funding*, melakukan *mapping portfolio*, mengelola operasional perusahaan secara efisien dan ramah lingkungan, serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja, nasabah maupun masyarakat untuk menciptakan kesadaran keuangan berkelanjutan. [FS4][FS11]

BRI sebagai salah satu bank BUMN terdepan di Indonesia tidak hanya fokus pada bisnis transaksi perbankan, namun juga pada penyediaan fasilitas kredit dan solusi keuangan. Risiko perubahan iklim yang dialami oleh debitur memiliki dampak tidak langsung yang memicu kegagalan dalam pembayaran pinjaman. Guna meminimalisasi dampak tersebut, BRI secara aktif berpartisipasi dalam inisiatif berkelanjutan yaitu dengan pembiayaan (kredit) yang mengacu pada *Loan Portfolio Guidelines* (LPG). [FS2]

Berdasarkan Surat Edaran No. SE.67-DIR/MPE/12/2020 Tanggal 29 Desember 2020 tentang *Loan Portfolio Guidelines*, serta mengacu pada Lampiran Surat Keputusan Nokep: S.695-Dir/EMP/09/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang *Loan Portfolio Guidelines* Tahun 2018, maka syarat wajib untuk memenuhi Kriteria Risiko Yang Dapat Diterima (KRD) Umum adalah sebagai berikut: [FS11]

- Sertifikasi RSPO/ISPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil/Indonesian Sustainable Palm Oil System*) merupakan syarat wajib pada seluruh debitur di segmen Kecil, Menengah, dan Korporasi khusus bidang usaha perkebunan kelapa sawit;
- Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup harus dilengkapi dengan perizinan antara lain dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), izin lingkungan, dll.

BRI melakukan proses seleksi dan evaluasi yang melibatkan mitigasi risiko lingkungan dan sosial melalui: [FS2] [FS5] [GRI 103-3] [SASB FN-CB-410a.2]

- Perizinan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dokumen pengelolaan lingkungan berdasarkan sektor industri, termasuk UKL-UPL, AMDAL; surat izin atau sertifikasi manajemen termasuk PROPER, dan RSPO/ISPO untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit;
- Hasil studi/analisis dampak sosial;
- Pemantauan rutin melalui pelaporan berdasarkan standar pelaporan nasional dan global.

BRI memiliki Komite Manajemen Risiko & Kredit yang memperhatikan risiko lingkungan termasuk isu perubahan iklim. BRI telah melakukan proses seleksi dan evaluasi yang melibatkan mitigasi risiko lingkungan dan sosial melalui: [SASB FN-CB-410a.2] [FS2]

 Perizinan lengkap sesuai dengan regulasi yang berlaku.	 Dokumen pengelolaan lingkungan berbasis sektor industri, antara lain Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), izin / sertifikasi pengelolaan lingkungan termasuk PROPER, RSPO dan ISPO untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit
 Pemantauan rutin melalui pelaporan berdasarkan standar pelaporan nasional dan global.	 Hasil studi / analisis dampak sosial, dimana BRI berkomitmen tidak memberikan pembiayaan kredit untuk bisnis yang merusak lingkungan seperti taman nasional, peninggalan bersejarah; tidak mendukung pembiayaan terhadap aktivitas pembebasan lahan melalui kekerasan serta tidak membiayai kegiatan dan usaha debitur yang dapat merusak UNESCO World Heritage Sites.

BRI menyesuaikan kebijakan pemberian kredit, terutama pada pembiayaan berwawasan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). Persyaratan kredit di BRI memuat daftar periksa (*checklist*) terkait aspek LST. Selain itu, BRI terus mengembangkan produk dan layanan keuangan untuk kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan. Prosedur persetujuan kredit dilakukan dengan memperhatikan risiko LST melalui mekanisme sebagai berikut:

[SASB FN-CB-410a.2] [FS15] [FS2]

<p>a</p> Marketing Mengidentifikasi dan mempertimbangkan kelayakan bisnis calon debitur termasuk isu terkait LST	<p>b</p> Analisa Kredit Mengelola kredit dengan memperhatikan faktor LST [FS2]	<p>c</p> Hukum dan Kepatuhan Mereview kepatuhan dari calon debitur
<p>d</p> Komite Kredit Proses Persetujuan sesuai wewenang yang berlaku [FS2][FS15]	<p>e</p> Cabang Pelaksana Melakukan monitoring dan pelaksanaan kelengkapan dokumen terkait LST sesuai syarat yang diberikan oleh analis	<p>f</p> Manajemen Risiko Monitoring portofolio kredit [FS2]

			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Menguatkan Ketahanan Tata Kelola

Sejak 2015, pemberian kredit kepada nasabah perkebunan dan perhutanan telah mematuhi kesepakatan yang dikeluarkan pemerintah mengenai Moratorium Pembukaan Lahan. Oleh sebab itu, BRI selalu menjelaskan kepada setiap nasabah dari kedua sektor tersebut bahwa kredit yang diberikan tidak dapat digunakan untuk membiayai pembukaan lahan baru. Kemudian, divisi yang relevan selalu memonitor pelaksanaan ketentuan ini dan berkorespondensi dengan nasabah apabila terdapat hal-hal yang tidak dipatuhi oleh nasabah.

Kebijakan manajemen risiko LST sektor kelapa sawit yang telah disusun oleh BRI adalah sebagai berikut:

[FS1] [FS3] [FS5] [FS11]

- Perlindungan area prioritas: lahan yang dimanfaatkan tidak mengonversi, atau harus mempertahankan, hutan primer atau Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dari hutan primer. Lahan yang dimanfaatkan belum dikonversi dari hutan primer atau NKT sejak November 2005;
- Emisi gas rumah kaca: lahan yang dimanfaatkan bukan merupakan daerah potensi karbon tinggi. Debitur juga diharapkan menunjukkan upaya meningkatkan penyerapan karbon, adanya prosedur untuk menghapus kelapa sawit dari lahan gambut, menghilangkan praktik pembakaran hutan, mengukur dan mengelola emisi, meminimalkan pupuk anorganik, serta menangkap metana dari limbah minyak kelapa sawit untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan pabrik;
- Ketentuan produksi: produk mematuhi ketentuan lokal, nasional, dan internasional. Perusahaan memegang legalitas untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah tersebut;

- Bahan kimia yang digunakan: sesuai dengan rekomendasi dinas terkait dan sesuai dengan *standard operating procedures* (SOP);
- Pengendalian hama: dikembangkan dengan memperhatikan aspek lingkungan manajemen nutrisi seperti pengujian dedaunan, penggunaan teknologi untuk aplikasi pupuk, rotasi tanaman, penggunaan tanaman penutup, dan filter strip tanah;
- Manajemen tanah: fokus pada produktivitas tanah, tingkat biomassa tanah, dan penyerapan karbon;
- Manajemen pengelolaan air: perusahaan melakukan penilaian lengkap persyaratan sumber daya air dan dampak debit air dengan pertimbangan kebutuhan air tanah untuk tanaman, dan kondisi hidrologi;
- Masyarakat lokal dan adat: perusahaan menghormati hak komunitas setempat, penyediaan akses kesehatan dan air bersih, dan pengalihan sumber daya dan kelangkaan;
- Hak buruh: perusahaan melaksanakan hak buruh sesuai dengan undang-undang tenaga kerja lokal dan mengatur secara aktif masalah ketenagakerjaan seperti pekerja anak, pemaksaan pekerja, kebebasan berserikat, serta diskriminasi dan kesetaraan gender; dan
- Operasional kesehatan dan keselamatan: perusahaan memiliki SOP kesehatan dan keselamatan, pelatihan yang memadai, dan penanggulangan kecelakaan.

Terkait kebijakan PROPER, BRI senantiasa memonitor peringkat PROPER nasabah. Apabila terdapat penurunan tingkat dari Biru ke Merah atau Hitam, maka BRI akan melakukan korespondensi khusus untuk mengawasi upaya nasabah memperbaiki peringkat ke tingkat Biru, Hijau, atau Emas. [SASB FN-CB-410a.2] [SASB FN-CB-550a.2] [FS3]

Peringkat PROPER Debitur BRI (Jumlah Debitur) [SASB FN-CB-410a.2] [FS10] [FS11]

Keterangan	2019	2020	2021
Gold	4	5	10
Green	17	3	7
Blue	55	42	37
Total	76	50	54

Nilai Kredit Bagi Debitur Yang Memiliki PROPER Rating (Rp Triliun) [SASB FN-CB-410a.2]

Keterangan	2019	2020	2021
Gold	61	16,2	15
Green	61	0,4	3,6
Blue	78	17,9	31,4
Total	200	34,5	50

Debitur Yang Mendapatkan Sertifikasi ISPO/RSPO (Jumlah Debitur) [SASB FN-CB-410a.2] [FS8] [FS10]

Keterangan	2019	2020	2021
RSPO	12	9	11
Dalam Proses RSPO	0	0	0
ISPO	24	23	29
Dalam Proses ISPO	11	7	9
Total	47	39	49

Keterangan: Data mencakup debitur di segmen Korporasi

Nilai Pembiayaan Untuk Debitur Yang Mendapatkan Sertifikasi ISPO/RSPO (Rp Triliun) [SASB FN-CB-410a.2] [FS8] [FS11]

Keterangan	2019	2020	2021
RSPO	15	5	11,4
Dalam Proses RSPO	0	0	0
ISPO	9	7	10,7
Dalam Proses ISPO	6	2	4
Total	30	14	26,1

Keterangan: Data mencakup debitur di segmen Korporasi

Selanjutnya, BRI telah menyesuaikan kebijakan pemberian kredit pada *green sector* yang tercantum dalam Surat Edaran No.74-DIR/MPE/12/2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Ketentuan *Green Sector* PT BRI (Persero) Tbk.

BRI belum melakukan audit khusus terkait risiko lingkungan dan sosial. Namun, Perusahaan menyadari pentingnya melakukan audit atas hasil analisis risiko lingkungan dan sosial agar segala kegiatan operasional BRI dapat berjalan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Implementasi kegiatan audit ini akan direncanakan pada periode yang akan datang. [FS9]

			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Menguatkan Ketahanan Tata Kelola

Peninjauan Ulang Pembiayaan [FS2] [FS3]

[FS5]

BRI melakukan pemantauan berkesinambungan dari setiap proyek/kegiatan yang dibiayai dana hasil obligasi berkelanjutan dan hasilnya disampaikan berkala melalui mekanisme internal sesuai saluran yang dimiliki BRI. Selain itu BRI akan melaporkan alokasi pembiayaan sesuai dengan kerangka kerja dalam satu tahun. Laporan diterbitkan setiap tahun dan memuat penjelasan tentang jumlah aset yang memenuhi syarat berdasarkan kategori proyek, dan sisa saldo dari hasil yang tidak dialokasikan pada akhir pelaporan.

BRI mengembangkan kerangka kerja untuk menilai risiko terkait aktivitas bisnis nasabah yang berdasarkan kapasitas, komitmen dan track record nasabah yang berkaitan dengan keberlanjutan. BRI secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan debitur menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan minimal satu kali dalam setahun, salah satu metode yang dilakukan adalah metode kunjungan/ site visit. Terkait kebijakan sertifikasi PROPER untuk perusahaan yang mengalami penurunan grade dari Biru ke Merah atau Hitam, BRI melakukan monitoring dan korespondensi khusus untuk memonitor upaya nasabah untuk dapat kembali ke grade Biru, Hijau, atau Emas. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No KB.3 - DIR /KRD/11/2018, pengawasan dilakukan dengan meninjau dokumen kredit yang disampaikan debitur [FS4] [FS11]

Dalam situasi tertentu, apabila ditemukan debitur yang belum dapat memenuhi persyaratan LST, maka BRI meminta informasi atas tindak lanjut debitur dan

memantau perkembangannya secara periodik. BRI akan meminta informasi dari debitur, apabila terdapat teguran/ pelanggaran/ permasalahan terkait LST. Secara berkala, BRI melakukan pengkinian data debitur terkait kepatuhan LST. Selanjutnya informasi terkait kegiatan monitoring yang dilaksanakan akan disampaikan dalam Laporan Kunjungan Nasabah. Hasil evaluasi tersebut digunakan BRI dalam mereview pembiayaan yang diterima debitur. BRI akan melakukan engagement dengan nasabah untuk perbaikan kinerja keberlanjutannya sesuai rencana aksi dengan tenggat waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Apabila debitur diketahui tidak menerapkan pengelolaan lingkungan dan sosial yang sesuai prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, BRI dapat memutuskan untuk menghentikan pembiayaan tersebut. [FS2][FS3][FS5]

Sebagai bagian dari tugas untuk melayani nasabah dengan seoptimal dan selengkap mungkin dengan layanan keuangan yang sejalan dengan kebutuhan nasabah, BRI berupaya untuk juga memperhitungkan dampak yang muncul kepada masyarakat dan lingkungan sehingga akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat bisa diidentifikasi dan dimitigasi. Saat membuat rekomendasi, BRI juga memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan adalah telah memandang aspek tersebut dan nasabah telah mendapatkan informasi yang jelas dan memadai terkait risikonya.

Sustainability Bonds and Financing

BRI menerbitkan *Sustainability Bond* pada Maret 2019, yang tercatat sebagai obligasi berwawasan lingkungan pertama di Indonesia. Penawaran *Sustainability Bond* ini merupakan salah satu kontribusi nyata peran BRI dalam menjalankan kegiatan usaha berkelanjutan. Penerbitan *Sustainability Bond* BRI telah memenuhi *ASEAN Sustainability Bond Standards (ASEAN SUS)* dengan nilai penerbitan sebesar US\$500 juta dan tenor lima tahun.

Seluruh dana yang diperoleh dikenai kewajiban untuk mendukung pembiayaan berbagai proyek-proyek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan keberlanjutan. Sampai dengan Desember 2021, dana perolehan penerbitan *Sustainability Bond* telah digunakan sepenuhnya dengan komposisi 31% digunakan untuk proyek hijau dan 69% digunakan untuk proyek sosial.

Tabel Alokasi Penggunaan Dana Penerbitan Sustainability Bond BRI 2019

Keterangan	2020		2021	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Existing Accounts				
Green Projects	1.779	25,32%	2.213	31,06%
KUPEDES	1.401	19,94%	1.311	18,40%
KUR	898	12,78%	840	11,79%
KPRS	37	0,53%	35	0,49%
Realokasi Dana				
Micro (<i>Micro Loan</i>)	2.000	28,47%	1.872	26,27%
KMK Tangguh (<i>SME Loan</i>)	911	12,97%	853	11,97%

Sementara itu, dalam hal penyaluran kredit, per tahun 2021, BRI menyalurkan 65,1% dari total kredit kepada Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB). Jumlah ini meningkat sebesar 12% dibandingkan dengan tahun 2020. Secara keseluruhan, BRI telah menyalurkan kredit KKUB kepada 10 jenis kegiatan usaha berkelanjutan, yaitu: (1) kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); (2) energi terbarukan; (3) pencegahan dan pengendalian polusi; (4) pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan; (5) konservasi keanekaragaman hayati darat dan air; (6) transportasi ramah lingkungan; (7) pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan; (8) *Eco-efficient Product*; (9) bangunan berwawasan lingkungan; dan (10) kegiatan usaha berwawasan lingkungan lainnya.



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Mengukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp. Triliun) [FS11]

Uraian	2020*	2021
UMKM	484,4	543,4
Energi Terbarukan	4,7	5,6
Pencegahan & Pengendalian Polusi	0,02	0,03
Transportasi Ramah Lingkungan	15,5	14,9
Bangunan Berwawasan Lingkungan	2,8	2,3
Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati & Penggunaan Lahan Berkelanjutan	37,2	43,2
Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	0,7	0,67
Pengelolaan Air & Limbah Berkelanjutan	0,6	0,01
<i>Eco-efficient Product</i>	3,8	4,1
Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya	0,5	0,09

*Dilakukan reklasifikasi / restatement pada angka 2020 berdasarkan parameter dan kriteria internal BRI yang lebih rigid

Pada tahun 2021, BRI berkontribusi dalam energi baru dan terbarukan (EBT) melalui penyaluran kredit kepada PLTA Poso Energy sebesar US\$35 juta dan Kerinci Merangin sebesar US\$10 juta. BRI mendukung peningkatan bauran EBT melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) tersebut karena PLTA merupakan salah satu bagian

sumber energi terbarukan. Selain itu, PLTA juga menjadi sumber energi yang pasokannya terjaga (*sustain*), menghasilkan listrik tanpa menghasilkan limbah, biaya pemeliharannya relatif rendah, dan sekaligus kegiatan ini sejalan dengan kegiatan usaha berkelanjutan. [GRI 203-1, 203-2]

Tabel Penyaluran Kredit BRI kepada debitur pada sektor energi tak terbarukan dan energi baru terbarukan [GRI 203-1]

Tahun	Energi Tak Terbarukan (Rp Triliun)	Energi Baru & Terbarukan (Rp Triliun)	Total Pembiayaan (Rp Triliun)
2021	25	5,6	30,6
2020*	26,1	4,7	30,8

*Dilakukan reklasifikasi / restatement pada angka 2020 berdasarkan parameter dan kriteria internal BRI yang lebih rigid

Dukungan BRI Terhadap Hasil Kesepakatan COP26

Pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan komunitas internasional, telah menyepakati Pakta iklim Glasgow dan komitmen menuntaskan penyusunan Buku Aturan Paris dalam forum *The 26th Conference of the Parties (COP26)* di Glasgow. Kesepakatan ini merupakan capaian yang krusial dan positif dalam agenda global menghadapi perubahan iklim.

Sebagai bentuk dukungan atas komitmen iklim pemerintah Indonesia di tingkat internasional, BRI menyusun Rancangan Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagai pedoman dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Persiapan pembuatan RAKB ini disupervisi oleh Direktur Manajemen Risiko dan Komite yang beranggotakan Direktur Keuangan, Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan, Direktur Kecil dan Menengah, dan Direktur Kepatuhan, serta dibantu oleh Tim Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Team*) yang terdiri dari *Market, Portfolio, & Enterprise Risk Management, Planning, Budgeting, and Performance Management, Corporate Secretary, SOE Business, Corporate Banking, Retail dan Medium Business, Compliance, Risiko Analisis Kredit, Divisi Kebijakan Kredit, dan Satuan Kerja Audit Internal. Divisi Market, Portfolio, & Enterprise Risk Management* bertindak sebagai koordinator Tim Keuangan Berkelanjutan. [GRI102-18] [TCFD Gov.a]

Program *Less Plastic Campaign* merupakan program kerja yang diinisiasi oleh *Culture Transformation Division* BRI untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kegiatan sehari-hari. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak tidak hanya bagi pekerja, namun juga masyarakat di sekitar lingkungan Kantor Pusat BRI.

Bentuk dukungan BRI terhadap COP26 juga tercermin dalam kegiatan penghematan kertas berupa *Culture Activation Program Head Office Audit (HOA)* Tahun 2021 dengan nama "*Love Tree Angel*". Program ini mengenakan denda terhadap setiap lembar kesalahan dalam pencetakan dokumen. [GRI 302-5]

Inisiatif lain yang dilakukan BRI dalam dukungannya terhadap COP26 antara lain: [F.7]

- a. BRI telah membangun Menara BRILiaN di Jl. Gatot Subroto Kav. 62, Jakarta Selatan dengan konsep *Green Building*. BRI telah mendapatkan *greenship certificate* kategori *gold* dari *Green Building Council Indonesia* untuk Menara BRILiaN. Adapun yang menjadi parameter penilaian adalah:
 - *Appropriate site development*
 - *Energy efficiency & conservation*
 - *Water conservation*
 - *Material resource & cycle*
 - *Indoor health & comfort*
 - *Building environment management*

Penghematan listrik yang dihasilkan dari Menara ini mencapai 19,49%. Penurunan emisi yang dihasilkan dari Menara ini mencapai 19,49%. Ruang terbuka hijau di Menara ini seluas 3.132,72 meter.
- b. BRI telah memiliki *Electronic Vehicle* (mobil listrik) yang saat ini digunakan oleh Kantor Cabang BRI Renon & Gianyar dengan merk Hyundai Ioniq Prime;
- c. Efisiensi penggunaan *air conditioner* (AC). BRI berupaya mencegah dan mengurangi pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas perkantoran dengan menerapkan manajemen lingkungan yang baik melalui penerapan konsep *eco-office* atau *green office*;



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Menguukuhkan Ketahanan Tata Kelola



- d. Mendukung aktivitas fisik di lingkungan kerja. BRI berupaya mengurangi penggunaan listrik dengan mendorong peningkatan aktivitas fisik pekerja BRI pada jam-jam masuk kerja, istirahat, dan pulang kerja. Salah satunya berupa penggunaan fasilitas tangga yang dapat mengurangi pemakaian lift sehingga menghemat penggunaan listrik;
- e. *Lock & Shutdown My PC*. BRI mendukung gerakan mengunci dan mematikan perangkat komputer setelah pekerjaan selesai agar dapat mengurangi penggunaan listrik yang berlebihan dan mencegah pencurian data;
- f. Optimalisasi BRImo dalam upaya efisiensi penggunaan struk ATM. BRI terus berupaya untuk selalu mendukung penggunaan *mobile banking* dari BRI dibandingkan bank lain. Program ini dapat meningkatkan *fee based income* perusahaan dan secara langsung juga menjaga lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas struk ATM.

Penggunaan Energi

[GRI 302-1] [GRI 302-2] [GRI 302-3] [GRI 302-4] [F.7]

Kegiatan operasional suatu perbankan memerlukan penggunaan energi, khususnya energi listrik yang digunakan untuk kegiatan perkantoran dan bahan bakar untuk kendaraan operasional. Meskipun kegiatan operasional perbankan tidak menggunakan energi secara berlebihan dibandingkan dengan sektor bisnis lainnya, BRI menyadari bahwa Perusahaan tetap memberikan dampak lingkungan. Perusahaan memandang penting dan menjadikan topik ini sebagai salah satu prioritas perusahaan. [GRI 103-1]

Strategi perusahaan dalam mengurangi penggunaan energi antara lain adalah dengan terus menerus meningkatkan kesadaran seluruh pekerja perusahaan untuk menghemat kegiatan operasional seperti mematikan lampu dan AC pada saat meninggalkan ruang kantor. Perusahaan juga meningkatkan efisiensi pemakaian listrik dengan menerapkan beberapa pendekatan, yakni pemakaian lampu LED yang hemat energi, penerapan budaya kerja untuk mematikan listrik di ruangan jika tidak ada aktivitas kerja, dan pengaturan jam operasional elevator di kantor. [GRI 103-2]

Pengelolaan energi BRI dilakukan dengan prinsip penghematan, yaitu menghimbau penghematan energi, air, dan sumber daya alam lainnya. Pendekatan yang dilakukan adalah melakukan penghematan konsumsi energi, baik energi listrik maupun bahan bakar minyak (BBM).

Pengelolaan energi yang optimal juga dapat mengurangi potensi emisi gas karbondioksida (gas rumah kaca). Efisiensi listrik dilakukan dengan menerapkan beberapa pendekatan, yakni: (1) Pemakaian lampu LED yang hemat energi; (2) Penerapan budaya kerja untuk mematikan listrik di ruangan jika tidak ada aktivitas kerja; dan (3) Pengaturan jam operasional lift. Komitmen BRI dalam menjaga lingkungan yang bersih juga diwujudkan dengan penggunaan BBM nonsubsidi untuk kendaraan operasional perusahaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah sejak tahun 2012 yang mengharuskan kendaraan operasional seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggunakan BBM nonsubsidi.



			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Menguukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Upaya penghematan konsumsi BBM kendaraan operasional dilakukan dengan membatasi usia pakai kendaraan operasional dan melakukan pemeliharaan berkala agar konsumsi BBM lebih efisien. Selain itu, BRI juga mewajibkan penggunaan jenis BBM nonsubsidi yang lebih ramah lingkungan. Dengan langkah-langkah tersebut, maka kenaikan volume konsumsi BBM kendaraan operasional dapat dikendalikan.

Terkait sumber daya terbarukan, BRI telah menggunakan beberapa unit mobil listrik dan energi yang bersumber dari solar panel namun belum mengkalkulasi penghematan energi yang dihasilkan. Selain itu, BRI tidak memiliki energi yang dijual. Data penggunaan bahan bakar didapatkan dari data laporan keuangan perusahaan. Penggunaan BBM selama tahun 2021 sebesar Rp 381.640.000.000,-. [GRI 302-1] [GRI 302-2]

Berikut ini adalah tabel estimasi penggunaan energi BRI selama tahun 2021: [F.6]

Uraian	Satuan	2021
Penggunaan Solar* untuk Transportasi	Liter	9.611.812
Penggunaan Pertamina** untuk Transportasi	Liter	8.192.563
Penggunaan Peralite***	Liter	16.920.148
Penggunaan Premium****	Liter	10.771.991
Pemakaian Listrik	kWh	353.912.904
Total Energi yang Dikonsumsi	MJ	2.898.183.466
Intensitas Energi per Kantor Cabang	MJ/kantor/tahun	335.282,68
Intensitas Energi per Pekerja	(MJ/pekerja/tahun)	25.588,31

* Solar (bahan bakar mesin diesel)

*** Peralite (bahan bakar minyak dengan oktan 90)

** Pertamina (bahan bakar minyak dengan oktan 92)

**** Premium (bahan bakar minyak dengan oktan 88)

Pekerja outsourcing termasuk dalam total pekerja yang diperhitungkan pada intensitas energi. Pada periode pelaporan, jumlah penurunan konsumsi energi belum ditampilkan karena BRI tengah melakukan rekalkulasi untuk perhitungan konsumsi energi tahun 2019 dan 2020. Rekalkulasi dilakukan guna meningkatkan *comparability* terhadap penggunaan energi di tahun 2021. Selain itu, BRI belum melakukan perhitungan energi yang dihasilkan untuk produk dan layanan. [GRI 302-4, 302-5]

Tabel Total Biaya Penggunaan Listrik



Total Biaya Penggunaan Listrik	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Total	558.422.081.800	566.170.067.100	553.037.000.000

Penggunaan Air [F.8]

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang digunakan oleh BRI dalam berbagai kegiatan operasional seperti keperluan toilet, masjid, pantri, kantin, dan lain-lain. BRI menyadari bahwa sumber air bersih kian terbatas sehingga BRI menerapkan kebijakan penghematan air dengan memasang anjuran untuk menggunakan air secara hemat dan bijaksana. Dalam rangka mengantisipasi kebocoran, air menjadi keruh, atau kerusakan mayor lainnya; Perusahaan melakukan pengecekan instalasi air secara berkala. [GRI 303-1][GRI 303-5]

Menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu tujuan BRI dalam mencapai keberlanjutan. Oleh karena itu, BRI tidak mengambil air sungai ataupun air tanah untuk mencegah dampak water stress. BRI menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengambilan air yaitu PDAM dan PAM Jaya yang telah memenuhi standar SNI mengenai pemberian kualitas air bersih yang aman untuk dipergunakan di dalam kantor. Biaya pemakaian air selama tahun 2021 sebesar Rp 22.068.907.790,- [GRI 303-2], [GRI 303-3]

Berikut ini adalah tabel estimasi penggunaan air BRI selama tahun 2021:

Tabel Total Biaya Penggunaan Air



Uraian	Satuan	2019	2020	2021
Pemakaian Air	m ³	2.809.471	3.112.340	1.949.046
Performa Pemakaian Air	%	9% (naik)	12% (naik)	37% (turun)
Intensitas Pemakaian Air	m ³ /pekerja	22,37	25,30	17,20

Sejak adanya pandemi Covid-19, penggunaan air di kantor selama tahun 2021 menurun menjadi 1.949.046 m³ dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 3.112.340 m³. Pekerja *outsourcing* termasuk dalam total pekerja yang diperhitungkan dalam efisiensi energi.



Paperless System [F.5]

BRI berupaya meningkatkan efisiensi pemakaian kertas melalui dukungan sistem teknologi yang terus dikembangkan oleh Perusahaan. Salah satunya melalui sistem informasi yang terintegrasi secara baik untuk kepentingan internal BRI dan nasabah, dengan didukung oleh aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang efisiensi operasional.

Selain internet dan mobile banking, berbagai aplikasi *paperless* yang telah diterapkan untuk nasabah dan internal BRI adalah:

1. *e-Tax*, sebuah aplikasi pelaporan pajak bagi nasabah. BRI merupakan institusi perbankan pertama di Indonesia yang menggunakan aplikasi sejenis;
2. *e-Form*, yang merupakan aplikasi pengganti metode pelayanan berbasis kertas bagi para pekerja garis depan di Unit Kerja BRI;
3. *e-Statement*, sebuah aplikasi yang memberi informasi pada nasabah melalui email yang didaftarkan;
4. *New Account Swap*, yang berfungsi membantu nasabah menghubungkan produk pinjaman dan giro tanpa harus memiliki dua rekening terpisah;
5. Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tanpa bukti cetak;
6. BRISPOT, sebuah aplikasi berbasis Android dan terkoneksi melalui internet yang memungkinkan putusan pinjaman mikro untuk dilakukan di tempat sehingga lebih cepat dan *paperless*;
7. MY BRI, sebuah aplikasi berbasis Android dan terkoneksi melalui internet yang memungkinkan putusan pinjaman konsumen untuk dilakukan di tempat sehingga lebih cepat dan *paperless*;
8. BRISStars, merupakan aplikasi internal BRI yang mencakup *e-office* sebagai sarana surat menyurat secara online dan menu kepegawaian lainnya;
9. BRISMART, merupakan aplikasi *e-learning management system* yang digunakan oleh internal BRI.

Tabel Total Penggunaan Kertas

Uraian	Satuan	2019	2020	2021
Pemakaian Kertas (kg per kantor cabang)*	kg	230,03	269,04	226,89
Performa Pemakaian Kertas	%	3% (naik)	14% (naik)	16% (turun)
Intensitas Pemakaian Kertas**	kg/pekerja	17,61	19,75	17,32

*) Seluruh Kantor cabang di Indonesia ***) Seluruh Pekerja termasuk *Outsourcing*

Melalui beragam upaya penghematan, konsumsi kertas pada kegiatan perusahaan telah menunjukkan penurunan. Berdasarkan data laporan keuangan selama 2021, diperkirakan terjadi penurunan pemakaian kertas per kantor cabang menjadi 226,97 kg kertas pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 269,04 kg kertas.

Pada tahun ini BRI telah menghitung total emisi dari penggunaan kertas sebesar 19.619 ton CO₂e yang masuk ke dalam perhitungan scope 1 emisi gas rumah kaca perusahaan. Selama periode pelaporan, tidak terdapat penggunaan material input dari daur ulang serta tidak terdapat produk *reclaimed*. Pemakaian ATK selama tahun 2021 sebesar Rp172.147.000.000,- [GRI 305-6]

Emisi Gas Rumah Kaca

[GRI 305-1] [GRI 305-2] [GRI 305-3] [GRI 305-4] [GRI 305-5] [GRI 305-6] [GRI 305-7] [F.11]

BRI juga turut berpartisipasi mengendalikan emisi karbondioksida (Gas Rumah Kaca/GRK), yakni salah satu gas buang dari hasil penggunaan bahan bakar fosil (BBM, batubara, dan gas) baik untuk kegiatan operasional maupun untuk kegiatan transportasi. Konsumsi listrik, BBM, dan intensitas transportasi perjalanan dinas menghasilkan emisi GRK dengan jumlah volume yang berbanding lurus dengan besaran. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan emisi GRK sama dengan pendekatan yang dilakukan dalam mengelola konsumsi energi tersebut. Dalam mengelola emisi GRK, BRI menjalankan kebijakan penghematan konsumsi listrik, efisiensi penggunaan kendaraan operasional, dan pengelolaan intensitas perjalanan dinas. [GRI 305-4] [GRI 305-5]

Pengelolaan emisi GRK BRI mengacu pada standar pelaporan GHG, dengan penghitungan secara umum berbasis pendekatan kendali operasional dari ISO14064. Kalkulasi emisi dihitung menggunakan metodologi perhitungan *Intergovernmental Panel on Climate Change Guidelines* (IPCC) tahun 2006 yang telah diperbaharui di tahun 2019. Faktor emisi kelistrikan menggunakan faktor emisi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (DJK-ESDM) tahun 2020 dan faktor emisi BBM menggunakan faktor emisi yang diterbitkan oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) ESDM tahun 2021. Sedangkan sumber emisi lainnya menggunakan faktor emisi yang telah disepakati oleh IPCC. [TCFD Metric.b]

Dalam pelaporan ini, BRI telah menghitung secara keseluruhan emisi di seluruh kantor cabang di Indonesia namun untuk tahun dasar emisi masih belum ditetapkan. [GRI 305-1] [GRI 305-2] [GRI 305-3]

Keterangan	2021
Emisi yang Berasal dari Scope 1 (Emisi Positif)* (Kg CO ₂ eq)	133.726.800
Emisi yang Berasal dari Scope 2 (Emisi Positif)* (Kg CO ₂ eq)	320.065.678
Kegiatan Penanaman Pohon (Emisi Negatif)** (Kg CO ₂ eq)	316.700
Emisi Scope 3: Perjalanan Dinas Udara	1.497.162
Emisi Scope 3: Perjalanan Dinas Darat	969.384
Net Emisi (Kg CO ₂ eq)	456.255.857
Intensitas Emisi per Kantor Cabang (Kg CO ₂ eq/Kantor)	52.765
Intensitas Emisi per Pekerja (Kg CO ₂ eq/Pekerja)***	4.028,32

* Emisi Positif adalah emisi yang dihasilkan dari aktivitas operasional perbankan Scope 1 yang berasal dari pemakaian bahan bakar serta penggunaan kertas dan Scope 2 yang berasal dari pemakaian listrik di seluruh kantor BRI di Indonesia. Penggunaan sumber energi tersebut masih dalam kontrol BRI.

** Emisi Negatif adalah emisi yang dihasilkan dari kegiatan yang bersifat menyerap emisi karbon yang dihasilkan oleh korporasi. Emisi negatif yang dihasilkan ini bukanlah emisi yang tersertifikasi dan merupakan hasil pendekatan dari standar perhitungan karbon KLHK.

*** Guna mendukung validitas intensitas emisi per pekerja, maka untuk perhitungan 2021, pekerja *outsourcing* masuk dalam perhitungan intensitas total pekerja. Hal ini mengingat bahwa seluruh energi yang dihasilkan perusahaan digunakan oleh seluruh pekerja BRI termasuk *outsourcing*.

Pada periode pelaporan, jumlah penurunan emisi belum ditampilkan karena BRI tengah melakukan rekalkulasi untuk perhitungan emisi tahun 2019 dan 2020. Rekalkulasi dilakukan guna meningkatkan *comparability* terhadap emisi yang dihasilkan di tahun 2021. [GRI 305-5]

BRI berkomitmen untuk terus mengupayakan inisiatif penurunan emisi dengan mendorong proses digitalisasi. Gas ODS atau gas perusak Ozon, NOx, SOx, VOC (gas senyawa organik yang mudah menguap), PM (Materi Partikulat), dan gas penyumbang emisi udara signifikan lainnya tidak diperhitungkan dalam kalkulasi ini. Hal ini disebabkan BRI masih dalam tahap awal pengklasifikasian data dan akan meningkatkan pendataan mengenai emisi

di dalam RAKB 2022. Upaya ini sejalan dengan kegiatan ‘*Green Taxonomy*’ yang diinisiasi OJK dalam Roadmap Kedua Keuangan Berkelanjutan, sehingga data-data terkait emisi internal mulai bisa dikelola dalam bank data (*database*). Pengelolaan data secara digital dapat mempermudah perusahaan di dalam melakukan pemilahan data dari laporan keuangan ke dalam data performa internal berbasis lingkungan. [GRI 305-6][GRI 305-7]

Pada tahun 2021, BRI berhasil meraih penghargaan sebagai “Penurunan Emisi Korporasi Sektor Emiten Perbankan Kategori *Green*” dan “Penurunan Emisi Korporasi Sektor BUMN Perbankan Kategori *Green*”. Pada tanggal 30 Maret 2021 karena tekadnya untuk mewujudkan dunia yang rendah karbon.



Potensi Penurunan Emisi dari Digitalisasi

Perubahan pola perilaku di tengah pandemi, di mana nyaris seluruh aktivitas beralih dilakukan melalui platform digital, secara tidak langsung berpotensi mengakomodasi upaya penurunan emisi. Dalam penerapan metode ISO14064 GHG Footprint Standard, perhitungan emisi kepada nasabah dilakukan dengan membandingkan pola perilaku nasabah saat melakukan transaksi melalui platform digital dengan nasabah yang melakukan transaksi di kantor cabang. BRI mengimplementasikan pengisian kuesioner kepada nasabah untuk melihat tipe

nasabah BRI selama tahun 2021, karena di kuesioner akan terlihat informasi nasabah seperti lokasi dan informasi lain yang terkait dengan kalkulasi gas rumah kaca. Secara tidak langsung, informasi yang didapatkan melalui pendekatan kuisisioner dapat mengidentifikasi jarak rata-rata nasabah ke kantor BRI terdekat maupun ATM, jenis kendaraan yang dipakai, tingkat efisiensi BBM dari mayoritas kendaraan yang digunakan, dan rata-rata penggunaan smartphone yang dipilih sebagai solusi aplikatif transaksi harian nasabah dan juga solusi penghematan emisi. [GRI 305-3] [F.12]

Potensi Penurunan Emisi dari Digitalisasi Tahun 2021





Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Menguukuhkan Ketahanan Tata Kelola

AgenBRILink

Laporan Transaksi Keuangan Tanpa Kantor



BRILink di Daerah 3T

Frekuensi Transaksi
(dalam ribuan)

104.828

Potensi Penurunan Emisi
dari digitalisasi (Scope 3), kg CO₂eq

20.264.537



EDC

Frekuensi Transaksi
(dalam ribuan)

2.798.805

Potensi Penurunan Emisi
dari digitalisasi (Scope 3), kg CO₂eq

541.042.592



MOCASH
+ BRIMOLA

Frekuensi Transaksi
(dalam ribuan)

11.115

Potensi Penurunan Emisi
dari digitalisasi (Scope 3), kg CO₂eq

2.148.663

TOTAL

Potensi Penurunan Emisi
dari digitalisasi (Scope 3), kg CO₂eq

1.244.356.523







LAPORAN
KEBERLANJUTAN
2021

Merangkul Masyarakat



Sinergi Ultra Mikro [FS13] [FS14]

BRI bersama dengan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) yang tergabung dalam Ekosistem Ultra Mikro (UMi) terus mengakselerasi produk dan layanan UMi di tengah masyarakat, untuk membuka peluang tumbuh dan berkembang bagi para pelaku usaha ultra mikro. Langkah ini merupakan salah satu strategi BRI untuk melengkapi DNA bisnis mikro sekaligus memantapkan kepemimpinan pasar di Segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Ultra Mikro (UMi). Sepanjang tahun 2021, wujud sinergi diimplementasikan melalui 3 (tiga) inisiatif utama, antara lain: [F.26]



- Sinergi layanan yang diwujudkan dalam unit kerja bersama (*co-location*) menggunakan **SenyuM** (Sentra Layanan Ultra Mikro) memberikan layanan keuangan yang lebih lengkap dan memudahkan akses bagi para pelaku usaha.
- Pemasaran dengan mengedepankan inovasi teknologi guna membantu para tenaga pemasar; mantri BRI, sales Pegadaian dan Account Officer PNM, berkolaborasi merekomendasikan dan memasarkan produk lintas entitas melalui *platform* digital **SenyuM Mobile**. Kedua *platform* tersebut merupakan hasil integrasi tiga *platform* pemasaran digital yaitu BRISPOT (BRI), Selena (Pegadaian), dan PNM Digi (PNM) untuk mengintegrasikan penjualan silang (*cross selling*).
- Integrasi *database* potensial dari ketiga entitas untuk mendukung jalannya *cross selling*.



Model bisnis BRI, Pegadaian, dan PNM akan saling melengkapi untuk melayani layanan yang lebih terintegrasi dalam tiga fase yaitu “Empower, Integrate dan Upgrade”. Sejak diresmikan pada 13 September 2021 telah terdapat 153 kantor *co-location SenyuM* yang tersebar di seluruh Indonesia.

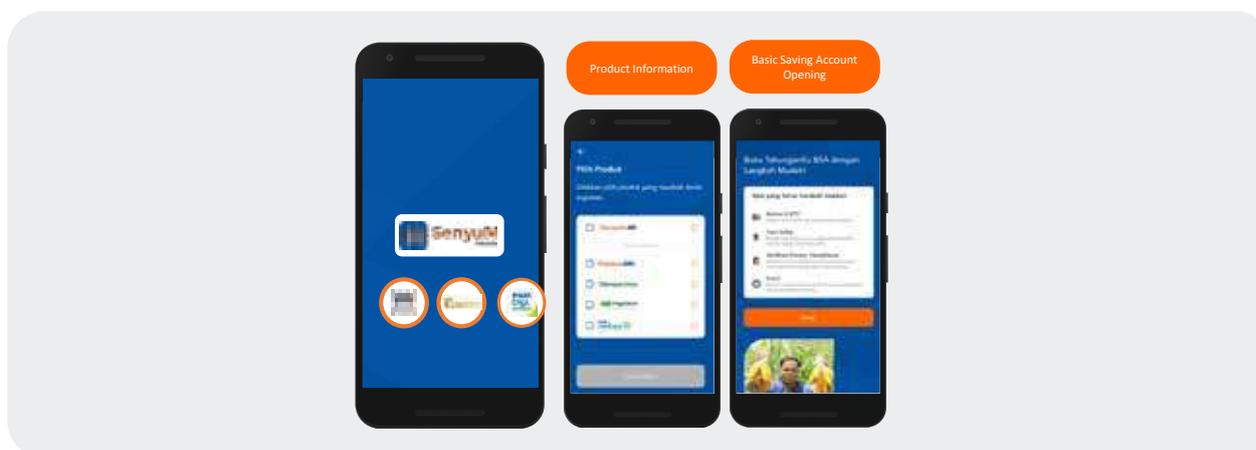
SenyuM merupakan kantor layanan terpadu antara BRI-Pegadaian-PNM yang memudahkan nasabah dari ketiga perusahaan untuk melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Perbedaan utama layanan *colocation SenyuM* dibanding kantor BRI pada umumnya adalah nasabah Pegadaian dan PNM dapat bertransaksi

sekaligus menabung di kantor yang sama, begitupun sebaliknya. Sinergi ini bertujuan memperluas jangkauan Perusahaan dengan penyediaan layanan keuangan yang lebih lengkap dan akses yang mudah kepada masyarakat.

Sebagai contoh, nasabah yang ingin membuka tabungan emas dari tenaga pemasar BRI dapat memasukkan data melalui **SenyuM** Mobile. Data tersebut langsung terhubung ke pangkalan data (*database*) milik Pegadaian. Begitu juga sebaliknya, apabila tenaga pemasar Pegadaian menemui nasabah yang ingin menambah modal untuk usahanya, maka

data nasabah tersebut dapat diinput melalui **SenyuM** Mobile. Data akan langsung terhubung dengan pangkalan data KUR BRI.

Selama tahun 2021, Sinergi Ultra Mikro telah diakses secara fisik melalui kantor layanan terpadu dan melalui aplikasi **SenyuM** Mobile. Keberadaan **SenyuM** Mobile mendapat respons yang baik dari masyarakat. Saat ini tercatat rata-rata 50 orang membuka tabungan emas, melakukan gadai, atau mencicil emas per hari. Hal ini tentunya merupakan capaian awal yang positif bagi upaya BRI mendorong inklusi keuangan, yang sekarang mencapai 76% menjadi 90% di tahun 2025.



Di sisi lain, BRI terus mendorong penurunan biaya dana Pegadaian dan PNM sehingga *cost of fund* dari keduanya sudah lebih rendah dibandingkan sebelum *holding* terbentuk. Kehadiran Sinergi Ultra Mikro ini akan terus didukung untuk memberikan pemberdayaan dan menyediakan pembiayaan yang lebih luas, lengkap, dan murah, sehingga selaras dengan agenda utama pemerintah dalam mendorong UMKM yang lebih berkembang dan maju.

Tabel Co-location yang telah bergabung di Ultra Mikro Berdasarkan Wilayah [FS13]

No.	Wilayah	Total
1.	Medan	5
2.	Pekanbaru	4
3.	Padang	2
4.	Palembang	5
5.	Lampung	2
6.	Jakarta 1	1
7.	Jakarta 2	12
8.	Jakarta 3	9
9.	Bandung	29

No.	Wilayah	Total
10.	Semarang	10
11.	Yogyakarta	19
12.	Surabaya	9
13.	Malang	12
14.	Denpasar	7
15.	Banjarmasin	5
16.	Makassar	12
17.	Manado	9
18.	Jayapura	1

Dengan terbentuknya Sinergi Ultra Mikro, semakin meneguhkan komitmen BRI dalam berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya pada tujuan ke 5 yaitu *Gender Equality*, melalui penyaluran produk PNM Mekaar.

PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku UMKM, PNM Mekaar mampu memberikan akses permodalan bagi para perempuan prasejahtera sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hingga Desember 2021, PNM Mekaar telah mampu menyalurkan pinjaman kepada 12.1 juta nasabah dengan total *outstanding* sebesar Rp25.9 Triliun. PNM Mekaar memberikan 3 (tiga) jenis modal untuk pelaku UMK. Modal tersebut antara lain modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial. Ekosistem Ultra Mikro dikembangkan melalui digitalisasi sehingga dapat memberikan akses pembiayaan yang mudah

sekaligus mengurangi biaya pinjaman kepada pelaku usaha. Kemudahan-kemudahan ini secara tidak langsung juga dapat menghindarkan masyarakat dari praktik pinjaman berbunga tinggi.

Ultra Mikro juga mendorong literasi dan inklusi keuangan sebagai upaya memperkuat akselerasi segmen UMKM dan UMi di masa mendatang. Tingkat literasi yang memadai merupakan faktor kunci dalam menciptakan sumber pertumbuhan yang berkelanjutan, sehingga dapat memberi nilai dan keuntungan jangka panjang kepada para pemangku kepentingan.

Keberadaan Agen BRILink turut dioptimalkan dalam membantu layanan inklusi keuangan. Mitra UMi adalah salah satu Agen BRILink yang telah didelegasikan ke seluruh Indonesia sebagai perpanjangan tangan BRI dengan fungsi tambahan untuk melayani dan mengelola pinjaman Ultra Mikro. Mitra UMi dapat membantu proses pemasaran pinjaman, verifikasi, dan analisa calon debitur sekaligus membantu realisasi dan penagihan angsuran pinjaman. [FS13]



			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Menguukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Kantor SenyuM

Awalnya, bangunan kantor SenyuM diambil dari unit kerja BRI yang telah ada. Kemudian, kantor-kantor tersebut dikembangkan melalui *co-branding* tiga entitas dengan menyediakan sinergi layanan BRI, Pegadaian dan PNM dalam satu atap. Kantor layanan terpadu ini memiliki perbedaan dengan unit kerja BRI pada umumnya. Terdapat penyediaan akses yang seluas-luasnya bagi nasabah yang ingin membuka rekening TabunganKu, Tabungan BRI Simpedes, Simpedes dan mendapatkan modal usaha KUR BRI, maupun naik kelas ke KUPeDES. Selain itu, nasabah juga dapat menikmati layanan dan produk dari Pegadaian seperti Tabungan Emas, Pinjaman Gadai, hingga Cicil Emas. Sementara itu, PNM memiliki *space back once* untuk mengelola kebutuhan transaksional pinjaman anggota kelompok Mekaar.

Dengan sinergi bisnis ini, kantor SenyuM diharapkan dapat mengakselerasi inklusi keuangan. Nasabah Pegadaian yang saat ini sebagian besar belum memiliki tabungan dimudahkan untuk membuka tabungan BRI saat bertransaksi gadai. Sebaliknya, nasabah BRI mendapat kemudahan berinvestasi tabungan emas. Bagi PNM, SenyuM dapat mempercepat operasional transaksi penarikan dan penyeteroran pinjaman kelompok Mekaar.

Efektivitas dan efisiensi perlu ditingkatkan melalui perancangan ulang proses bisnis, antara lain dengan mengutamakan layanan nontunai, baik melalui pencairan maupun pembayaran pinjaman Gadai dan Mekaar. Langkah ini dapat menurunkan biaya operasional dan risiko operasional dari Pegadaian dan PNM, sehingga sinergi ini dapat memberikan nilai lebih kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Ultra Mikro.

Keberadaan sektor Usaha Mikro merupakan bagian dari DNA BRI. Oleh karena itu, BRI berkomitmen memperbesar dukungan dan pemberdayaan segmen Ultra Mikro pada tahun 2021, yang dikemas dengan semangat transformasi digital yaitu *go smaller, go shorter, go faster*. Layanan keuangan BRI seperti proses penyaluran pembiayaan dapat dilakukan secara lebih cepat dengan biaya yang lebih terjangkau. Melalui pinjaman ringan ini, BRI berharap para pelaku usaha Ultra Mikro dapat mempertahankan usahanya dan segera pulih dari dampak pandemi Covid-19, serta meningkatkan penetrasi segmentasi kredit Ultra Mikro dan sistem transaksi *micropayment* di tengah masyarakat.



Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) - Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

BRI melalui unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia berkomitmen dalam kegiatan pengembangan masyarakat melalui pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan yang secara internal dikomunikasikan sebagai Program TJSL BRI Peduli.

Pelaksanaan Program TJSL BRI Peduli mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang kemudian diadopsi ke dalam peraturan internal perusahaan melalui Surat Edaran NO. SE. 50 –DIR/CSC/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BRI Peduli PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN tersebut, terjadi perubahan sektor penyaluran Program TJSL BRI Peduli yang sebelumnya mengacu pada 7 sektor Bina Lingkungan menjadi mengacu pada 4 pilar utama yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan serta Pilar Hukum & Tata Kelola dengan sasaran kegiatan mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Penerapan program TJSL BRI juga berpedoman pada konsep *Triple Bottom Line*, yaitu *Pro People*, *Pro Planet*, dan *Pro Profit* yang mendasari program BRI selama ini yang menyelaraskan social value dan business value perusahaan dan sejalan dengan strategi *Environmental, Social, & Governance* (ESG) BRI.

Penyaluran Program TJSL BRI Peduli periode 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Penyaluran Program TJSL BRI Peduli Periode Tahun 2019–2020 (Audited)

Uraian	2019		2020	
	Nominal (Rp. Juta)	%	Nominal (Rp. Juta)	%
Indonesia Peduli	6.336	2,80	69.709	26,39
Indonesia Cerdas	70.192	30,98	52.607	19,92
Indonesia Sehat	44.760	19,75	45.907	17,38
Indonesia Membangun	29.303	12,93	32.165	12,18
Indonesia Takwa	43.785	19,32	34.948	13,23
Indonesia Lestari	866	0,38	4.432	1,68
Indonesia Sejahtera	31.342	13,83	24.369	9,23
Total	226.584	100,00	264.137	100,00

			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Menguatkan Ketahanan Tata Kelola

Penyaluran Program TJSL BRI Peduli Periode Tahun 2021 (Audited)

Pilar	Nominal (Rp. Juta)	%
Sosial	186.597	68,99
Ekonomi	13.703	5,07
Lingkungan	70.159	25,94
Total	270.460	100,00

Adapun pengklasifikasian Program Pengembangan Masyarakat TJSL BRI Peduli adalah sebagai berikut:

Alokasi Anggaran Program Pengembangan Masyarakat TJSL BRI Peduli

Uraian	Total Nilai 2019 (%)	Total Nilai 2020 (%)	Total Nilai 2021 (%)
Sumbangan Sosial (<i>Charitable Donations</i>)	22,55	43,77	45,44
Investasi Masyarakat (<i>Community Investments</i>)	63,62	47,00	46,70
Inisiatif Komersial (<i>Commercial Initiatives</i>)	13,83	9,23	7,86
Total	100,00	100,00	100,00



Penghargaan

Pada tahun 2021 BRI menerima beberapa penghargaan dan pengakuan atas pelaksanaan Program TJSL BRI Peduli antara lain

No	Penghargaan	Penyelenggara
1	TOP CSR 2021 - TOP CSR Awards #Star 5	Top Business
2	TOP CSR 2021 - Top Leader On CSR Commitment 2020	Top Business
3	BISRA 2021 - Gold Champion In CSR Program	Bisnis Indonesia
4	Teropong CSR 2021 - Peduli Covid-19	teropongsenayan.com
5	Teropong CSR 2021 - Peduli Bencana	teropongsenayan.com
6	Teropong CSR 2021 - Peduli UMKM	teropongsenayan.com
7	Merdeka Award - Program Kepedulian Sosial Membangu Dampak Covid-19	merdeka.com
8	The Best Nusantara CSR Awards 2021/The Best CSR Of The Year	The La Tofi School of Corporate Social Responsibility
9	CEO CSR Of The Year 2021 untuk Direktur Utama BRI (Bapak Sunarso)	The La Tofi School of Corporate Social Responsibility
10	Nusantara CSR Awards 2021 Kategori Peningkatan Mutu Pendidikan	The La Tofi School of Corporate Social Responsibility
11	Nusantara CSR Awards 2021 Kategori Pemberdayaan Ekonomi Komunitas	The La Tofi School of Corporate Social Responsibility
12	Nusantara CSR Awards 2021 Kategori Peningkatan Mutu Kesehatan	The La Tofi School of Corporate Social Responsibility
13	Nusantara CSR Awards 2021 Kategori Pengembangan Desa Wisata	The La Tofi School of Corporate Social Responsibility
14	Nusantara CSR Awards 2021 Kategori Pelibatan Komunitas dalam Menangani Sampah	The La Tofi School of Corporate Social Responsibility
15	Nusantara CSR Awards 2021 Kategori Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	The La Tofi School of Corporate Social Responsibility
16	Nusantara CSR Awards 2021 Kategori Integrasi Program untuk Dampak Luas	The La Tofi School of Corporate Social Responsibility
17	Nusantara CSR Awards 2021 Kategori Pemimpin Penginspirasi Praktik CSR	The La Tofi School of Corporate Social Responsibility
18	Nusantara CSR Awards 2021 Kategori Bantuan Kesehatan dan Ekonomi (charity) untuk penanganan Darurat Covid-19	The La Tofi School of Corporate Social Responsibility
19	BUMN Track TJSL & CSR Award 2021 - Pilar Ekonomi Juara I	Majalah BUMN Track
20	BUMN Track TJSL & CSR Award 2021 - Pilar Lingkungan Juara I	Majalah BUMN Track
21	BUMN Track TJSL & CSR Award 2021 - Pilar Sosial Juara III	Majalah BUMN Track
22	Indonesia Award 2021 - Kategori Corporate Social Responsibility in Handling Pandemic	iNEWS
23	Integrated CSR Award	IDX Channel



			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Menguatkan Ketahanan Tata Kelola

Program TJSL BRI Peduli

Pilar Sosial

Program TJSL BRI Peduli di dalam Pilar Sosial berfokus untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar Sosial meliputi PB nomor 1 - *No Poverty*, 2 - *Zero Hunger*, 3 - *Good Health & Well Being*, 4 - *Quality Education*, dan 5 - *Gender Equality*. Pada tahun 2021 BRI telah menyalurkan bantuan untuk masyarakat sebesar Rp. 186,6 miliar melalui pelaksanaan program-program unggulan di Pilar Sosial antara lain:

1. Apresiasi Dana Pendidikan untuk Anak Tenaga Pendukung Medis Covid-19

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada tenaga pendukung medis yang bertugas dalam rangka penanganan Covid-19, BRI memberikan bantuan kepada anak tenaga pendukung medis berupa dana pendidikan untuk menunjang proses pendidikannya. Bantuan tersebut diberikan kepada 1.800 anak tenaga pendukung medis yang berasal dari berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia. Apresiasi ini diberikan bertepatan dengan HUT ke-76 Republik Indonesia. [GRI 413-1]



2. BRI Peduli Sekolah Tapal Batas

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian oleh BRI. Melalui Program Ini Sekolahku, BRI memberikan bantuan berupa renovasi/pembangunan sekolah dan bantuan sarana prasarana pendukung pendidikan kepada 4 sekolah yang terletak di perbatasan NKRI yaitu Atambua NTT, Karimun Kepulauan Riau, Jayapura dan Nunukan Kalimantan Utara. Program ini fokus pada perbaikan infrastruktur sekolah yang sudah tidak layak untuk mendukung proses belajar mengajar sehingga melalui program ini diharapkan mampu memberikan ruang belajar yang nyaman bagi siswa dan guru.

[GRI 203-1, 413-1]



3. BRI Peduli Bencana Alam dan Non-Alam

Pada tahun 2021, di Indonesia terjadi berbagai macam bencana baik alam maupun non-alam. BRI sebagai Bank BUMN yang memiliki jaringan tersebar di seluruh wilayah Indonesia memiliki tanggung jawab dalam membantu meringankan korban bencana. Dalam rangka mempercepat respon tanggap darurat ketika terjadi kejadian bencana, BRI membentuk sebuah tim tanggap darurat bencana yang dinamakan Tim Elang. Tim Elang mempunyai tugas utama yaitu melaporkan kondisi aset dan operasional BRI, kondisi pekerja BRI dan keluarganya serta penyaluran bantuan dari BRI Group. Salah satu bencana nasional yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 yaitu bencana siklon tropis seroja di Nusa Tenggara Timur yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang parah. BRI turun ke lokasi bencana untuk langsung memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Kecamatan Adonara, Flores Timur. Bantuan yang diberikan berupa makanan siap santap, obat-obatan, sembako dan kebutuhan logistik lainnya.



4. Bantuan Sarana Prasarana Pendukung Kesehatan Rumah Sakit

Dalam rangka membantu pemerintah untuk menanggulangi kenaikan penyebaran wabah Covid-19, BRI memberikan bantuan berupa sarana prasarana pendukung kesehatan yang diberikan kepada 74 rumah sakit di seluruh Indonesia. Bantuan sarana prasarana meliputi *hospital bed*, tabung oksigen, oximeter dan lainnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien.



			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Menguatkan Ketahanan Tata Kelola

5. Berbagi Bahagia Bersama BRI

Dalam rangka mengisi bulan Ramadhan 1442 H, BRI mengadakan kegiatan berbagi sembako untuk masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan di 18 Regional Office BRI tersebut berupa penyaluran bantuan berupa sembako ke 200 Panti Asuhan dan 50 Panti Werdha seluruh Indonesia.



Pilar Ekonomi

Program TJSI BRI Peduli di dalam Pilar Ekonomi berfokus untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Pilar Ekonomi meliputi TPB nomor 7 - *Affordable and Clean Energy*, 8 - *Decent Work and Economic Growth*, 9 - *Industry Innovation and Infrastructure*, 10 - *Reduced Inequalities*, dan 17 - *Partnerships For the Goal*. BRI turut mendukung pelaksanaan Program TJSI Pilar Ekonomi dengan menyalurkan bantuan sebesar Rp. 13,70 miliar pada tahun 2021 yang diwujudkan ke dalam program pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. BRI Peduli Pemberdayaan Perempuan

Program Bantuan Pemberdayaan Perempuan merupakan bantuan yang diberikan kepada kelompok usaha perempuan dalam bentuk pelatihan dan peralatan usaha. Bantuan ini diberikan kepada 18 kelompok usaha wanita di 18 Regional Office BRI. Program ini merupakan bentuk dukungan BRI kepada kelompok perempuan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensinya sehingga dapat berperan lebih jauh dalam kehidupan bermasyarakat. Selain mengikuti pelatihan usaha, kelompok usaha perempuan yang berpartisipasi dalam program ini wajib untuk mengajukan produk yang menjadi unggulan usahanya yang akan dinilai oleh BRI. [GRI 203-2, 413-1]



1. BRI Peduli Desa BRILiaN

Program BRI Peduli Desa BRILiaN merupakan bantuan kepada desa dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan sarana fisik pendukung desa. Desa yang dipilih menjadi calon Desa BRILiaN harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh BRI salah satunya memiliki *economic value* dan *social value* yang dapat dikembangkan oleh BRI. Pada tahun 2021, program ini telah diberikan kepada 5 desa terpilih yaitu Desa Sukalaksana di Garut, Dusun Butuh di Magelang, Desa Ketapanrame di Mojokerto, Desa Sanankerto di Malang dan Desa Tebara di Sumba Barat. [GRI 203-1, 203-2, 413-1]



2. Bantuan Sarana Prasarana Usaha

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepada dunia usaha, BRI memberikan bantuan dalam bentuk sarana prasarana pendukung usaha kepada UMKM yang berada di sekitar unit kerja BRI. Bantuan tersebut antara lain

- a. Bantuan Sarana Prasarana Menjahit wanita Maumere [GRI 203-2, 413-1]
 BRI memberikan bantuan berupa sarana prasarana pelatihan menjahit kepada kelompok wanita di daerah Maumere. Kelompok Menjahit Wanita Maumere merupakan perkumpulan wanita yang memiliki kegiatan menjahit di Maumere. Kelompok ini memiliki peran penting dalam menjalankan pelatihan menjahit di wilayah tersebut. Bantuan dari BRI bertujuan untuk membantu memenuhi perlengkapan sarana menjahit sehingga diharapkan membantu meningkatkan strata ekonomi anggota kelompok tersebut.



			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Menguukuhkan Ketahanan Tata Kelola

b. Bantuan Kendaraan Penunjang Usaha

Dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha masyarakat, BRI memberikan bantuan kepada kelompok usaha berupa kendaraan penunjang usaha. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani terpadu di Desa Guwa Lor, Kaliwedi Cirebon. Bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian BRI dalam mendukung pertumbuhan UMKM di sekitar wilayah kerja BRI. [GRI 203-1]



Pilar Lingkungan

Program TJSI BRI Peduli didalam Pilar Lingkungan berfokus untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pilar Lingkungan meliputi TPB nomor 6 - *Clean Water and Sanitation*, 11 - *Sustainable Cities and Communities*, 12 - *Responsible Consumption and Production*, 13 - *Climate Action*, 14 - *Life Below Water* dan 15 - *Life on Land*. BRI telah menyalurkan bantuan sebesar Rp. 70,16 miliar pada tahun 2021 melalui program-program antara lain:

1. BRI Peduli Bersih-Bersih Kali

Program Bersih-Bersih Kali merupakan salah satu upaya BRI dalam rangka pelestarian lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini meliputi normalisasi sungai, pembangunan sarana fisik dan edukasi lingkungan sehat. Di dalam program ini juga terdapat program pemberdayaan berupa pelatihan pengolahan “Sampah Jadi Duit” dan bantuan alat pencacah sampah. Masyarakat di sekitar aliran sungai diberikan pelatihan cara pengolahan sampah anorganik dan organik sehingga memberikan nilai ekonomis yang bermanfaat.



Program Bersih-Bersih Kali Tahap I telah dijalankan mulai tahun 2020 di 19 lokasi sungai di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021, BRI melaksanakan program *maintenance* untuk 18 lokasi sungai dan melaksanakan Program Bersih-Bersih Kali Tahap II yang dilaksanakan di 10 lokasi sungai yang berbeda dengan lokasi tahap I.

Secara bertahap, setelah *Pro Planet* dan *Pro People* terwujud, maka manfaat dari pembersihan sungai dan pengelolaan sampah yang benar akan memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat sekitar, sehingga *Pro Profit* dapat direalisasikan. Uang yang dihasilkan dari penjualan sampah kemudian akan ditabung melalui rekening BRI dan bisa ditarik melalui Agen BRILink, Unit Kerja BRI, maupun jaringan *e-channel* milik BRI lainnya. Melalui kegiatan ini, BRI akan terus mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap fungsi dan peran sungai dalam kehidupan dan masa depannya. [GRI 203-1] [FS13]

2. BRI Peduli Woman Communi-Tree

Untuk mendukung peran perempuan dalam kegiatan masyarakat, BRI memberikan bantuan melalui Program Woman Communi-Tree. Program Woman Communi-Tree merupakan bantuan pembuatan infrastruktur fisik Urban Farming, rumah tanaman, green house, dan infrastruktur lainnya; serta pemberian bantuan tanaman produktif berupa sayur-sayuran, buah-buahan, obat keluarga, dan jenis tanaman produktif lainnya. Bantuan diberikan kepada 18 kelompok wanita di seluruh Indonesia. Program Woman Communi-Tree sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian BRI dalam mendukung kelestarian lingkungan serta wujud nyata pemberdayaan kaum perempuan. [GRI 203-1]



3. Pengolahan Sampah Terpadu

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang krusial terutama di kota besar yang padat penduduk. Banyaknya sampah yang dihasilkan dibandingkan dengan kapasitas tempat pengolahan sampah yang kurang memadai menyebabkan pengelolaan sampah menjadi terbatas sehingga menyebabkan permasalahan sampah di lokasi-lokasi tertentu. Melihat hal tersebut, BRI memberikan bantuan berupa renovasi/pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan peralatan pendukungnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta.



Bantuan tersebut diberikan di 2 titik lokasi yang digunakan untuk pengolahan sampah anorganik dan organik. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk pengelolaan sampah di wilayahnya sehingga dapat mencegah munculnya permasalahan sampah. [GRI 203-1]

			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Mengukuhkan Ketahanan Tata Kelola

4. Bantuan Pembibitan Tanaman Keras dan Pohon Produktif

BRI berupaya untuk terus mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan melibatkan peran masyarakat. Bekerja sama dengan pihak TNI, BRI memberikan bantuan berupa bibit tanaman keras dan pohon produktif yang diserahkan kepada Brigif 21 Komodo Kupang. Bibit yang ditanam antara lain cendana, asam jawa, jambu batu, flamboyan, mangga, kelor (merunggai), dan tanaman buah-buahan lainnya. Selain bermanfaat bagi pelestarian lingkungan, komoditas yang dihasilkan tanaman-tanaman tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Markas Brigif 21 Komodo. Selain bibit tanaman, BRI juga membantu penyediaan sarana pemeliharaan berupa pupuk, peralatan untuk menyiram tanaman, serta berbagai sarana pendukung lainnya.



Evaluasi Kegiatan TJSL [GRI 103-3]

BRI menyadari setiap implementasi memerlukan evaluasi guna meningkatkan kualitas dan dampak kegiatan ke depan. BRI telah melakukan penilaian terhadap dampak dari kegiatan TJSL dengan menggunakan metode pengukuran *Social Return On Investment* (SROI). SROI adalah sebuah pendekatan untuk memahami dan mengelola dampak atas nilai sosial (social value), ekonomi, dan lingkungan yang diciptakan dari suatu kegiatan. SROI menyajikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dialami oleh para pemangku kepentingan sebagai akibat dari pelaksanaan sebuah program serta membandingkan nilai dampak terhadap investasi yang dikeluarkan.

BRI memberikan pelatihan kepada pekerja untuk terus meningkatkan kualitas dan memberikan pengaruh positif dari pelaksanaan kegiatan TJSL. Adapun pelatihan yang telah dijalankan, antara lain:

Tabel Pelatihan SROI

Tanggal Pelatihan	Topik Pelatihan	Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Peserta	Level Pekerja	Jenis Kelamin
18 Desember 2021	Pelatihan SROI (<i>Social Return On Investment</i>)	Bumi Global Karbon	10 orang	<ul style="list-style-type: none"> Assistant Vice President Manager Assistant Manager Assistant Officer 	L/P
6-7 Oktober 2021	<i>Measuring the Social Return on Investment</i> (SROI)	CECT Trisakti	6 orang	<ul style="list-style-type: none"> Manager Assistant Manager 	L/P
April 2021	From CSR to CSV "Manajemen Strategis Berbagi"	Departemen Manajemen UNAIR	4 orang	<ul style="list-style-type: none"> Assistant Vice President Senior Manager Assistant Manager 	L/P

Dalam pelaksanaan aktivitas bisnis cabang di daerah, BRI mengutamakan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai pekerja untuk masing-masing unit. BRI menyadari pemberdayaan dan kemajuan tiap daerah merupakan tanggung jawab kita bersama yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Global ke 11 yaitu Kota dan Komunitas Berkelanjutan. Salah satu unit kerja BRI yaitu Kantor Cabang Mojokerto memiliki pemberdayaan masyarakat lokal sekitar 80% dari total pekerja.

BRI belum melakukan penilaian dampak sosial dan lingkungan secara khusus dari keterlibatan masyarakat lokal, serta belum memiliki komite konsultasi, dewan kerja, komite keselamatan, dan kesehatan kerja yang melibatkan masyarakat lokal. Apabila terdapat keluhan dari masyarakat lokal terhadap aktivitas operasional, pengaduan formal dapat disampaikan melalui unit kerja BRI terdekat atau menghubungi *contact BRI*. Sejauh ini tidak terdapat dampak aktual dan negatif yang signifikan dari aktivitas di lokasi operasional perusahaan terhadap masyarakat lokal.

[GRI 413-1] [GRI 413-2]

			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Menguatkan Ketahanan Tata Kelola

Literasi dan Inklusi Keuangan

[FS13] [FS14] [FS16]

BRI memahami betapa pentingnya tingkat literasi keuangan suatu individu dan perusahaan sebagai faktor penentu baik atau buruknya kualitas manajemen keuangan. Di sisi lain, BRI juga memahami adanya ketimpangan tingkat literasi keuangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan minim akses terhadap layanan publik atau perbankan. Situasi ini rawan berujung pada penggunaan produk dan layanan keuangan yang tidak tepat. Oleh sebab itu, BRI berupaya mendorong peningkatan literasi masyarakat, salah satunya melalui pelatihan dalam penggunaan produk dan layanan yang lebih canggih. Program peningkatan literasi ini secara tidak langsung juga bermanfaat dalam meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan BRI.

BRI menyadari bahwa masyarakat yang berada jauh dari perkotaan, kantor cabang, maupun mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sulit untuk melakukan transaksi keuangan perbankan. Menanggapi isu tersebut, BRI menghadirkan pengembangan layanan perbankan tanpa kantor dan transaksi nontunai dibantu Agen BRILink dengan memanfaatkan *smartphone* yang dapat menjadi solusi untuk mempermudah akses transaksi perbankan. Layanan ini berdampak positif meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat yang belum tersentuh layanan secara fisik. BRI juga peduli akan keamanan informasi data nasabah karena berpotensi membuka peluang fraud dan pencurian data, yang kemudian dapat menurunkan kepercayaan nasabah kepada BRI. Oleh karena itu, BRI terus meningkatkan profesionalitas dan memastikan integritas agen.

BRI memperluas jangkauan dan mendukung program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya meningkatkan literasi keuangan serta memberikan edukasi mengenai instrumen asuransi dan investasi reksadana kepada pemuda. Kegiatan inklusi

keuangan bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan yang berkualitas dan aman, dengan biaya yang terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Di Indonesia, kelompok yang mendapat prioritas akses inklusi keuangan adalah, namun tidak terbatas pada, masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan penduduk di daerah tertinggal. [FS13]

BRI melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan produk, metode, dan teknologi untuk menjangkau masyarakat luas, terutama golongan masyarakat yang menjadi prioritas akses inklusi keuangan. Dampak positif terkait inklusi keuangan adalah terbukanya akses masyarakat kepada pelayanan produk dan layanan perbankan yang dapat membantu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama golongan yang membutuhkan bantuan finansial seperti masyarakat berpenghasilan rendah. Bagi pelaku UMKM, terbukanya akses pada layanan keuangan berpotensi meningkatkan produktivitas untuk mencapai hasil yang maksimal. Sementara itu, dampak negatif yang harus dikelola dari inklusi keuangan adalah kehadiran fintech (*financial technology*) yang berpotensi meningkatkan risiko dan biaya yang harus ditanggung konsumen. Sebabnya, tingkat pemahaman tentang produk dan jasa fintech antara tiap individu akan berbeda-beda. Maka dari itu, diperlukan usaha yang intensif agar masyarakat terhindar dari kerugian akibat ketidakpahaman dalam memakai produk dan jasa. [F.25]

Pendekatan digital juga membuat BRI mampu menjangkau nasabah dan pelaku UMKM yang ada di seluruh penjuru Indonesia. BRI saat ini telah memanfaatkan teknologi open API (*Application Programming Interface*). Selain itu, BRI senantiasa memberikan kemudahan kredit melalui beberapa

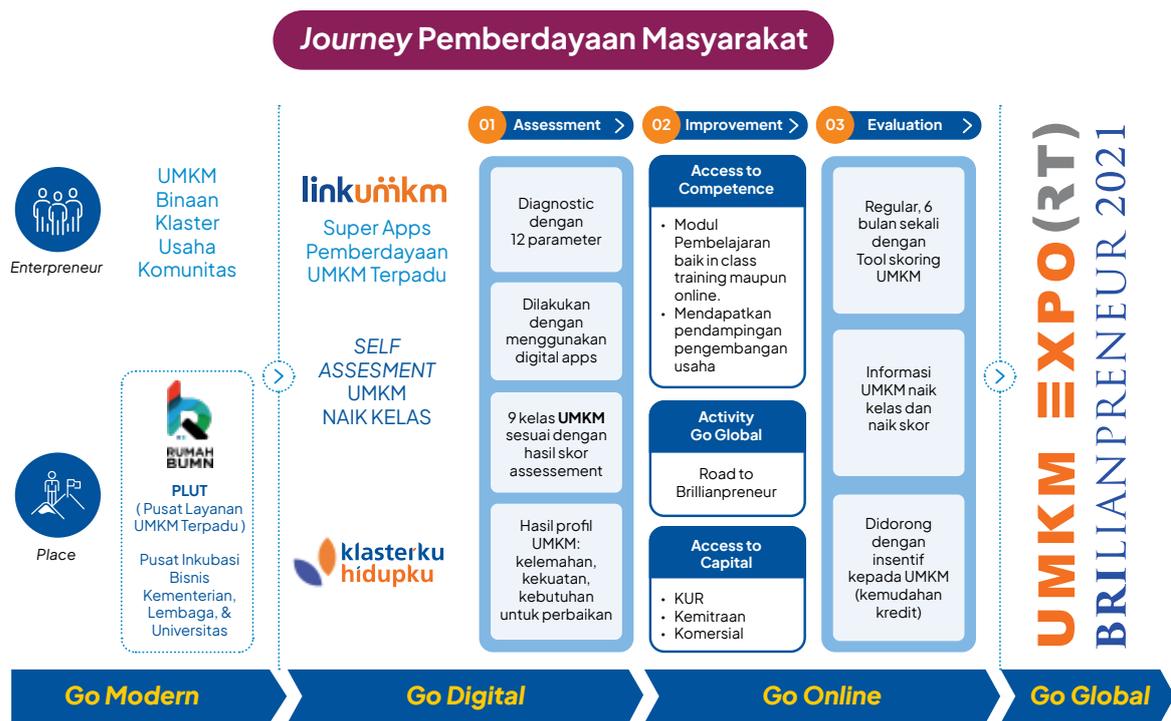
inisiatif layanan digital, antara lain kredit digital CERIA. Seluruh proses pengajuan berlangsung secara nonfisik melalui aplikasi, melalui proses verifikasi digital, *credit scoring*, dan *digital signature*. Hal ini dilakukan untuk mendukung bisnis digital dan nondigital sehingga nasabah dan mitra dapat menikmati layanan perbankan yang dimiliki oleh BRI dengan cepat, murah, dan mudah. Berbagai kemudahan ini sesuai dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan di seluruh Indonesia. [FS15]

BRI berkomitmen menyediakan produk yang membantu masyarakat untuk meningkatkan kesiapan finansial dalam mempersiapkan pendapatan yang berkelanjutan. Sebagai agen pengembangan, DPLK BRI bertanggung jawab meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan melalui beberapa kegiatan seperti program penjualan langsung dan edukasi keuangan kepada segmen mikro (Agen BRILink, PMI, dan pelanggan mikro lainnya), serta memberikan bantuan literasi persiapan keuangan untuk para mahasiswa.

a. Wadah Penyaluran Literasi Keuangan [FS16]

1. Journey Pemberdayaan Masyarakat

1.1 Klaster Hidupku



Klaster Hidupku merupakan pola pendekatan pemasaran kepada komunitas atau kelompok sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Tata kelola data pemasaran yang sebelumnya dilakukan manual oleh para mantri, kini tercatat dalam sistem database. Hal tersebut tertuang dalam program yang disebut Klaster Usaha.

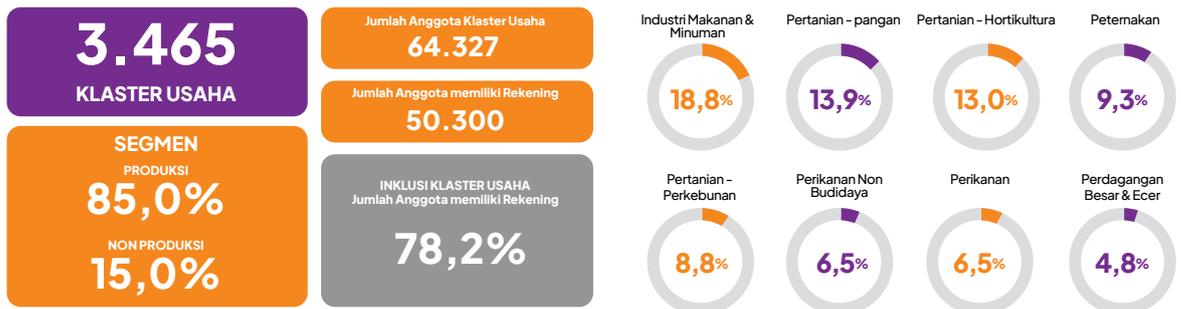
Klaster Usaha merupakan kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan, diantaranya adalah:

- Kesamaan kepentingan
- Kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, lokasi) dan/atau keakraban

Program Klaster Usaha memiliki beberapa kriteria, diantaranya adalah:

- Jumlah pelaku usaha minimal 15 orang
- Kesamaan wilayah antar pelaku usaha yaitu RT, RW, dan desa
- Memiliki usaha atau komoditas sejenis

Berikut adalah data kinerja dari Klaster Usaha:

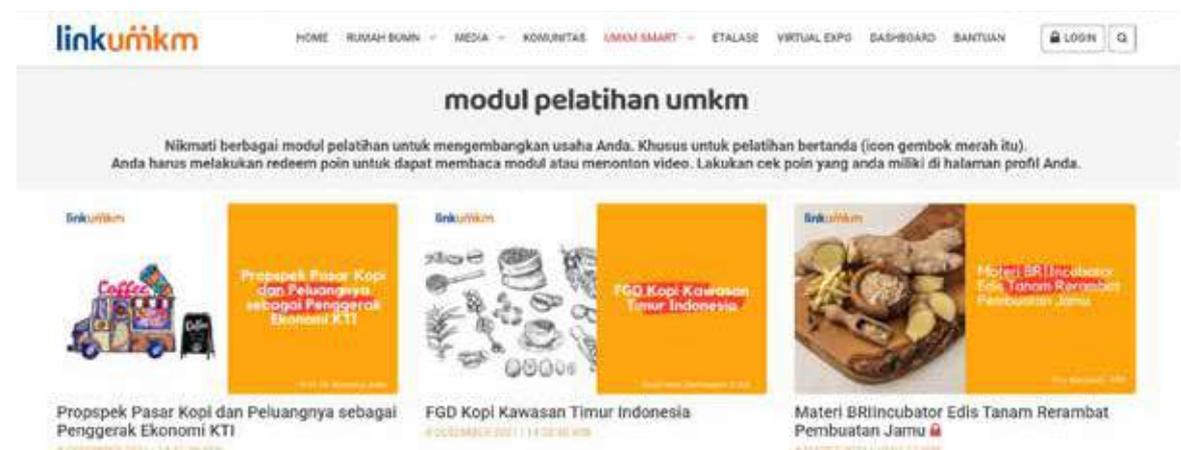


1.2 linku^{umkm} – SUPER APPS PEMBERDAYAAN UMKM TERPADU

Merupakan *platform online* yang dapat diakses melalui *website* & aplikasi, bertujuan membawa UMKM Indonesia naik kelas melalui rangkaian program pemberdayaan terpadu. Menu UMKM Smart pada aplikasi **linku^{umkm}** memiliki manfaat untuk UMKM mengetahui kategori usaha melalui kegiatan “Assesment UMKM Naik Kelas” & “Program serta modul – modul pelatihan”. UMKM akan melakukan *self-assessment* untuk menentukan kelas atau kategori mereka. Pilihan terdapat pada menu UMKM Smart. Kategori usaha terdiri dari:

1. Tradisional
2. Berkembang
3. Modern

Progress **linku^{umkm}** adalah sebagai berikut:



1.3 UMKM EXPO(RT) BRILiaNPRENEUR 2021

Sebagai wujud apresiasi kepada para pelaku UMKM, BRI kembali menyelenggarakan UMKM EXPO(RT) BRILiaNPRENEUR 2021 dengan tema “Dari Indonesia untuk Dunia”. Sebanyak 500 pelaku UMKM yang terkurasi dari lebih dari 1000 UMKM binaan BRI yang diunggulkan dari seluruh Indonesia, telah mengikuti rangkaian acara yang berlangsung dari tanggal 9 hingga 16 Desember 2021. Jumlah peserta sebanyak itu membuat BRILiaNPRENEUR 2021 menjadi bazar virtual terbesar yang pernah diselenggarakan oleh BRI.



Event yang berawal di tahun 2019 ini bertujuan untuk menampilkan hasil karya produk-produk terbaik Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Indonesia sekaligus mendukung program pemerintah dalam gerakan #BANGGABUATANINDONESIA.

UMKM EXPO(RT) BRILiaNPRENEUR 2021 menampilkan rangkaian program yang menarik dan bermanfaat, seperti 3D Virtual Expo, Business Matching, Coaching Clinics, Yuk Berkreasi, talkshow, bazaar online, dan UMKM Awards.

Rangkaian program tersebut dirancang khusus sebagai upaya mempertemukan UMKM dari seluruh Indonesia dengan para pembeli internasional. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing UMKM agar dapat menembus pasar internasional dan dapat menjadi momentum kebangkitan sektor UMKM sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia

2. Desa BRILiaN [GRI 203-2]

Berawal dari indeks literasi keuangan desa yang hanya sebesar 38%, BRI terpacu untuk melakukan pemberdayaan ekosistem desa. Rendahnya indeks literasi keuangan desa mencerminkan rendahnya pemahaman dan akses masyarakat desa terhadap produk dan jasa perbankan. Desa BRILiaN merupakan program inkubasi dan literasi Desa Binaan BRI melalui optimalisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Program Desa BRILiaN bertujuan sebagai penguasaan ekosistem desa dalam rangka implementasi revitalisasi mantri yaitu pembagian wilayah kerja di mana tiap 1 desa memiliki 1 mantri. Selain itu program ini juga bertujuan untuk mengakuisisi potensi bisnis BUMDes baik sebagai Agen BRILink maupun Agen UMi serta penyaluran literasi & inklusi keuangan kepada perangkat desa & BUMDes. Desa BRILiaN merupakan kombinasi dari 4 aspek ekosistem sebagai berikut: [FS7][FS13]



Selama tahun 2021, BRI telah memberdayakan 1.191 BUMDes yang tersebar di wilayah sebagai berikut:



3. Tabungan Digital BRI dan Penyuluh Digital [FS8]

Kemudahan mengakses layanan perbankan kini semakin dirasakan dengan adanya kemajuan teknologi digital. Dengan memanfaatkan teknologi digital, BRI kini menyediakan layanan pembukaan rekening melalui daring, sehingga calon nasabah tak perlu datang ke kantor cabang BRI.

Rekening yang telah terbentuk dari *digital saving* adalah sebanyak 1.138.507 rekening. Jumlah ini meningkat drastis selama tahun 2021. Rekening *digital saving* terdiri dari BritAma Muda, BritAma Umum, BritAma Bisnis, Simpedes dan Simpedes BISA dengan detail rekening sebagai berikut:

Tipe Produk	Total Rekening
BritAmaX	392.046
BritAma	178.800
BritAma Bisnis	17.400
Simpedes	540.823
Simpedes BISA	9.438
Total	1.138.507

Literasi terkait rekening digital ini disampaikan melalui beberapa media, salah satunya melalui penyuluh digital. Penyuluh digital merupakan program dimana seluruh insan BRILiaN wajib berperan sebagai penyuluh digital.

Para insan BRILiaN diberikan persiapan dan pembekalan melalui sosialisasi. Proses sosialisasi dilakukan kepada RM (Dana, Kredit, Mantri) sebagai *influencer* dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pekerja di unit kerja terkait dengan produk digital BRI dan cara transaksi di *platform* digital dengan mudah dan aman.

Kemudian, pemimpin unit kerja wajib memastikan keterlibatan seluruh pekerja sebagai penyuluh digital dengan menggali dan memahami kebutuhan nasabah. Gerakan penyuluh digital ini merupakan bagian dari *Culture Activation Program (CAP)* sebagai wujud internalisasi yang dapat mendorong aktivitas penyuluh digital. Aktivitas penyuluh digital antara lain:

<p>1 Meningkatkan Jumlah Rekening Baru</p> <p>Melakukan sosialisasi dan edukasi pembukaan rekening simpanan BRI (baik secara digital maupun melalui unit kerja) kepada nasabah & calon nasabah</p> <p>Melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan platform digital (BRImo, BRI Smart Billing, Junio Smart, dll) kepada nasabah.</p>	<p>2 Memperbanyak Jumlah Transaksi Melalui Produk Digital BRI</p> <p>Melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan fitur-fitur di BRImo (<i>transfer</i>, <i>dompet digital</i>, <i>pembayaran BRIVA</i>, dll) kepada nasabah.</p> <p>Melakukan sosialisasi dan edukasi cara belanja di Pasar.id, QR Pedagang, dll kepada nasabah.</p> <p>Melakukan sosialisasi dan edukasi cara transaksi finansial melalui IBBIZ, CMS, dll kepada nasabah.</p>	<p>3 Mengedukasi Cara Bertransaksi yang Aman</p> <p>Cara aman transaksi di ATM, BRImo, dll.</p> <p>Menjaga kerahasiaan PIN dan penggantian PIN secara berkala.</p> <p>Melakukan sosialisasi dan edukasi baik kepada nasabah untuk menjaga kerahasiaan data pribadi seperti nama ibu kandung, PIN, OTP, CVV. Menghindari penggunaan wifi di area publik, dll.</p>
---	--	---

4. Edukasi Remitansi

Saat ini BRI memiliki *Remittance Representative* serta Perusahaan Anak untuk mengoptimalkan potensi transaksi remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara seperti: Malaysia; Singapura; Brunei; Taiwan; Hong-Kong; Korea Selatan; Jepang; UAE; dan Saudi Arabia. Peningkatan kinerja bisnis didukung oleh kolaborasi BRI dengan rekanan yang memiliki *platform* digital serta kolaborasi dengan *Fintech*. Aplikasi tersebut dapat digunakan oleh pekerja migran secara *online* sehingga transaksi remitansi tetap dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. BRI juga bekerja sama dengan Bank Indonesia serta Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taiwan, menyelenggarakan edukasi remitansi kepada PMI untuk memberikan wawasan pentingnya pengiriman tanpa uang tunai (*cashless*) ke Indonesia. Dalam rangka memudahkan pelayanan bagi para PMI, BRI didukung oleh 10.121 gerai dari 100 rekanan BRI di berbagai negara. Melalui kerja sama dengan pihak luar negeri, BRI berharap usaha ini dapat mencapai pertumbuhan penghasilan bisnis remitansi yang berkelanjutan. [FS7]

a. Produk Inklusi Keuangan

Terdapat beberapa produk yang dapat menunjang tercapainya inklusi keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain :

1. Simpedes

Sebagai produk tabungan BRI yang dirancang untuk masyarakat, Tabungan BRI Simpedes telah dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti kartu debit yang dapat digunakan pada beragam jaringan di dalam negeri, dan didukung oleh layanan 24 jam dari internet banking dan mobile banking. Tersedia

			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Menguukuhkan Ketahanan Tata Kelola

juga varian dari Simpedes seperti Simpedes Umum, Simpedes TKI, Simpedes Impian dan Simpedes Usaha. Salah satu tujuan utama dari penyediaan layanan Simpedes dengan fitur lengkap dan jenis yang variatif ini adalah untuk membuka akses seluas-luasnya pada masyarakat, yang pada turunannya dapat mendorong literasi keuangan dan mendukung perekonomian daerah. Hal ini selaras dengan kerangka strategis bisnis mikro BRI, yaitu *Double Bottom Line*, yang menggambarkan bahwa nilai keberhasilan bisnis mikro adalah memberikan dampak finansial dan sosial bagi para pemangku kepentingan. Bisnis Mikro BRI melalui produk Simpedes telah dipasarkan melalui 8.647 Unit BRI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pada daerah terluar, tertinggal, terdepan (3T). [SASB FN-CB-240a.4] [FS6] [FS14] [FS13]

Bentuk inovasi lain dari BRI terhadap Simpedes adalah inisiasi produk Teman Simpedes dengan tujuan utama menjangkau masyarakat yang masih mengalami kesulitan menabung di bank. Teman Simpedes merupakan fasilitas tambahan dari rekening Tabungan BRI Simpedes berupa kantong untuk menyimpan uang sehingga dapat mempermudah masyarakat, khususnya masyarakat mikro, untuk menabung di BRI. Perangkat tersebut selalu terkunci dan hanya bisa dibuka oleh Agen BRILink untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Tabungan BRI Simpedes nasabah. Secara sederhana, nasabah dapat menyimpan Teman Simpedes di rumah sebagai media tabungan seluruh anggota keluarga dan pengingat untuk dapat selalu menabung. [FS13]

Selain itu, BRI melakukan rejuvenasi Simpedes melalui Simpedes 3 fungsi memberikan kesempatan bagi nasabah Simpedes mengakses produk Asuransi Mikro dan Investasi (DPLK) melalui aplikasi BRImo. Penambahan fitur keuangan berupa investasi dan proteksi dapat menjadi pilihan bagi nasabah Simpedes dalam memenuhi kebutuhannya finansialnya. Simpedes 3 Fungsi ini juga memperkenalkan dan mendukung edukasi perencanaan keuangan, di mana nasabah diberikan edukasi untuk merencanakan keuangannya sesuai dengan kebutuhannya secara fleksibel.

Simpedes 3 Fungsi berperan strategis dalam penciptaan *closed financial system* dengan menyediakan fitur dan sistem yang dapat diakses dengan lebih mudah oleh nasabah. Dengan keunggulan dan konsep yang ditawarkan, Simpedes 3 Fungsi juga diarahkan untuk dapat menjangkau nasabah muda sehingga semakin menegaskan bahwa Simpedes adalah produk tabungan yang multisegmen dalam berbagai usia, dengan fitur yang semakin lengkap.

Kondisi pandemi telah menyebabkan gerak UMKM semakin terbatas. Namun melalui inovasi, Simpedes tetap meneguhkan perannya dalam membantu usaha UMKM melalui kampanye yang berkelanjutan, seperti Talkshow UMKM, PRS Virtual, serta pelatihan UMKM. Seluruh kegiatan tersebut menunjukkan bahwa BRI tetap hadir mendampingi dan mendukung penuh keberlanjutan usaha UMKM. [FS15]

Tabel Rekapitulasi Kinerja Tabungan BRI Simpedes [FS7] [FS14]

Keterangan	2019	2020	2021
Total Nasabah	64.562.181	79.691.338	89.677.936
Jumlah Simpanan (Rp Miliar)	224.143	260.726	282.828

2. Junio Smart

Aplikasi Junio Smart berperan sebagai ekosistem penghubung antara siswa, orang tua, dengan sekolah di tengah kegiatan belajar mengajar yang kini dilaksanakan secara daring akibat kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*). Aplikasi ini menjadi salah satu solusi bagi penyesuaian manajemen pengelolaan sekolah di masa pandemi. Selain itu, kehadiran Junio Smart tentu akan menghemat banyak penggunaan kertas dan plastik, yang umumnya digunakan untuk lembar absensi, informasi sekolah, kegiatan administrasi sekolah, dan lainnya. Sistem pembayaran dan administrasi dari Junio Smart ini menggunakan BRIVA/BRI Virtual Account, sehingga pengguna mendapat kemudahan berupa opsi bertransaksi tanpa harus berpindah tempat. Hingga akhir tahun 2021, ada 2.520 sekolah dengan lebih dari 234.061 pengguna yang telah menjalin kerjasama dengan BRI terkait aplikasi Junio Smart. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020 dimana sebelumnya hanya terdapat 1.511 sekolah dan sekitar 139.000 pengguna. [FS7]

Adapun fitur-fitur Junio Smart sebagai sistem pengelolaan manajemen sekolah meliputi :

1. Kalender akademik
2. Manajemen data guru, siswa, dan orang tua
3. Fitur tagihan uang sekolah
4. Fitur tugas online
5. Fitur silabus
6. Fitur absensi dan informasi; dan
7. Fitur ujian daring

3. Simpanan Pelajar (SimPel)

BRI bersinergi dengan sekolah menghadirkan layanan Agen BRILink, melalui program “Menabung Ya SimPel Aja”. Dengan program ini, pelajar cukup membawa buku tabungan mereka ke sekolah dan langsung bisa transaksi di Agen BRILink. Tabungan ini membebaskan biaya admin dan biaya tambahan lainnya. Layanan ini menjadi salah satu perwujudan komitmen BRI menggandeng pelajar dalam mewujudkan kegiatan literasi dan inklusi keuangan

Proporsi Kepemilikan Rekening SimPel Tahun 2021 [SASB FN-CB-240a.3] [FS7]

Total Rekening Nasabah BRI	Rekening SimPel	
	Total Rekening	Persentase terhadap total rekening BRI
142.881.089	22.904.285	16,03%

4. Teras BRI

Teras BRI melayani sektor mikro baik melalui informasi maupun jasa perbankan. Selama tahun 2021, jumlah layanan Teras BRI sebesar 1.697, termasuk 132 Teras BRI Keliling dan 4 Teras Kapal. [SASB FN-CB-240a.4]

			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Menguukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Tabel Distribusi Teras BRI [SASB FN-CB-240a.4] [FS13][FS14]

Wilayah	2020			2021		
	Teras BRI	Teras BRI Keliling	Teras Kapal	Teras BRI	Teras BRI Keliling	Teras Kapal
Banda Aceh	2	0	0	-	-	-
Bandar Lampung	57	0	0	57	-	-
Bandung	216	26	0	175	26	-
Banjarmasin	117	7	0	112	7	-
Denpasar	150	4	1	150	4	1
Jakarta	224	21	1	203	21	1
Jayapura	27	1	0	27	1	-
Kantor Cabang Khusus	0	0	0	-	-	-
Makassar	127	0	0	124	-	-
Malang	205	5	0	195	5	-
Manado	51	43	1	48	43	1
Medan	97	15	0	90	15	-
Padang	54	0	0	49	-	-
Palembang	79	0	0	53	-	-
Pekanbaru	100	1	1	96	1	1
Semarang	97	0	0	88	-	-
Surabaya	120	8	0	101	8	-
Yogyakarta	144	1	0	129	1	-
Jumlah	1.867	132	4	1.697	132	4

Teras BRI Kapal bertujuan membantu peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di pulau-pulau yang belum terjangkau layanan perbankan. BRI memiliki teras kapal yang bernama Teras BRI Kapal Bahtera Seva. Kapal tersebut dilengkapi fasilitas layanan perbankan digital berbasis satelit (BRISat) yang beroperasi di laut. Sampai dengan akhir tahun 2021, BRI telah mengoperasikan empat unit Teras BRI Kapal. Berikut adalah kinerja Teras BRI Kapal selama tahun 2021: [FS7] [FS13] [FS14]

Tabel Kinerja Teras BRI Kapal Tahun 2021 [FS7]

Wilayah	2019				2020				2021			
	Total Simpanan		Total Kredit		Total Simpanan		Total Kredit		Total Simpanan		Total Kredit	
	Rekening	Saldo (Rp Miliar)	Debitur	Rp Miliar	Rekening	Saldo (Rp Miliar)	Debitur	Rp Miliar	Rekening	Saldo (Rp Miliar)	Debitur	Rp Miliar
Seva I (Wilayah Kepulauan Seribu)	5.394	12,55	862	14,95	3.018	11,04	636	12,73	7.478	16,97	708	16,63
Seva II (Wilayah Kepulauan NTT-Labuan Bajo)	837	5,02	667	12,79	840	4,74	265	9,83	3.174	13,60	798	15,49
Seva III (Wilayah Kepulauan Anambas)	9.981	23,78	782	15,21	5.911	13,99	544	16,64	5.912	11,20	281	6,93
Seva IV (Wilayah Kepulauan Halmahera Selatan)	-	-	-	-	2.208	12,62	318	4,33	37.808	40,35	1.075	23,57

5. Web Pasar.ID [GRI 203-2]

BRI berkomitmen menggerakkan ekonomi pasar tradisional dan mendukung keberlanjutan usaha para pedagang pasar. Salah satu wujud dukungan tersebut adalah pengembangan situs web pasar.id yang memfasilitasi kegiatan belanja daring bagi pengelola, pedagang, dan pengunjung pasar tradisional. Pengunjung dapat berinteraksi dengan pedagang melalui pengelola tanpa harus hadir secara fisik di pasar. Situs web ini dapat dioperasikan langsung oleh pengelola pasar sehingga situs bisa dipersonalisasi sedemikian rupa untuk meningkatkan rasa kepemilikan di antara pengelola dan pedagang pasar. Dalam pelaksanaannya, BRI mendukung sistem web situs pasar.id untuk mempermudah pengelolaannya.

Proses interaksi antara pedagang/pengelola dengan pembeli hingga terjadi kesepakatan dilakukan melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Kemudian, proses pembayaran dapat menggunakan fitur transfer sesama BRI yang dilakukan melalui *e-channel* seperti EDC BRI, BRImo, dan Agen BRILink milik pedagang melalui rekening pengelola pasar. Selama 2021 jumlah transaksi melalui situs ini mencapai Rp 20,3 miliar dengan jumlah transaksi sebanyak 178.448 transaksi. Jumlah pedagang pasar tradisional yang telah bergabung mencapai 189.611 pedagang. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan 2020, di mana pada 2020 jumlah transaksi mencapai Rp 52 miliar dengan jumlah transaksi sebanyak 936.218. Penurunan ini disebabkan oleh mulai bangkitnya kondisi pasar yang mendorong operasional pasar kembali berjalan secara *offline*. [FS6] [FS13] [FS14]

Tujuan dibentuknya situs web ini dikenal dengan 3 M yakni: [FS13] [FS14]

- Menghubungkan, penjual/pedagang pasar dan pembeli melalui ruang virtual dalam rangka mematuhi penerapan pembatasan fisik;
- Memperbaiki, omset pedagang pasar yang tergerus akibat pandemi Covid-19;
- Memberikan, peluang pekerjaan baru bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi Covid-19

Value Proposition – Nilai Sosial Web Pasar

- Digitalisasi bisnis pasar tradisional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar sebagai upaya meningkatkan omset pedagang pasar.
- Membuka peluang kerja baru untuk ojek sekitar pasar menjadi kurir pasar
- Sekolah Pasar meningkatkan kapabilitas pedagang dan pengelola pasar dalam manajemen bisnis yang lebih baik.
- *Digital Assistance*, pendampingan terhadap pengelola dan pedagang pasar dalam era *new normal* dan mendukung gerakan *cashless society*.

6. Transaksi Non Tunai dan E-Banking

BRI terus berupaya mengedukasi penggunaan transaksi nontunai kepada masyarakat melalui pengembangan fitur *e-banking* yang sejalan dengan tujuan BRI untuk menjadi entitas terdepan dalam perbankan digital. Selama tahun 2021 terdapat beberapa fitur *e-banking* yang telah dikembangkan oleh BRI lewat media *e-channel*, di antaranya Super Apps BRImo, *e-Pay* BRI, IBBI, Internet Banking BRI, Mobile Banking BRI, BRIZZI, dan lain-lain. Dari total nasabah yang ada, sebanyak 21,31 % nasabah telah menggunakan layanan *mobile banking* dan 25,33 % nasabah menggunakan layanan internet banking dan BRImo dalam jaringan *e-channel*, dengan menggunakan *smartphone* yang terhubung dengan

			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Menguukuhkan Ketahanan Tata Kelola

internet. Jumlah tersebut mencapai 23,99 % dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272.229.372 juta orang per Desember 2021.

BRI berupaya untuk meningkatkan nasabah sebagai pengguna layanan *e-banking*. Berikut merupakan proporsi nasabah BRI yang menggunakan *e-banking*:

Proporsi Nasabah BRI Pengguna Layanan Bergerak (E-banking) Tahun 2021

Jenis E-Banking	2019		2020		2021	
	Jumlah Pengguna	Persentase	Jumlah Pengguna	Persentase	Jumlah Pengguna	Persentase
SMS Banking	26.039.313	42%	29.034.006	39%	29.839.226	34%
Internet Banking + BRImo	19.093.787	31%	25.923.290	35%	35.457.255	41%
BRIZZI	16.790.300	27%	19.342.026	26%	21.690.465	25%
Total	61.923.400	100%	74.299.322	100%	86.986.946	100%

Selama tahun 2021, jumlah transaksi dan volume transaksi melalui layanan *e-banking* terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah penjabaran dari jumlah transaksinya:

Jumlah Transaksi Layanan Bergerak (<i>e-banking</i>) (Dalam Ribuan)			
Jenis Layanan	2019	2020	2021
SMS Banking	370.492	384.513	324.591
Internet Banking + BRImo	1.169.416	2.715.355	3.197.698
BRIZZI	932.858	426.012	244.766
ATM BRI	3.723.537	3.745.595	4.238.503
EDC BRI	2.147.451	2.867.279	3.407.167
BRIMOLA 2021	10.497	3.735	7.888
Volume Transaksi Layanan Bergerak (<i>e-banking</i>) (Rp Milliar)			
SMS Banking	167.209	195.500	817.420
Internet Banking	957.653	1.445.902	3.170.341
BRIZZI	12.611	8.829	6.818
ATM BRI	2.848.560	2.930.930	3.531.318
EDC BRI	1.925.415	2.134.672	2.798.805
BRIMOLA 2021	11.029	4.747	11.115

BRI Sebagai *Agent of Development*

BRI sudah berkomitmen untuk menyukseskan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BRI aktif dan berkomitmen mendukung inklusi dan literasi keuangan untuk mengurangi keterbatasan masyarakat akan akses perbankan dan keuangan sehingga ekonomi kerakyatan dapat semakin maju. Salah satu layanan yang mendukung inklusi dan literasi keuangan adalah Agen BRILink. [FS13][FS14][FS16]

Agen BRILink merupakan bentuk perluasan layanan di mana BRI menjalin kerja sama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time*. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki akses ke layanan keuangan akan secara langsung

berpengaruh terhadap peningkatan jumlah transaksi nasabah. Nasabah juga dapat melakukan setoran simpanan dan pinjamannya tanpa perlu mendatangi unit kerja BRI. Agen BRILink telah berhasil meningkatkan *velocity of money* dan menjalankan peran *economic sharing* bagi masyarakat luas.

Pencapaian ini tidak terlepas dari masifnya dukungan dan pengembangan teknologi informasi yang dilakukan oleh BRI. Kondisi ini tak hanya meningkatkan layanan BRI tapi juga pelaksanaan literasi dan inklusi keuangan, termasuk di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Jumlah Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia sebesar 503.151, terdiri dari 127.352 Agen BRILink EDC, 375.799 Agen BRILink Mobile. Selain itu, sebanyak 49.835 Agen BRILink atau 9,90 % berada di wilayah 3T. [FS13][FS14][FS16]

Tabel Jumlah dan Persentase Sebaran Agen BRILink

Uraian	2019		2020		2021	
	Jumlah Agen	Persentase	Jumlah Agen	Persentase	Jumlah Agen	Persentase
Sumatera	89.536	21,21	108.586	21,53	109.636	21,79
Jawa	228.791	54,20	272.785	54,10	265.656	52,80
Kalimantan	26.754	6,34	34.168	6,78	39.897	7,93
Sulawesi	43.781	10,37	50.387	9,99	53.720	10,68
Bali dan Nusa Tenggara	25.136	5,95	28.736	5,70	23.002	4,58
Maluku dan Maluku Utara	4.642	1,10	5.478	1,09	5.592	1,11
Papua	3.520	0,83	4.093	0,81	5.628	1,12
Jumlah	422.150	100,00	504.233	100,00	503.151	100,00

Sebaran Agen BRILink telah mendekatkan jarak masyarakat dengan BRI sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan, sehingga turut mendukung pencapaian tujuan 8 TPB, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua. Melalui layanan Agen BRILink, masyarakat juga dapat mengakses keikutsertaan perlindungan sosial baik untuk kesehatan maupun ketenagakerjaan, yang menjadi salah satu indikator pencapaian Tujuan 10 TPB. [F.23]



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Menguatkan Ketahanan Tata Kelola

Tabel Pertumbuhan Transaksi Agen BRILink

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah Agen BRILink (Agen)	422.160	504.233	503.151
Jumlah Transaksi (Juta)	521,32	727,61	929,38

Selain itu, BRI juga turut mendistribusikan dana bantuan sosial yang merupakan program pemerintah untuk penyaluran bantuan sosial nontunai dengan menggunakan sistem perbankan. Penyaluran bantuan melalui sistem perbankan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial, mewujudkan prinsip 6T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat

Kualitas, dan Tepat Administrasi), dan mendorong keuangan inklusif.

Terdapat beberapa bantuan sosial yang telah disalurkan oleh BRI yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid, serta program lain dengan target sasaran kepada keluarga prasejahtera.

BRI Menggelar Bazar Klaster Mantriku, UMKM Binaan Dapat Sertifikat Halal

BRI mendorong adanya peningkatan produksi dan kapabilitas UMKM serta fokus meningkatkan daya saing dari produk UMKM tersebut melalui salah satu program sertifikasi halal, yang selaras dengan program sertifikasi halal pemerintah. Program ini ditujukan kepada usaha makanan dan minuman agar dapat memenuhi kriteria halal melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).



Adapun kegiatan dalam program ini yaitu memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam mendaftarkan usahanya ke aplikasi SIHALAL. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM sering mengalami kendala dalam pengisian formulir aplikasi tersebut. Pendampingan dilakukan dari proses melengkapi data yang dibutuhkan oleh aplikasi SIHALAL hingga mereka mendapat sertifikat halal.

Fokus Memberikan Sertifikasi Halal

BRI mendorong adanya peningkatan produksi dan kapabilitas UMKM serta fokus meningkatkan daya saing dari produk UMKM tersebut melalui salah satu program sertifikasi halal, yang selaras dengan program sertifikasi halal pemerintah. Program ini ditujukan kepada usaha makanan dan minuman agar dapat memenuhi kriteria halal melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Adapun kegiatan dalam program ini yaitu memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam mendaftarkan usahanya ke aplikasi SIHALAL. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM sering mengalami kendala dalam pengisian formulir aplikasi tersebut. Pendampingan dilakukan dari proses melengkapi data yang dibutuhkan oleh aplikasi SIHALAL hingga mereka mendapat sertifikat halal.

Testimoni

Pemberdayaan UMKM BRI, Bantu Pengusaha Kripik Suryaningsih Tuai Berkah [GRI 203-2] [FS6]

Suryaningsih adalah salah satu pengusaha UMKM yang mengikuti pelatihan dan pembinaan dari BRI. Berawal dari kegemaran memakan cemilan kripik dan kerupuk, Suryaningsih memberanikan diri dan memutuskan membuka usaha kripik pada tahun 2017. Sejak awal usaha, Suryaningsih dibekali pelatihan dari BRI hingga berhasil meraup omset sebesar Rp100 juta per bulan.



Suryaningsih diberikan kesempatan untuk mengikuti pameran produk ke negara Malaysia dan Singapura karena rajin mengikuti pelatihan dan pembinaan dari BRI terkait UMKM. Dari pameran tersebut, Suryaningsih tertantang untuk mengembangkan kreativitasnya. Pengemasan produk yang semula hanya menggunakan kemasan plastik bening kemudian secara perlahan diperbaiki dengan mempercantik desain dan penambahan logo merek "WOH CHIPS".

Sekarang produknya dapat ditemukan di supermarket besar, yakni AEON Mall, Food Hall, Farmer Market, dan bahkan bioskop.

Berkat bergabung di dalam Rumah BUMN, Suryaningsih dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang cara berjualan secara daring melalui aplikasi serta mempelajari desain dan pengemasan yang baik dan menarik. Selain itu, Rumah BUMN BRI menawarkan program permodalan yang dapat mendukung para UMKM yang terkendala akibat modal



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Menguatkan Ketahanan Tata Kelola

Testimoni

Maknai Hari Pahlawan, Wanita Ini Bagikan Keahlian Jahit Untuk Warga Sekitar [GRI 203-2] [FS4] [FS6]

Christiana Kayat, seorang penjahit wanita dari Maumere, telah menyebarkan ilmu dan keahlian menjahit bagi warga di sekitar daerahnya hingga menebarkan jiwa kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan semangat itu, Christina membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan hidup dan merdeka dari kemiskinan.

Awal mulanya, Christina memberanikan diri untuk bekerja sambil dan menerima pesanan jahitan pribadi saat masih bekerja di salah satu butik. Pada tahun 2000, Christina memberanikan diri untuk mengundurkan diri dari tempat kerjanya dan berjuang membuka usaha sendiri. Christina kemudian mendapatkan pelanggan pertama, yaitu salah satu pekerja BRI yang memesan pakaian jahitannya.

Semakin bertambahnya pesanan jahitan

membuat Christina berpikir untuk mencari tenaga kerja. Namun, keterbatasan dalam mencari tenaga kerja ini membuat Christina bertekad untuk mengajarkan dan membekali ilmu kepada masyarakat sekitar.

BRI memberikan bantuan CSR kepada Christina berupa 16 unit mesin jahit industri senilai Rp 104 juta dari BRI Cabang Maumere. Dengan adanya bantuan dari BRI, Christina semakin bersemangat untuk membantu mengasah keterampilan dan membangun jiwa kewirausahaan masyarakat sekitar demi meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Daya juang dan kegigihan Christiana untuk menebarkan kewirausahaan, meningkatkan ilmu, dan keterampilan serta kesejahteraan warga di daerahnya menjadi bukti konkret semangat membangun negeri. Dia adalah pahlawan bagi masyarakat daerahnya.







LAPORAN
KEBERLANJUTAN
2021

Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Kesetaraan Hak Pekerja



BRI menjunjung tinggi asas kesetaraan dan menerapkan kebijakan antidiskriminasi pada setiap fungsi pengelolaan *human capital*, baik dalam aspek pengembangan karir, remunerasi maupun aspek-aspek lainnya. BRI memahami bahwa mempekerjakan para penyandang disabilitas dapat memberikan dampak positif pada kinerja pekerja, meningkatkan keberagaman pada perusahaan, meningkatkan kualitas layanan pelanggan dari kalangan penyandang disabilitas dan sekaligus meningkatkan produktivitas pekerja untuk bekerja dalam keberagaman. BRI memberikan kesetaraan dalam kesempatan bekerja untuk mengembangkan karir tanpa membedakan pertimbangan jenis kelamin, usia, suku, agama, ras, dan hal-hal yang bersifat diskriminatif. Secara keseluruhan ada 28.986 pekerja yang mendapatkan promosi jabatan pada tahun 2021 atau 33% dari total pekerja BRI. Selama tahun 2019 hingga tahun 2021 BRI tidak pernah menerima pengaduan terkait

adanya praktik-praktik diskriminasi terhadap pekerja dan dalam pekerjaan. Selain itu, tidak terdapat pelanggaran terkait kebebasan berserikat dan perundingan kolektif dalam operasi dan pemasok BRI. [GRI 406-1] [GRI 103-2] [B.3]

BRI juga mendukung adanya pemberdayaan perempuan melalui pemberian wadah atau ruang bagi para pekerja perempuan guna menunjukkan kapabilitas dan perannya dalam dunia kerja. BRI percaya bahwa keikutsertaan aktif pekerja perempuan mampu memberikan dampak positif bagi perusahaan dan perempuan lainnya.

Kesetaraan gender merupakan salah satu komitmen BUMN, yang salah satunya diwujudkan melalui target sebesar 25% posisi kepemimpinan diisi oleh perempuan. BRI telah berhasil mewujudkan hal tersebut dan dianugerahi penghargaan The



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Menguatkan Ketahanan Tata Kelola

UN Women 2021 Indonesia WEPs (Women's Empowerment Principles) Awards.

Girl Takes Over merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN bersamaan dengan divisi terkait untuk memberikan kesempatan pada generasi muda perempuan Indonesia dengan rentang usia 18–23 tahun untuk mendapatkan pengalaman 1 hari bertugas menjadi Direktur Utama BRI. Program ini selain memberikan kesempatan baru pada generasi muda perempuan terpilih dan turut mendukung kepemimpinan perempuan pada korporasinya khususnya perusahaan BUMN.

BRI memperhatikan batas usia minimal pekerja untuk memastikan bahwa tidak terdapat risiko terjadinya pekerja anak di bawah umur, pekerja muda yang terpapar pekerjaan berbahaya, maupun pekerja paksa pada tim operasional atau rekanan penyuplai BRI. [GRI 406–1], [GRI 408–1], [GRI 409–1] [B.3]

BRI berkomitmen untuk menjaga keberagaman dan kesempatan yang sama bagi para pekerja. Keberagaman yang diberikan oleh BRI tidak hanya dalam menciptakan budaya yang mendukung wanita di tempat kerja, namun juga mendukung pekerja dengan pengalaman, kelompok umur, kemampuan, pemikiran dan perspektif yang juga beragam. [F.18]

BRI menyadari adanya risiko pelanggaran hak pekerja seperti diskriminasi, pekerja anak di bawah umur, dan pekerja paksa. Pada tahun 2019 hingga tahun 2021, tidak terdapat laporan terkait kejadian diskriminasi di dalam organisasi BRI dan tidak terdapat risiko terjadinya pekerja anak di bawah umur maupun risiko pekerja muda yang terpapar pekerjaan berbahaya atau pekerja paksa pada tim operasional atau rekanan

penyuplai BRI. [GRI 406–1] [GRI 408–1] [GRI 409–1] [C.3]

Salah satu bentuk nyata kebijakan antidiskriminasi yang dimiliki oleh BRI adalah adanya jaminan atas pemberian upah pekerja yang tidak berdasarkan pada perbedaan gender. Pertimbangan perusahaan dalam pemberian gaji dan remunerasi sepenuhnya memperhitungkan klasifikasi jabatan, masa kerja, beban kerja, dan prestasi kerja. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi pekerja perempuan agar dapat berprestasi tanpa khawatir terhadap berbagai potensi diskriminasi gender. [GRI 405–2]

BRI berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Semua ketentuan tentang pekerja di BRI telah mengikuti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan salah satu wadah tertulis dalam penerapan hak asasi manusia yang dikaji dan diperbarui secara berkala setiap tiga tahun sekali untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban dari perusahaan, serikat pekerja, dan pekerja; mempertahankan dan meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara perusahaan, serikat pekerja, dan pekerja; dan menerapkan asas-asas hubungan industrial. [GRI 103–2]

Sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam SK Direksi No.B.4e-PKO/KKO/01/2016 Tanggal 20 Januari 2016, BRI selalu menjunjung tinggi asas kesetaraan dan menerapkan kebijakan anti-diskriminasi pada setiap fungsi pengelolaan *human capital*. BRI menerapkan asas kesetaraan dan memberikan kesempatan yang sama bagi pekerja penyandang disabilitas, dengan posisi dan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan tingkat keahlian dan keterampilan masing-masing. [GRI 103–2] [FS4]

Selama tahun 2019 hingga 2021, berikut adalah jumlah pekerja disabilitas yang bekerja di BRI:

Tabel Jumlah Pekerja Disabilitas



Unit Kerja	2019		2020		2021	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
Kantor Pusat	15	12	16	10	15	12
Kantor Wilayah	18	21	21	20	20	17
Total	66		67		66	

BRI mewujudkan kesempatan yang setara dengan memberikan gaji tanpa melihat gender pegawai sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata gaji pegawai laki-laki dan perempuan. Berikut merupakan tabel rata-rata gaji pekerja berdasarkan jabatan:

Tabel Rata-rata Gaji Pekerja Berdasarkan Jabatan



Jabatan	Rata-rata Gaji (Rp)		Rata-rata Gaji (Rp)	
	2020		2021	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita
SEVP	67.607.000	76.066.331	76.995.000	-
EVP	46.694.760	46.188.068	50.009.988	53.796.495
SVP/VP	29.460.635	27.415.433	29.663.910	27.953.409
SM/AVP	17.356.572	17.764.386	17.437.864	18.224.970
Manager	10.891.702	11.002.442	11.215.320	11.206.513
Assistant Manager	9.536.170	8.755.449	9.968.904	9.261.292
Officer	6.918.663	7.129.785	6.898.740	7.174.280
Assistant	3.217.660	2.960.546	3.429.605	3.129.917

Peningkatan penerimaan pekerja wanita pada tahun 2021 sebesar 2.912. Sedangkan pada tahun 2020 peningkatan penerimaan pekerja wanita sebesar 3.090 orang dan pada tahun 2019 sebesar 6.560 orang. Berikut adalah data penerimaan pekerja baru berdasarkan jalur penerimaan dan gender: [\[GRI 401-1\]](#)



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Mengukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Tabel Jalur Penerimaan Pekerja Baru Berdasarkan Jalur Penerimaan dan Gender [GRI 401-1]

Jalur Penerimaan	2019			2020			2021		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Jumlah BFLP*	132	88	220	138	93	231	112	92	204
Jumlah Tenaga Pemasaran, Administrasi dan Frontliner	2.868	3.455	6.323	2.907	2.960	5.867	507	786	1.293
Lain-lain	1	0	1	0	0	0	1.714	2.002	3.716
Total Lulusan Baru	-	6.544	-	3.045	3.053	6.098	2.333	2.880	5.213
Total Berpengalaman	-	16	-	12	37	49	98	32	130
Total Keseluruhan	-	6.560	-	3.057	3.090	6.147	2.431	2.912	5.343

*BFLP : BRILiaN Future Leader Program

BRI melakukan penerimaan pekerja dari seluruh wilayah di Indonesia dengan detail sebagai berikut: [GRI 401-1]

Tabel Lokasi Penerimaan Pekerja Baru Berdasarkan Wilayah [GRI 401-1]

Wilayah	2019			2020			2021		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Jakarta	519	721	1.240	699	716	1.415	563	520	1.083
Sumatera	558	811	1.369	545	584	1.129	588	420	1.008
Jawa Barat	348	338	686	300	231	531	210	229	439
Jawa Tengah dan Yogyakarta	511	283	794	628	294	922	378	494	872
Jawa Timur	357	440	797	308	344	652	340	230	570
Indonesia Timur dan Indonesia	723	951	1.674	655	843	1.498	832	539	1.371
Total	3.016	3.544	6.560	3.135	3.012	6.147	2.911	2.432	5.343

Selama tahun 2019 sampai dengan 2021, komposisi pekerja baru berdasarkan usia didominasi oleh usia 31 sampai dengan 40 tahun, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: [GRI 401-1]

Tabel Komposisi Pekerja Baru Berdasarkan Kelompok Usia [GRI 401-1]

Kelompok Usia	2019			2020			2021		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
<31	2.973	3.519	6.429	2.913	2.774	5.687	2.370	2.883	5.253
31-40	39	25	64	212	234	446	52	27	79
41-50	3	0	3	5	2	7	2	0	2
>50	1	0	1	5	2	7	7	2	9
Total	3.016	3.544	6.560	3.135	3.012	6.147	2.341	2.912	5.343

BRI terus berkomitmen untuk memperhatikan SDM BRI, baik di level manajemen maupun non manajemen. Tabel berikut menunjukkan komposisi pekerja di tingkat manajemen dan non manajemen berdasarkan gender dan kelompok usia:

Tabel Komposisi Manajemen Berdasarkan Gender dan Kelompok Usia [GRI 401-1]

Kelompok Jabatan	2019					
	Gender		Kelompok Usia			
	Pria	Wanita	<30	31-40	41-50	>50
Management						
Senior Executive Vice President	2	2	-	-	-	4
Executive Vice President	96	13	-	1	19	89
Vice President	153	24	-	9	42	126
Assistant Vice Presiden	282	63	-	39	154	152
Senior Manager	604	184	3	416	245	124
Manager	1.159	373	112	948	304	168
Total	2.296	659	115	1.413	764	663
Non-Management						
Assistant Manager	4.080	1.197	1.457	1.323	1.333	1.164
Officer	8.514	4.060	927	5.784	4.003	1.860
Assistant	37.407	33.407	40.049	27.045	2.648	1.072
Total	50.001	38.664	42.433	34.152	7.984	4.096

Kelompok Jabatan	2020					
	Gender		Kelompok Usia			
	Pria	Wanita	<30	31-40	41-50	>50
Management						
Senior Executive Vice President	2	3	-	-	-	5
Executive Vice President	79	12	0	2	24	65
Vice President	145	28	0	11	69	93
Assistant Vice Presiden	300	69	0	65	179	125
Senior Manager	622	193	0	513	207	95
Manager	1.147	363	46	977	293	194
Total	2.295	668	46	1.568	772	577
Non-Management						
Assistant Manager	3.937	1.102	1.005	1.529	1.373	1.132
Officer	8.423	4.063	686	5.746	4.206	1.848
Assistant	26.680	14.340	11.386	25.842	2.751	1.041
Total	39.040	19.505	13.077	33.117	8.330	4.021



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Mengukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Kelompok Jabatan	2021					
	Gender		Kelompok Usia			
	Pria	Wanita	<30	31-40	41-50	>50
Management						
Senior Executive Vice President	3	-	-	2	-	1
Executive Vice President	83	18	-	61	6	34
Vice President	158	32	1	82	14	93
Assistant Vice Presiden	383	119	-	121	143	238
Senior Manager	587	158	1	71	498	175
Manager	1.520	495	68	231	1,387	329
Total	2.734	822	70	568	2,048	870
Non-Management						
Assistant Manager	3.662	1.032	648	1.092	1,520	1,434
Officer	9.127	4.461	890	1.700	6,276	4,722
Assistant	32.831	28.049	23.485	901	33,736	2,758
Total	45.620	33.542	25.023	3.693	41,532	8,914

Dalam proses penerimaan tenaga pemasaran, BRI memegang tujuan untuk menciptakan kesetaraan gender. Berikut komposisi tenaga pemasaran BRI berdasarkan gender, antara lain:

Tabel Komposisi Tenaga Pemasaran Berdasarkan Gender [GRI 401-1]

Tenaga Pemasar	2019		2020		2021	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
RM Mikro (Mantri)	20.752	7.313	19.972	7.279	19.673	7.596
RM Kecil (Kecil + Program + Ritel)	3.425	782	4.459	952	4.512	1.080
RM Menengah	81	8	83	11	91	13
RM Konsumer	370	172	339	176	350	172
RM Dana (Dana + PBO)	959	1.563	891	1.567	893	1.605
Total	25.587	9.838	25.744	9.985	25.519	10.466

*) RM : Relationship Manager

*) Mantri : Marketing dan Analisis Mikro

Kesetaraan gender di BRI terlihat dari komposisi pekerja wanita yang tersebar di seluruh level jabatan sebagai berikut:

Tabel Kesetaraan Gender

Uraian	2019	2020	2021
Komposisi Pekerja Wanita Seluruh Pekerja	42,92%	42,78%	42,77%
Komposisi Pekerja Wanita di level <i>Junior, middle, and top management</i>	22,26%	22,63%	23,14%
Komposisi Pekerja Wanita di Level <i>Junior (first level) Management</i>	24,35%	24,00%	24,57%
Komposisi Pekerja Wanita di Level <i>Top Management</i>	11,93%	16,82%	17,82%
Komposisi Pekerja Wanita di Level <i>Revenue-generating Functions</i>	28,44%	28,29%	30,09%
Komposisi Pekerja Wanita di Level <i>STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)-related</i>	24,07%	22,94%	24,87%

Sesuai strategi remunerasi BRI untuk mendorong *performance driven culture*, BRI memberikan *cash compensation* kepada pekerja yang ditentukan berdasarkan kinerja masing-masing. Dengan demikian, kompensasi yang diterima oleh pekerja akan berbanding lurus dengan kontribusi yang diberikan pekerja kepada perusahaan.

Pada tahun 2021, BRI telah memberikan kenaikan upah kepada pekerja yang ditentukan dengan metode *merit increase*. Selain itu, BRI juga memberikan insentif dan bonus kepada Pekerja untuk mendorong motivasi Pekerja dalam mencapai dan melampaui target yang ditetapkan BRI di tengah kondisi pandemi Covid-19 dan situasi perekonomian global maupun nasional yang menantang.

BRI menerapkan kebijakan pemberian upah minimum pekerja, di mana upah minimum yang diberikan

kepada pekerja sejak bergabung telah berada di atas upah minimum yang berlaku di setiap wilayah perusahaan. Pemberian upah minimum yang layak ini merupakan bentuk komitmen BRI dalam pemenuhan hak-hak pekerja, meskipun memberi dampak pada peningkatan alokasi dana bagi pekerja. Namun demikian, BRI memandang alokasi yang juga diperuntukkan bagi peningkatan kompetensi pekerja yang merupakan investasi yang dapat dipertanggung jawabkan. [\[F.20\]\[FS4\]](#)

Selain itu, pekerja diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh pekerja. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah, untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap pekerja BRI.



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Mengukuhkan Ketahanan Tata Kelola

BRI senantiasa berupaya agar tidak terjadi *gap* remunerasi yang terlalu signifikan. Rasio gaji tertinggi dan terendah selama 2021 adalah sebagai berikut:

Table Rasio Kompensasi Tahun 2021 [GRI102-38] [GRI102-39]

Uraian	Rasio		
	2019	2020	2021
Gaji Pekerja tertinggi dan terendah	31,24	31,13	36,67
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,16	1,18	1,18
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,14	1,11	1,11
Gaji Direksi tertinggi dan Pekerja tertinggi	2,6	2,88	2,24

Uraian	Jumlah (Rp) 2021
Nilai tengah kompensasi tanpa nilai tertinggi 2021	25.206.757
Nilai rata-rata kompensasi tanpa nilai tertinggi 2021	33.348.683
Rasio Persentase kenaikan kompensasi tahunan	75,50%

Rasio persentase kenaikan pada kompensasi total tahunan bagi individu dengan bayaran tertinggi di organisasi terhadap nilai tengah total persentase kenaikan kompensasi tahunan untuk semua pekerja adalah sebesar 75,50%. [GRI102-38] [GRI102-39]

BRI menyadari bahwa remunerasi menjadi salah satu hal terpenting yang menentukan kualitas kehidupan pekerja. Karena itu, perusahaan berkomitmen untuk menerapkan remunerasi yang kompetitif dalam setiap jenjang jabatan, termasuk pada tingkat awal (*entry level*). BRI juga sangat memperhatikan penghargaan bagi pekerja melalui pemberian imbal jasa berupa gaji, tunjangan, insentif, dan *benefit* lainnya. BRI juga berkomitmen untuk memberikan remunerasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berada di atas upah minimum regional. [GRI 202-1] [F.20]

Pelatihan dan Pengembangan Pekerja

Kondisi pandemi melahirkan tantangan baru bagi perusahaan, khususnya dalam membangun strategi pedagogi yang menarik ketika memberikan pelatihan kepada pekerja. Pembatasan sosial di era pandemi mengurangi kesempatan pekerja untuk menjalani proses pendidikan secara tatap muka. Walaupun demikian, BRI terus berkomitmen untuk menyesuaikan diri sehingga program pengembangan kapasitas pekerja tetap dapat berjalan optimal. Salah satunya dengan menyelenggarakan webinar dan membangun sistem pembelajaran daring (*e-learning*). Saat ini berbagai materi pelatihan seperti implementasi *Good Corporate Governance*, pengendalian gratifikasi dan penyusunan, serta pelatihan mengenai prinsip keuangan berkelanjutan sudah mulai diberikan kepada pekerja secara daring. [FS4]

Era pandemi juga mengubah perspektif terhadap waktu dan ruang kerja yang awalnya dimaknai secara kaku. Berbagai pembatasan sosial mendorong kebijakan jam kerja yang fleksibel (*flexible hours*) dan sistem kerja jarak-jauh (*remote working*). Oleh karena itu, BRI mengakselerasi kesiapan pekerja dalam

penerapan program pendidikan dan pengembangan dengan metode pembelajaran jarak-jauh.

Secara tidak langsung kondisi ini memberikan pengalaman yang berharga untuk pengembangan kompetensi pekerja, khususnya dalam hal pengambilan keputusan dalam kondisi yang kritis, serta pemecahan masalah (*problem solving*). Dalam operasional perusahaan sehari-hari, pengetahuan dan keahlian individual para pekerja sangat diperlukan agar perusahaan mampu bersaing di industri perbankan yang sangat kompetitif. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengembangkan pekerja untuk menguasai keahlian-keahlian baru sesuai dengan divisi di mana mereka bekerja sehingga perusahaan mampu bertahan menghadapi perubahan yang terjadi di sektor keuangan. Selama tahun 2021, 100% dari pekerja telah mendapatkan pelatihan dan telah ditinjau terkait performa dan pengembangan karirnya. Pelatihan diberikan kepada pekerja secara internal maupun bekerjasama dengan pihak eksternal. [GRI 404-1], [GRI 404-3] [FS4] [FS15] [F.22]

Jumlah Jam Pendidikan/Pelatihan dan Peserta *In-class* & *E-Learning* [GRI 404-1] [F.22]

Keterangan	2019	2020	2021
Jumlah Peserta	4.054.872	5.274.114	3.809.382**
Jumlah	14.639.065	6.393.448	4.186.683
Jumlah Jam Pendidikan/Pelatihan	116	62*	41

*Penurunan jumlah jam pendidikan disebabkan karena penyesuaian terhadap durasi per modul *e-learning* dari 3 sesi (2019) menjadi 0.5 sesi (2020).
 **Tahun 2021 terjadi penurunan di kepesertaan *e-learning* sedangkan untuk kepesertaan *in class* meningkat jika dibandingkan tahun 2020



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Mengukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Jumlah Jam Pendidikan/Pelatihan Kelompok Jabatan [GRI 404-1][FS4][F.22]

Kelompok Jabatan	2019			2020			2021		
	Jumlah Peserta	Jumlah Total Jam Pelatihan	Rata-rata Jam Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Total Jam Pelatihan	Rata-rata Jam Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Total Jam Pelatihan	Rata-rata Jam Pelatihan
Top Management (VP – SEVP)	1.357	30.664	22,6	1.144	21.913	19,2	574	7.722	13,50
Middle Management (AM- AVP)	22.189	486.926	21,9	24.039	475.094	19,8	22.057	337.846	15,30
Operation (Assistant – Officer)	105.726	2.711.993	25,7	143.243	3394.278	23,7	47.758	589.831	12,40
Average	14.364	358.843	23,4	18.714	432.365	20,9	23.463	311.800	13,70

BRI berupaya meningkatkan kompetensi seluruh pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan pendidikan dan pelatihan, pekerja BRI akan mendapat *enhancement* baik untuk *hard competency* maupun *soft competency* sehingga menjadi sumber daya manusia unggul dan dapat berkompetisi di industri. [FS4]

Sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan pekerja, perusahaan turut memberikan program-program pelatihan sesuai dengan kebutuhan tiap unit kerja, tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan pekerja dalam pekerjaan operasional namun juga

memberi bekal menjelang masa pensiun. BRI berhasil meraih “2021 Best Stellar Workplace in innovative engagement during pandemic category” dan “2021 Stellar Workplace recognition in employee commitment & satisfaction” dari Kontan pada 8 Oktober 2021. [GRI 404-2]

Pelatihan oleh pihak eksternal diutamakan dilakukan oleh vendor yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar pelatihan yang diberikan kepada pekerja dapat lebih berkualitas dan kredibel. Berikut tabel pelatihan standar yang terdaftar di BNSP untuk pekerja bank selama tahun 2021: [FS4][GRI 404-2]

Tabel Jenis dan Ruang Lingkup Pelatihan Yang Diberikan Selama 2021 [GRI 404-2]

No	Jenis Pelatihan	Nam Vendor	Jumlah Peserta
1	Audit Intern Bank	LSP BRI	120
2	Wealth Management	MCI	354
3	Treasury Dealer	LSP BRI	66
4	General Banking	LSP BRI	805
5	Manajemen Risiko	BSMR & LSPF	3119
6	Kepatuhan	LSP BRI	402
7	Credit	LSP BRI	1340
8	Human Capital	LSP BRI	-*)
9	IT	LSP BRI	15
10	Funding & Service	LSP BRI	70

* Sedang dalam proses pengajuan ulang skema ke BNSP karena ada perubahan SKKNI.

Selain itu, BRI menyadari bahwa pelatihan tentang *Anti-Money Laundering* (AML) juga sangat penting bagi pekerja guna meningkatkan rasa tanggung jawab dalam menangani setiap transaksi nasabah. Berikut merupakan pelatihan AML yang telah dilaksanakan selama tahun 2021: [\[GRI 205-2\]](#)

No	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Pembicara	Peserta	Materi
1	14 April 2021	1.016	OJK	1. Divisi Kantor Pusat 2. RRM 3. RMC 4. BRC 5. URC	Pembukaan Rekening Bank Secara Digital (Ketentuan, Risiko dan Mitigasinya)
2	28 April 2021	1.009	PPATK	1. Frontliner 2. FO 3. AO 4. Mantri 5. BR 6. UR 7. Sales Person	Data Nasabah Berkualitas Cegah TPPU dan TPPT
3	3 Juni 2021	1.225	KPK	1. Pekerja Divisi Kantor Pusat 2. Pemimpin Cabang 3. BRC 4. Compliance Staff 5. RM 6. Perusahaan Anak	Cegah Gratifikasi untuk BRI yang Berintegrasi
4	23 Juni 2021	1.225	DJP	1. Divisi ORD 2. Divisi FMA 3. Divisi WMG 4. Divisi WCRA 5. Divisi CBO 6. Divisi CBT 7. Legal Kanwil 8. RMC 9. MO 10. AMO	Tindak Pidana Perpajakan Kenali Modusnya, Memaksimalkan Income Negara
5	4 Agustus 2021	961	POLRI	Seluruh Pekerja Divisi Kantor Pusat	Tuntaskan <i>Cybercrime</i> , Transaksi Aman, Hatipun Tenang
6	24 Agustus 2021	990	KPK	1. VPRRM 2. Kepala Bagian dan Staff RMC 3. BRC 4. URC 5. Pinca 6. AIW 7. Kepala Bagian Logistik Kanwil 8. SPO KC	<i>Awareness</i> Terhadap Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Perbankan
7	28 November 2021	1	-	Kepala Bagian Compliance Division	<i>Certified Anti Money Laundering Specialist</i>
8	Agustus 2021	6	-	1. Kadiv Compliance Division. 2. Kepala Bagian RMC	Sertifikasi Kepatuhan dan AML level 1



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Menguatkan Ketahanan Tata Kelola



BRI selalu membuka peluang kepada pekerja untuk meningkatkan pengetahuan dan keahliannya sehingga dapat menunjang karir masing-masing pekerja melalui berbagai pilihan pendidikan dan pelatihan. Program pengembangan karir juga dilaksanakan berdasarkan prinsip *fair opportunity*, di mana setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dengan tetap memperhatikan faktor kebutuhan perusahaan, keluarga jabatan yang dituju, kemampuan pekerja (*capability*), predikat kinerja, *talent classification*, dan ketersediaan jabatan.

Selain itu, BRI Corporate University dan Campus BRI Corporate University seluruh Indonesia juga telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menjadi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Perusahaan. Dengan demikian, seluruh pendidikan dan pelatihan pekerja BRI akan terdata di Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu, BRI Corporate University juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan 'Sertifikat Pelatihan' bagi para peserta. [FS4]

Secara khusus BRI membentuk BRILiaN Development Center untuk mengawal penyiapan sistem dan

digitalisasi proses bagi insan BRILiaN, sehingga dapat berkembang secara maksimal dan optimal serta menjadi *Great Talent & Great Leader*. Diawali dengan melakukan seleksi kandidat terbaik putra-putri terbaik Indonesia, BRI memiliki *Talent Attraction* yang diterapkan melalui berbagai program atraktif seperti:

1. BRILiaN *Scholarship Program* (BSP) merupakan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1 yang memiliki kriteria tertentu dalam rangka rekrutmen pekerja BRI;
2. BRILiaN *Creativity Contest Program* (BCCP) merupakan kompetisi bagi para peserta eksternal dan internal BRI untuk menuangkan ide inovasi besar, baik dalam bentuk kolaborasi tim maupun individu, yang dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan bangsa secara umum dan BRI pada khususnya;
3. BRILiaN *Get Talent Program* (BGTP) merupakan program pencarian kandidat yang memiliki prestasi unggul berdasarkan rekomendasi pejabat yang berwenang;
4. BRILiaN *Internship Program* (BIP) merupakan program magang yang dibuka oleh BRI sebagai

wujud menyukseskan program pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk mendapatkan pengalaman kerja fungsi administrasi dan ujung tombak (*frontliner*);

5. BRILiaN *Excellent Internship Program* (BEIP) merupakan program perekrutan yang dibuka oleh BRI guna menjaring kandidat-kandidat yang saat ini sedang menempuh semester 8 atau lulusan baru (*fresh graduate*) dari Perguruan Tinggi Negeri terbaik sehingga memiliki bekal pengalaman kerja yang cukup untuk menjadi calon pemimpin di masa depan.

Talenta terbaik di atas dapat bergabung melalui rekrutmen multijalur, yaitu:

1. BRILiaN *Future Leader Program* (BFLP) merupakan program perekrutan sekaligus pendidikan untuk menjaring kandidat-kandidat potensial dari eksternal serta memberikan pendidikan sebagai bekal untuk menjadi pemimpin-pemimpin BRI di masa depan;
2. BRILiaN *Next Leader Program* (BNLP) merupakan program perekrutan sekaligus pendidikan untuk menjaring kandidat potensial serta memberikan pendidikan sebagai bekal untuk menjadi pemimpin-pemimpin BRI di masa depan.
3. BRILiaN *Banking Officer Program* (BBOP) merupakan program perekrutan sekaligus pendidikan untuk mempersiapkan pekerja baru di tingkat Corporate Title Assistant agar dapat menunjukkan performa maksimal sesuai dengan standar operasional dan nilai-nilai yang berlaku di BRI.

Dalam rangka mempersiapkan talent specialist, BRI harus terus mempersiapkan program untuk peningkatan kompetensi pekerja. BRI selalu berusaha mengembangkan kompetensi pekerja yang baik yang bersifat teknis/fungsional (*hard competency*) maupun manajerial (*soft competency*). Selain mengacu pada konsep pengembangan “*three prongs*”, seluruh program *Systematic Development Program* juga mengacu pada *Set of Competencies* yang telah

disusun oleh Divisi *Human Capital Development*, yang terdiri dari:

1. Kamus Kompetensi (SK Direksi BRI No.S.303–DIR/HCD/04/2020 Tanggal 27 April 2020): suatu dokumen mengenai seperangkat kompetensi yang memuat nama, definisi, dan indikator perilaku untuk setiap kompetensi yang disyaratkan perusahaan.
2. Keluarga Jabatan dan Fungsi Jabatan (SK Direksi BRI No. S.398–DIR/HCD/06/2020 Tanggal 17 Juni 2020):
 - a. Keluarga Jabatan: Kelompok jabatan yang melakukan proses bisnis atau aktivitas pekerjaan pada bidang pekerjaan yang sama sehingga mensyaratkan seperangkat kompetensi manajerial tertentu.
 - b. Fungsi Jabatan: Kelompok jabatan yang melakukan serangkaian proses bisnis atau aktivitas pekerjaan pada subbidang pekerjaan yang sama, mensyaratkan seperangkat pengetahuan dan kompetensi teknis/fungsional yang sejenis di sub bidang keilmuan tertentu, dan seperangkat kompetensi manajerial tertentu, di mana kesamaan kompetensi manajerial masih merujuk pada karakteristik aktivitas/proses bisnis pada bidang pekerjaan yang sama.
3. Profil Kompetensi Jabatan (SK Direksi BRI No. 489–DIR/HCD/07/2020 Tanggal 20 Juli 2020): sekumpulan kompetensi manajerial yang disyaratkan oleh suatu jabatan.
4. Persyaratan Pengetahuan dan Keterampilan Jabatan (SK Direksi No.582–DIR/HCD/09/2020 Tanggal 01 September 2020): pengetahuan dan keterampilan minimal yang ditetapkan untuk setiap jabatan, agar pemegang jabatan dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

Selain fokus pada program pengembangan, BRI juga melakukan penilaian kepada seluruh pekerja, untuk menggali dan mengukur kompetensi pekerja serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan persyaratan kompetensi pada jabatannya saat ini dan yang akan



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Menguukuhkan Ketahanan Tata Kelola

dituju. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa penilaian dan program pengembangan pekerja BRI adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, sehingga pekerja akan diberikan serangkaian program pengembangan setelah proses penilaian kompetensi pekerja selesai. [FS4]

Serangkaian *Systematic Development Program* disiapkan BRI sehingga insan BRILiaN dapat merancang karirnya sendiri melalui BRILiaN *Development Plan* (BDP), yaitu rencana individu insan BRILiaN untuk mencapai tujuan karir mereka dengan mempersiapkan pengembangan pribadi untuk meningkatkan kinerja individu dan perusahaan. [FS4]

Dengan adanya BRILiaN *Development Plan* (BDP) yang didukung melalui aplikasi BRILiance, insan BRILiaN

dapat menyampaikan aspirasi bagi pengembangan karir dan kompetensinya, berdiskusi dengan pelatih, dan memanfaatkan *Learning Wallet* untuk memilih program pengembangan dan pelatihan agar lebih kompeten pada posisi saat ini dan persiapan target posisi berikutnya. Semuanya dievaluasi secara berkesinambungan selama insan BRILiaN berada di BRI. [GRI103-3]

Melalui kegiatan *Professional Coach Certification Program* yang diselenggarakan oleh Divisi Human Capital Development bekerja sama dengan BRI Corporate University, terdapat 255 kandidat professional coach, 200 orang diantaranya telah selesai mengikuti sertifikasi, dan 55 orang masih dalam proses sertifikasi.

Pembelajaran Keuangan Berkelanjutan Secara Daring [GRI 404-2]

BRI menyadari bahwa implementasi keuangan berkelanjutan perlu mendapat dukungan dari seluruh pekerja. Guna menumbuhkan pengetahuan pekerja, BRI mengintegrasikan konsep Keuangan Berkelanjutan sebagai materi kurikulum pembelajaran daring (*e-learning*). Pekerja dapat secara mudah mengakses pembelajaran daring ini melalui BRISMART. Bahan ajar ini berisikan tentang Overview Keuangan Berkelanjutan.

Sepanjang 2021, sebanyak 63.101 pekerja telah mengakses pembelajaran daring tentang Keuangan Berkelanjutan dengan tingkat kelulusan sebesar 98,9%.



Pelatihan Social Return on Investment [GRI 404-2]

BRI melalui divisi *Corporate Social Responsibility* dan *Community Development* telah mengadakan beberapa pelatihan terkait *Social Return on Investment* (SROI). SROI adalah sebuah pendekatan untuk memahami dan mengelola dampak atas nilai sosial (*social value*), ekonomi, dan lingkungan yang diciptakan dari suatu kegiatan. SROI menyajikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dialami oleh para pemangku kepentingan sebagai akibat dari pelaksanaan sebuah program serta membandingkan nilai dampak terhadap investasi yang dikeluarkan.

Selama 2021, telah terdapat 3 pelatihan terkait SROI dan pelatihan terakhir diadakan pada 17-19 Desember 2021 secara luring (*offline*). Pelatihan ini dihadiri oleh 10 peserta dengan persentase 50% pria dan 50% wanita.





Perputaran Pekerja

Salah satu tujuan perekrutan pekerja baru adalah untuk menggantikan pekerja yang meninggalkan pekerjaannya. Kepuasan pekerja BRI terhadap pengelolaan Human Capital BRI salah satunya diukur dari tingkat turnover. Pada tahun 2021, tingkat turnover sebesar 1,84 % lebih rendah dari tingkat turnover secara industri yang mencapai 6%. Angka turnover tersebut menunjukkan bahwa upaya BRI untuk melakukan *retention* pekerja telah menunjukkan hasil yang positif. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan BRI untuk menjaga tingkat turnover tersebut diantaranya adalah memberikan kompensasi pada tingkat yang kompetitif dibandingkan industri, benefit yang memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja, dan jenjang karir yang memotivasi serta lingkungan kerja yang kondusif.

[GRI 401-1]

Tabel Perputaran Pekerja [GRI 401-1]

Keterangan	2019	2020	2021
Penerimaan Pekerja Baru	6.560	6.147	5.343
Pekerja Berhenti	2.668	2.437	1.576
Jumlah Pekerja Di Akhir Tahun	61.496	61.508	60.985
Rasio Perputaran Pekerja	2,29%	1,73%	1,84%

Tingkat perputaran pekerja juga dapat dilihat berdasarkan wilayah, antara lain:

Tabel Perputaran Pekerja Berdasarkan Wilayah [GRI 401-1]

Keterangan	Penerimaan Pekerja Baru	Jumlah Pekerja Berhenti
Jakarta	1.083	172
Sumatera	1.008	691
Jawa Barat	439	183
Jawa Tengah & Yogyakarta	872	142
Jawa Timur	570	141
Indonesia Timur dan Indonesia Tengah	1.371	247
Total	5.343	1.576

Tingkat perputaran pekerja berdasarkan usia dan jenis kelamin selama tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Tingkat Perputaran Pekerja Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin [GRI 401-1]

Usia	2019		2020		2021	
	Pria	Wanita	Pria	Pria	Pria	Wanita
<30	38,87%	53,28%	10,23%	10,31%	9,27%	9,90%
31-40	45,42%	36,47%	35,35%	34,28%	56,77%	46,27%
41-50	8,14%	5,71%	8,63%	11,67%	19,58%	21,59%
>51	7,56%	4,55%	45,77%	43,72%	14,38%	22,24%
Total	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%

BRI juga menawarkan berbagai skema remunerasi yang diberikan kepada pekerja tetap maupun tidak tetap di seluruh wilayah operasional BRI. Berikut ini adalah berbagai jenis remunerasi yang diberikan kepada pekerja BRI: [GRI 401-2]

Jenis Remunerasi	Nama Program	Pekerja PKWTT	Pekerja PKWT
Asuransi Jiwa	BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan Santunan Duka	YA	Sesuai Isi Perjanjian
Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	YA	Sesuai Isi Perjanjian
Tanggungans Kecacatan dan Ketidakmampuan	BPJS Kesehatan	YA	Sesuai Isi Perjanjian
Cuti Melahirkan	Cuti Melahirkan	YA	Sesuai Isi Perjanjian
Persiapan Pensiun	Masa Persiapan Pensiun	Opsi	Sesuai Isi Perjanjian

BRI melaksanakan survei keterlibatan pegawai secara berkala. Adapun hasil dari survei keterlibatan pekerja adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Survei Keterlibatan Pekerja

Uraian	2019	2020	2021
Keterikatan Pekerja	3,20	3,27	3,46
Cakupan Pekerja	100,00%	100,00%	100,00%



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Mengukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Kebijakan Cuti

Hak cuti dan izin tidak masuk kerja merupakan bagian dari hak pekerja. BRI memberikan cuti kerja, cuti melahirkan, dan izin tidak masuk kerja sesuai dengan pengajuan surat permohonan dari pekerja kepada atasan masing-masing Divisi. Terkait cuti melahirkan, selain *maternity leave*, BRI juga memberikan *paternity leave* yang lebih banyak dibandingkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hak cuti diberikan BRI dengan tetap menanggung hak-hak keuangan pekerja, sesuai butir-butir kesepakatan dalam PKB dan pedoman kepegawaian. Jenis cuti dalam tanggungan yang dapat diajukan oleh pekerja adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti

haid, cuti melahirkan, cuti keguguran, dan cuti tugas khusus. Sedangkan jenis izin tidak masuk kerja yang dapat diberikan BRI atas kondisi tertentu mencakup: pernikahan, menikah anak yang terdaftar pada perusahaan, kelahiran anak dari istri yang terdaftar, khitanan anak yang terdaftar, kematian anggota keluarga langsung, dan sebagainya. Jumlah izin yang diberikan diatur dalam Peraturan Kepegawaian.

Terkait hak untuk mendapatkan cuti melahirkan, BRI memberikan hak kepada pekerja perempuan yang akan melahirkan maupun kepada pekerja laki-laki yang akan menemani proses melahirkan istrinya.

Tabel Data Cuti Melahirkan [GRI 401-3]

Keterangan	2019		2020		2021	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
Jumlah pekerja yang berhak menerima cuti melahirkan	41.501	19.795	41.335	20.173	-	-
Jumlah pekerja yang mengambil cuti melahirkan	3.404	6.071	3.033	5.793	1.509	2.640
Kembali setelah mengambil cuti melahirkan	3.404	6.071	3.033	5.793	1.509	2.640

Note : Pada tahun 2021 terdapat permasalahan sistem rekapitulasi jumlah pekerja yang berhak menerima cuti melahirkan. Proses pemulihan sedang dilakukan sebagai perbaikan untuk pelaporan periode berikutnya. 100% dari pekerja yang mengambil cuti melahirkan kembali bekerja dan dapat dipertahankan oleh Perusahaan [GRI 401-3]

Tabel Tingkat Ketidakhadiran Pekerja [GRI 401-1]

Keterangan	2019	2020	2021
Absenteeism (hari)	1,24%	1,31%	1,51%
Jumlah Hari dalam setahun	248	242	243
Jumlah Total Pekerja	91.620	88.184	82.718

BRI menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sehingga tingkat ketidakhadiran pekerja pada tahun 2021 hanya mencapai 1,51% dari total keseluruhan.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja [F.21]

BRI berkomitmen untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan jiwa bagi setiap pekerja dengan menerapkan Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk meminimalisasi risiko operasional. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) BRI diatur dalam Surat Edaran nomor 110 - DIR/MOP/12/2019. Didalamnya terdapat strategi yang tertuang ke dalam beberapa ketentuan, antara lain:

- a. Kebijakan *Business Continuity Management*;
- b. Panduan *Emergency Response Plan*;
- c. Kebijakan Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja.

BRI selalu memastikan kompetensi dari anggota manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat 6 pekerja BRI yang telah tersertifikasi K3 dan sertifikasi yang masih berlaku selama periode pelaporan adalah sebagai berikut

Uraian	Nama Peserta	Tanggal Berlaku	Tanggal Berakhir
Kemnaker P3K di Tempat Kerja	Fajar I	16-11-20	16-11-25
Kemnaker P3K di Tempat Kerja	Morrays A	16-11-20	16-11-25
Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK)	Gedung BRI 2	09-06-20	09-06-21
Operator Gondola	Fadil	01-04-20	01-04-25
Ahli K3 Muda	Siti Nur Hasanah	04-11-21	04-11-24
Ahli K3 Muda	Juni Agung Sukoco	04-11-21	04-11-24

BRI berupaya dalam menjaga keselamatan jiwa pekerja dan pemangku kepentingan BRI dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Internalisasi budaya tanggap darurat pada pekerja;
2. Mengkomunikasikan prosedur tanggap darurat pada pemangku kepentingan yang berada di lingkungan BRI;
3. Menyediakan peralatan tanggap darurat;
4. Menyediakan perlengkapan medis di lingkungan tempat kerja;
5. Melakukan simulasi tanggap darurat secara berkala;
6. Melakukan identifikasi risiko bencana di lingkungan kerja BRI.

BRI memiliki strategi dalam pengelolaan risiko kecelakaan kerja di BRI pada area bisnis, antara lain:

Sertifikat	Nama Peserta
Gedung bertingkat, rumah kantor (rukan), rumah toko (ruko), maupun unit kerja mobile berbasis e-channel	Lokasi peninjauan pembangunan proyek dan kegiatan kunjungan nasabah
Pelaksanaan K3 difasilitasi kebijakan pengelolaan gedung	Pelaksanaan K3 difasilitasi pengelola proyek



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Menguukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Sertifikat	Nama Peserta
Pelatihan dan pemberian informasi evakuasi dari gedung bertingkat secara berkala	Peraturan bagi setiap pekerja untuk mengikuti safety induction
Pelatihan dasar penggunaan alat pemadam kebakaran [FS4]	Pembekalan seluruh pekerja dengan polis asuransi kecelakaan kerja yang mencakup personal accident dan program Jaminan Kecelakaan Kerja
Pelatihan penyelamatan korban dari dalam gedung yang diikuti oleh pekerja pengamanan gedung	-
Perlengkapan fasilitas dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan memadai, termasuk tabung Oksigen (O2), kotak obat P3K, perosotan (tangga luncur) darurat pada jendela keluar (exit window)	-
Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan yang diikuti oleh pekerja, sekuriti, dan pengelola gedung	--
Penyediaan dua mobil ambulans di kantor pusat dan bekerja sama dengan BRI Medika (anak perusahaan Dapen BRI)	-

Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 dilakukan bersamaan dengan Penilaian Risiko Ancaman Bencana (PRAB). PRAB adalah penentuan ancaman yang mungkin terjadi berdasarkan kategori penyebab, misalnya bencana alam, kesengajaan manusia, teknologi, infrastruktur dan dampak ancaman tersebut pada sumber daya yang dimiliki seperti manusia, aset, informasi, nasabah, dan sebagainya. Lingkup pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja terdiri dari:

- Pelaksanaan program ketenagakerjaan (implementasi kesetaraan gender dalam kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja lokal; kesetaraan dalam mengikuti program pendidikan, pelatihan, dan mendapatkan remunerasi yang adil; kebebasan berserikat, serta adanya mekanisme pengaduan dan program pensiun;
- Program pemberian fasilitas kesehatan (club fitness, klub olahraga, dan pemberian asuransi BPJS);
- Program keselamatan kerja (inspeksi/pemeriksaan berkala terhadap APAR dan pelatihan kondisi darurat).

BRI New Way of Working

Sejak awal penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia, fokus utama BRI tertuju pada keselamatan dan kesehatan pekerja maupun nasabah. BRI telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan menyediakan fasilitas kesehatan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja dan nasabah, antara lain melalui penerapan protokol kesehatan, implementasi *flexi working*, dan dukungan fasilitas kesehatan seperti penyediaan *safe house* dan vitamin kepada pekerja maupun nasabah.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, BRI bersama gugus tugas Covid-19 menginisiasi *New Way of Working* dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan pekerja. Program-program yang dilakukan seperti pemberlakuan dan sosialisasi

protokol kesehatan di unit kerja, pengadaan vaksin, pengadaan uji kilat (*rapid test*) dan *swab antigen* secara berkala, program pemberian masker dan vitamin, penyemprotan desinfektan ruang kerja secara berkala, pengawasan terhadap *self-checking* kesehatan harian pekerja, pemberlakuan *Working From Home* (skema kerja jarak-jauh), *culture campaign* terkait *e-learning* BRISMART, proyek percontohan terkait alat dan aplikasi produktivitas, fasilitas armada bus antar jemput pekerja untuk mengurangi penggunaan kendaraan umum, dan penyediaan fasilitas kerja jarak-jauh di kota-kota satelit bernama BRIWORK untuk mendukung fleksibilitas kerja. BRI juga melakukan inisiasi berupa *safe house* untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang terpapar Covid-19 tanpa gejala.

6M Protokol Kesehatan



Memakai Masker



Mencuci Tangan



Menjauhi Kerumunan



Menghindari Makan Bersama



Menjaga Jarak



Mengurangi Mobilitas

Tetap ingat dan Disiplin dengan Protokol Kesehatan ya, BRILiaN!



Program Pensiun [GRI 401-3]

BRI selalu memperhatikan kesejahteraan pekerja, karena BRI paham bahwa peran pekerja sangat penting dalam keberlanjutan suatu perusahaan. Selain fokus pada upaya meningkatkan program pengembangan potensi pekerja, BRI juga turut memberikan pembekalan kepada pekerja yang akan memasuki masa pensiun. Dari pembekalan yang diberikan, BRI berharap dapat memberikan kesiapan dari sisi mental, pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalani masa pensiun. BRI telah menyelenggarakan BRILiaN Leader Retirement Program (BLRP), yang diikuti sebanyak 490 orang selama tahun 2021. [GRI 404-2]

Perhatian BRI dalam mempersiapkan masa pensiun pekerja juga dibuktikan melalui penghitungan imbalan pascakerja yang adil. Proses penilaian perkiraan liabilitas imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang meliputi penghargaan tanda jasa, cuti besar, program masa pensiun, program kesehatan pasca kerja BPJS dan manfaat lain. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan BRI dan persyaratan minimum Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara itu, imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya ditentukan berdasarkan metode Projected Unit Credit. Pengukuran atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:

- Keuntungan dan kerugian aktuarial.
- Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk

jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset);

- Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset). Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain yang tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Partisipasi pekerja tetap dalam program pensiun bersifat wajib, di mana iuran dana pensiun tersebut berasal dari perusahaan dan pekerja dengan porsi masing-masing sebesar 50%. [GRI 201-3]

Total liabilitas imbalan kerja per 31 Desember 2021 adalah Rp 14.549 miliar yang terdiri dari beberapa komponen. Salah satunya adalah nilai pengukuran kembali liabilitas pensiun imbalan pasti sebesar Rp845 miliar dan nilai pengukuran kembali liabilitas tunjangan hari tua sebesar Rp 554 miliar. Perhitungan terkait program pensiun imbalan pasti dan program pensiun lainnya menggunakan penilaian dari aktuaris independen. [GRI 201-3]

Sebagai wujud komitmen ini, BRI mengikutsertakan para pekerjanya pada program pensiun, dengan pilihan skema manfaat pasti dan iuran pasti. Selain itu, BRI juga menyelenggarakan program persiapan pensiun dengan mayoritas kegiatannya berupa pelatihan kewirausahaan dengan mengundang para pekerja purnabakti yang telah berhasil membuka usaha secara mandiri





LAPORAN
KEBERLANJUTAN
2021

Memprioritaskan Nasabah

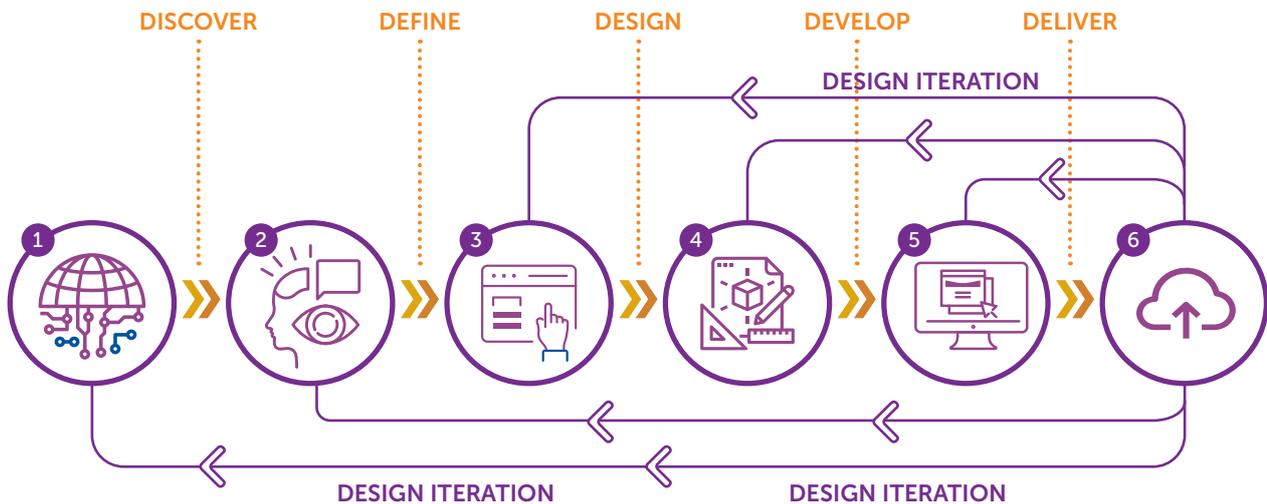


Inovasi Produk Digital [GRI102-11] [FS15]

Pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia, tidak menghentikan BRI dalam melakukan akselerasi transformasi digital. Transformasi digital dilakukan dengan tujuan menghadirkan produk dan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih aman. Selain itu, transformasi digital juga menjadi jawaban terhadap kebutuhan nasabah di era kenormalan baru (*new normal*). Platform digital yang disajikan oleh BRI akan mengedepankan kebutuhan dan minat konsumen (*customer centric*) serta pengalaman pelanggan (*customer experience*). Dalam melakukan validasi kebutuhan pasar, BRI melalui Divisi Digital Banking Development and Operation melakukan riset yang intensif dan menyeluruh dengan melibatkan penyedia data seperti *Bloomberg* dan *Insight*, konsultan dalam

negeri maupun luar negeri, serta kebutuhan dan *pain points* yang muncul dari internal BRI sendiri.

Dalam mewujudkan solusi inovatif dari permasalahan yang ditemukan, BRI menerapkan konsep *design thinking* untuk menciptakan solusi yang inovatif bagi masalah dan *pain points* yang ditemui dari hasil riset yang telah dilakukan. Konsep *design thinking* ini juga didukung dengan penerapan desain UI/UX yang memperhatikan kebutuhan nasabah dan penggunaan standar desain yang berlaku di BRI. Penerapan UI/UX yang *consumer friendly* bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam menggunakan aplikasi, baik secara tampilan maupun *experience* penggunaannya. Hal ini diharapkan dapat mendorong nasabah untuk menggunakan aplikasi BRI.



Saat ini, pengembangan aplikasi di BRI menggunakan metode *waterfall* dan *agile*. Metode *agile* digunakan pada *New Delivery System* (NDS), yaitu suatu pengembangan yang dilakukan secara bertahap dan berulang. NDS juga telah menggunakan teknologi terkini seperti PWA (*Progressive Web App*), *Micro*

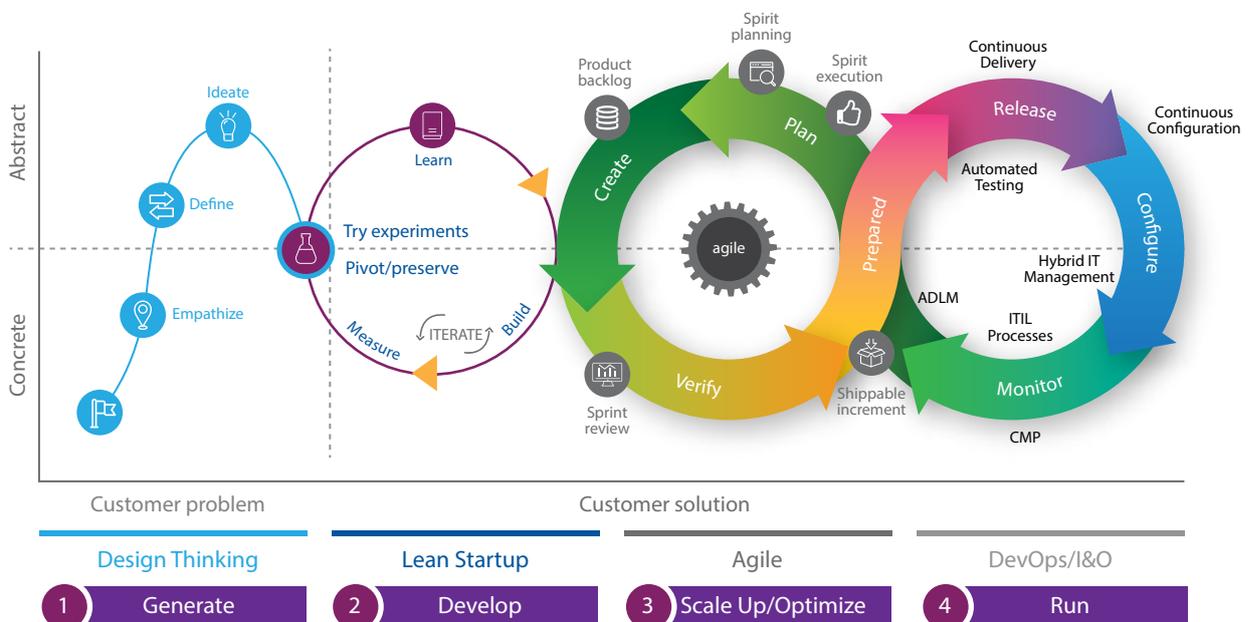
Services, dan *Automatic Testing*. Kehadiran teknologi terbaru tersebut membuatnya dapat dipantau dengan mudah menggunakan *tools monitoring* yang ada sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas dalam pengembangannya. Aplikasi ini berbasis situs web yang dapat dibuka melalui *web browser* di

komputer dan dapat diakses menggunakan gawai atau telepon seluler dengan memanfaatkan teknologi PWA untuk memberikan pengalaman yang mudah bagi pengguna. Aplikasi ini dibangun dengan proses yang berpusat pada pengguna, khususnya mengantisipasi kesulitan yang umum dialami pengguna. Dengan berbagai fitur dan latar pengembangan tersebut, NDS dapat menyederhanakan proses bisnis yang ada menjadi lebih komprehensif sehingga dapat melayani nasabah dengan cepat dan efisien.

Penggunaan teknologi baru ini juga mendukung pengurangan sumber daya seperti server fisik karena dapat digunakan untuk beberapa aplikasi sekaligus. Pengurangan sumber daya tersebut membantu efisiensi penggunaan listrik sehingga dapat mengurangi dampak pemanasan global akibat penggunaan listrik yang besar secara terus-menerus. [GRI102-33]

Pengembangan aplikasi dapat dengan mudah menyesuaikan dengan perubahan-perubahan metode *Agile*. *Minimum Viable Product* pun dapat tersalurkan sehingga pengguna dapat langsung menggunakan aplikasi dengan fitur utama yang sudah ada. Untuk menunjang metode pengembangan ini, aplikasi manajemen proyek *Confluence* dan *JIRA* berfungsi sebagai tools yang dapat digunakan untuk membantu pengawasan pengerjaan yang sedang berlangsung dan fitur yang akan dikembangkan.

Peran teknologi sangat diandalkan untuk mendukung proses bisnis dan mempercepat proses transformasi digital BRI. Layanan perbankan digital berperan penting dalam memenuhi kebutuhan nasabah atas transaksi finansial yang lebih cepat, mudah, aman, efisien, dan reliabel. Oleh karena itu, layanan perbankan digital yang baik oleh BRI, bisa menciptakan pengalaman bertransaksi yang positif bagi nasabah.



Pada tahun 2021, BRI memperkenalkan produk dan aktivitas baru sebagai kontribusi BRI dalam pengurangan emisi karbon sebagai berikut:

- a. Pengembangan *Opening Account (Giro)* melalui Platform BRI. Layanan digitalisasi pembukaan rekening giro berdampak kepada efisiensi pembukaan rekening. Nasabah tidak perlu hadir secara fisik ke Unit Kerja, sehingga dapat menghemat kertas untuk keperluan administrasi.
- b. Digital *On-boarding* Kredit BRIGuna, sebuah aktivitas baru yang mengubah layanan pemberian Kredit BRIGuna ke arah digital. Layanan ini berkaitan erat dengan LST karena digitalisasi yang dilakukan memberikan dampak kepada penghematan kertas dan efisiensi layanan.





TebuChain: Solusi Digital Berbasis *Blockchain*

[GRI 102-11] [FS15]



TebuChain merupakan platform berbasis *blockchain* untuk ekosistem tebu dan gula guna mendukung transparansi data dan transaksi perbankan. Produk ini mendukung integrasi data antar entitas dari hulu sampai hilir, untuk membangun proses bisnis dan transaksi yang semakin efisien dan efektif. BRI hadir memberikan solusi digital kegiatan finansial para pemangku kepentingan

Manfaat dari produk ini:

- Menjaga dan mengembangkan kemitraan Pabrik Gula, BRI, Petani dan pemangku kepentingan dari rantai pasok Gula sebagai usaha penguasaan bisnis dan transaksi komoditas Gula.
- Mempermudah dan mengakselerasi akses kredit bagi para Petani, Pabrik Gula, dan Distributor.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyaluran kredit serta *cross selling* produk BRI.

Target Pasar:

- Pabrik Gula baik kepemilikan Pemerintah maupun Swasta.
- Petani binaan Pabrik Gula maupun Petani mandiri.
- Distributor Gula yang telah bermitra dengan Pabrik Gula.
- Pemerintah (Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian).

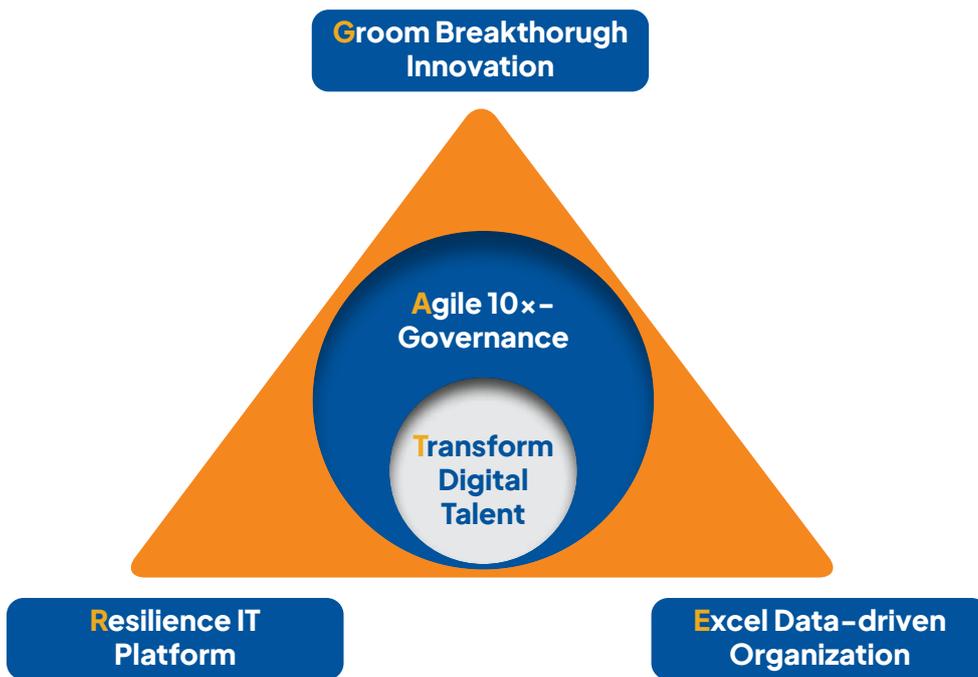
Journey:

- Kuantifikasi Loyalitas Petani dan Integrasi SIIMPG PTPN.
- Integrasi Layanan Kredit BRI.
- Optimasi *On Farm* Tebu.
- Pembiayaan *Invoice Financing*.
- Integrasi Logistik, Retail, dan Lelang Gula.

Roadmap dan Program Kerja Utama Teknologi Informasi

Direktorat Digital dan Teknologi Informasi BRI (TI) menetapkan Strategic Initiatives dan Program Kerja Utama TI BRI dalam rangka menjalankan Strategi Perusahaan tahun 2018 - 2022.

GRAND STRATEGY : GREAT 2021 Industry Leader on Digital & IT Maturity in Indonesia



Direktorat Digital dan TI juga menetapkan Roadmap strategis TI berdasarkan 5 (lima) pilar strategi fungsional, yaitu:

GRAND STRATEGY: GREAT 2020	2021	2022
<i>Groom Breakthrough Innovation</i>	<i>Digital Financial Supermarket</i>	<i>The Most Innovative Digital Financial Ecosystem in Southeast Asia</i>
<i>Resilience IT Platform</i>	<i>Highly Scalable, Open Banking Resilience & Composable Architecture</i>	<i>World-Class Digital Infrastructure</i>
<i>Excel Data-driven Organization</i>	<i>Decision-Driven Data Analytic</i>	<i>World-Class Digital Infrastructure</i>
<i>Agile 10X Governance</i>	<i>Comprehensive Application Development Governance</i>	<i>Mature Agile IT Governance</i>
<i>Transform Digital Talent</i>	<i>Nurture and Engage World-Class Digital Talent</i>	<i>Home to the Best Digital Talent & Mature Digital Dexterity (Holding & Subsidiaries)</i>

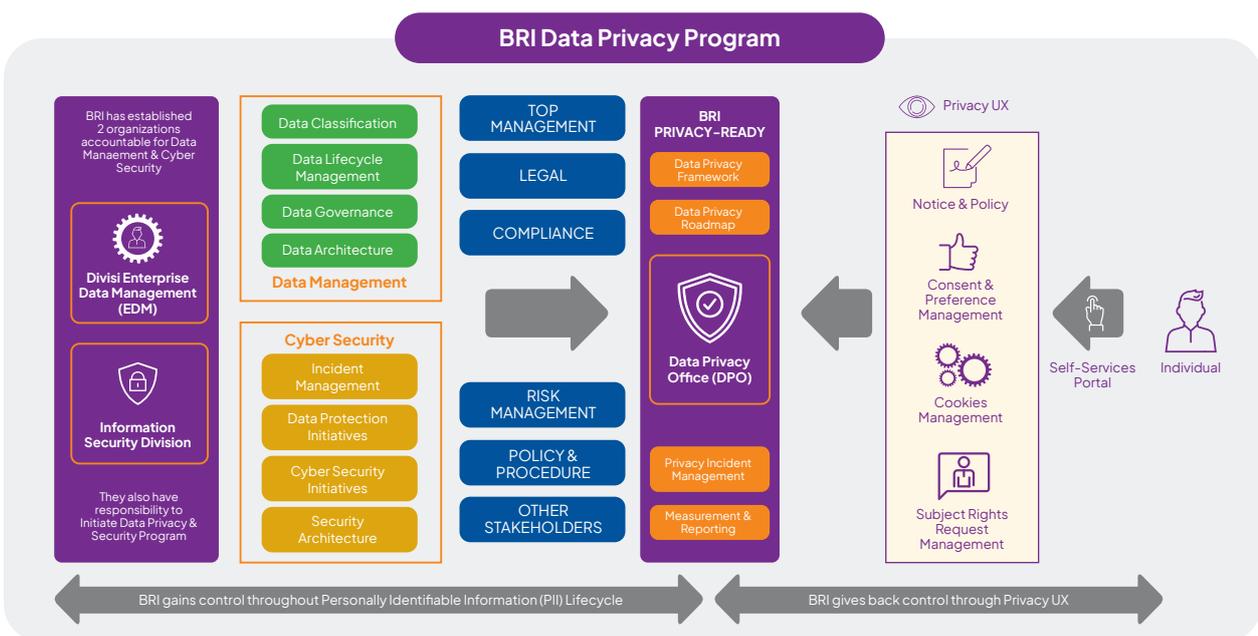
1. *Groom Breakthrough Innovation*: dapat mendorong terwujudnya tujuan perusahaan bersama digitalisasi *Omni-channel*, *Digital Banking*, dan *Micro Payment*, serta mendukung *digital ecosystem innovation* untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi nasabah dalam menciptakan efisiensi dan menemukan bisnis model baru, sehingga mampu memberikan nilai. TI BRI mencanangkan 3 aplikasi BRI yaitu BRImo, Agen BRILink, dan BRISPOT sebagai “*Super Apps*” yang dapat memberikan layanan terintegrasi kepada seluruh nasabah BRI.
2. *Resilience IT Platform*: BRI berupaya untuk meminimalisasi risiko operasional yang mungkin terjadi akibat *residual risk*. Risiko ini dapat dikelola dengan lebih efektif melalui optimalisasi Teknologi Informasi untuk menyediakan *Integrated Cyber Threat Detection System* yang mampu menyediakan kapabilitas seperti *Fraud Detection System* maupun *Early Warning System* yang dapat mengantisipasi perilaku *fraud* secara proaktif sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan. Selain itu, transformasi dalam hal arsitektur TI senantiasa dilaksanakan dengan melakukan modernisasi pada *back-end*, *shifting* dari arsitektur yang monolitik menjadi *microservices*, dan berbagai solusi *front-end* yang berbasis *mobile* dan *API-centric*. Selain melakukan peningkatan resiliensi, perlu dilakukan juga peningkatan dari sisi *security* yaitu mengintegrasikan *Identity & Access Management* dan *Cyber Threat Detection System*. *IT Platform Resiliency* semakin diperkuat dengan senantiasa dilakukan pengujian *Disaster Recovery Plan* secara periodik
3. *Excel Data-driven Organization*: BRI berkomitmen untuk meningkatkan *capability* TI BRI di bidang *Artificial Intelligence*. BRI menggunakan beberapa teknologi terkini untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam operasional bisnis dan layanan. Masih ditemuinya beberapa tantangan terkait pengelolaan data menjadi dasar dilaksanakannya beberapa pengembangan kapabilitas data seperti *Master Data Management*, *BRIBRAIN*, *BRIOne Data*, *Change Data Capture*, *Unified Data Platform*, serta *Self Service & Business Intelligence* yang mendukung *implementasi data governance* dan *data analytics*. *Insight* yang dihasilkan dari *big data analytics* digunakan sebagai masukan untuk strategi bisnis berupa *risk management system*, pengembangan produk, *credit scoring*, *fraud detection*, dan lain sebagainya
4. *Agile Governance*, dilakukan dengan pendekatan *product centric* yang terdiri dari *tribe* dan *squad* produk yang pengembangannya dilakukan secara *agile* dan dibantu oleh *collaboration tools* dan *automation* sesuai tata kelola yang baik dan meningkatkan kualitas dalam memastikan posisi TI BRI di industri dibandingkan dengan *peers*. TI BRI melakukan *assessment Digital & IT Maturity* berdasarkan beberapa *framework* seperti COBIT, DQ, INDI, serta melakukan berbagai Sertifikasi

International seperti ISO 27001, ISO 9001:2015, ISO20000:2018, PCIDSS, dan lain sebagainya. BRIOne IT Shared Service Governance dibentuk untuk memudahkan pemberian layanan-layanan TI kepada seluruh *stakeholders*, seperti layanan TI kepada Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi, maupun Perusahaan Afiliasi BRI.

5. *Transform Digital Talent*, BRI memiliki aset utama yang harus terus diasah potensi/keahliannya dalam *core* dan *future competence* melalui beberapa sertifikasi yang diakui secara global. Selain itu, BRI juga meningkatkan *digital culture* yang berperan sebagai *monitoring mission critical* dari seluruh pengembangan IT Platform di BRI saat adanya *customer experience*.

BRI Data Privacy Program [GRI 418-1]

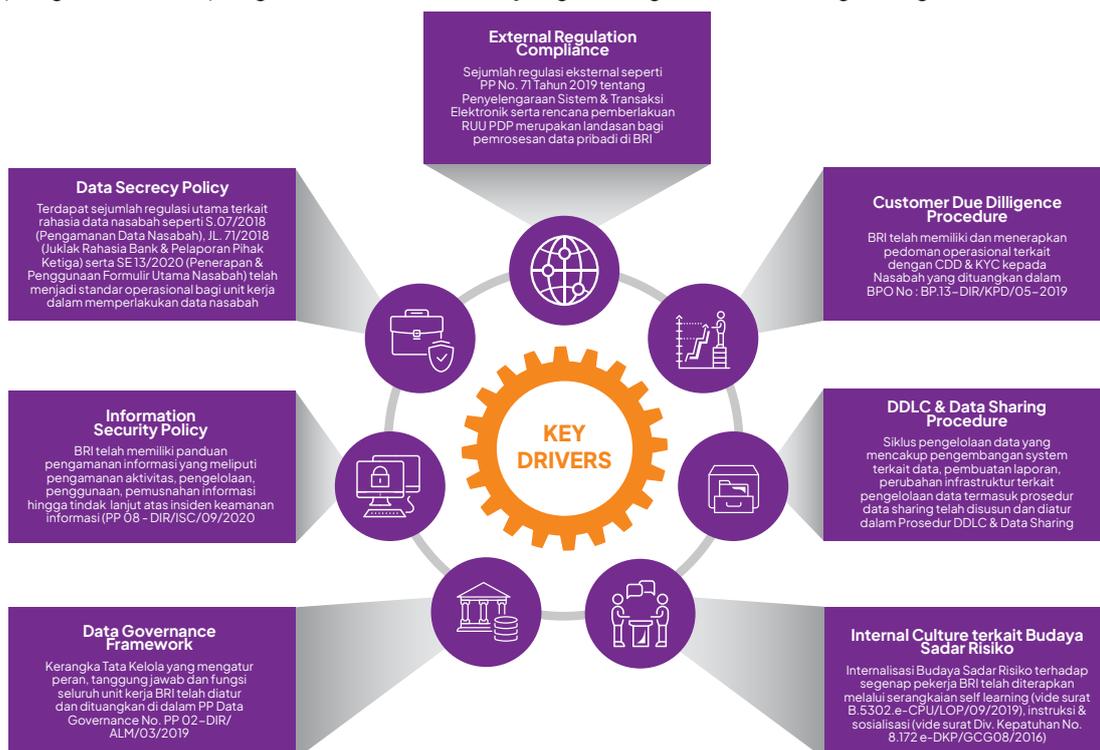
BRI telah mengimplementasikan berbagai upaya program keamanan data nasabah. BRI sedang menyusun *blueprint* program khusus *Data Privacy Management* yang terintegrasi, termasuk perencanaan eksekusi jangka panjang yang berkelanjutan. Hal ini dilaksanakan seiring dengan rencana pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) Republik Indonesia dan upaya adopsi kebutuhan kapabilitas fundamental yang diatur pada *European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR)*. RUU PDP menjadi acuan bagi BRI yang merupakan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan perlindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada. Regulasi mengenai keamanan data pribadi di berbagai negara banyak dipengaruhi oleh EU GDPR. Ini membuat BRI menjadikan EU GDPR sebagai acuan dasar dalam upaya mengadopsi kebutuhan fundamental dan membangun standar kapabilitas dalam perlindungan data pribadi. BRI akan melakukan *review* secara mendalam terhadap peraturan-peraturan di berbagai negara sebagai acuan pelaksanaan *assessment*. BRI memiliki aspirasi menjadi *privacy-ready* setelah 2 (dua) tahun sejak pengesahan RUU PDP RI, dengan mengedepankan prinsip *privacy-by-design* pada setiap proses yang melibatkan data dengan kategori *Personally Identifiable Information (PII)*



Data Management System

BRI telah memiliki Divisi yang khusus menangani *Data Management (Divisi Enterprise Data Management* atau EDM) dan Divisi yang khusus menangani *Cyber Security (Information Security Division* atau ISC). Pada inisiasi *Data Privacy Program*, BRI perlu membangun kapabilitas fundamental sehingga dapat melakukan kontrol terhadap data pribadi (kategori *Personally Identifiable Information* atau PII) di seluruh siklus hidup data tersebut di BRI, mulai dari data tersebut diperoleh atau diciptakan, sampai data tersebut dihapus. Tahap inisiasi membutuhkan kolaborasi yang erat untuk membangun kapabilitas teknis dari EDM dan ISC, dengan *empowerment* dari *Top Management* dan didukung oleh *stakeholders* lainnya untuk melengkapi kapabilitas pada bidang terkait seperti *Legal, Compliance, Digital* dan *Operational Risk Management* dan *Divisi Policy & Procedures*. Terkait pelaksanaan struktur tata kelola *Data Privacy Management*, perlu ditunjuk sebuah organisasi khusus atau unit kerja yang dalam regulasi disebut sebagai *Data Privacy Office (DPO)*. Unit kerja DPO ini juga yang akan melaksanakan *privacy risk assessments* atau audit secara berkala pada penggunaan teknologi dan praktik-praktik yang berdampak pada pemilik data pribadi. Unit kerja ini juga akan terus melaksanakan pelatihan atau sosialisasi secara berkala terkait *Data Privacy Management*. Sebelum unit kerja ini terbentuk, beberapa fungsi dari unit kerja ini dilaksanakan oleh unit kerja yang sudah ada di BRI. Untuk *Incident Management* terkait *Data Privacy*, dilaksanakan oleh ISC dalam naungan *Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)*. Sedangkan untuk sosialisasi *Data Privacy Management* dilaksanakan oleh EDM. Sehubungan dengan aturan terkait perlindungan data pribadi dimana BRI harus memberikan kontrol kepada pemilik data pribadi terkait mengenai persetujuan (*consent*) dan preferensi untuk pemrosesan tertentu terkait *data subjects*, maka BRI akan menyediakan sebuah *self-service portal* sebagai *Privacy UX*, dimana pemilik data pribadi akan langsung berinteraksi untuk seluruh layanan yang berhubungan dengan *data privacy*.

BRI sangat berkomitmen untuk meningkatkan keamanan informasi data yang dikelola. Berikut prinsip-prinsip dalam pengamanan dan pengelolaan data nasabah yang dituangkan dalam beragam regulasi internal.



1. *External Regulation Compliance* : Sejumlah regulasi eksternal terkait seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, PP No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum serta SE OJK No. 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen merupakan landasan bagi pemrosesan data pribadi di BRI.
2. *Data Secrecy Policy* : BRI menerjemahkan sejumlah regulasi eksternal dari otoritas tersebut di atas melalui sejumlah regulasi utama internal dan turunannya terkait rahasia data nasabah, di antaranya seperti Prosedur Internal Pengamanan Data Nasabah (Perlindungan data nasabah di seluruh tahap siklus perolehan data mulai dari perolehan/pengumpulan, pengolahan & penganalisisan, penyimpanan, pemindahan/ pengiriman, pembukaan akses hingga pemusnahan data) termasuk prosedur enkripsi data tersebut. Petunjuk pelaksanaan mengenai rahasia bank, penundaan transaksi dan pelaporan pihak ketiga serta prosedur internal tentang penerapan & penggunaan formulir utama nasabah. Beberapa kebijakan internal ini telah menjadi standar operasional bagi unit kerja BRI dalam mengelola data nasabah.
3. *Information Security Policy* : BRI telah memiliki panduan pengamanan informasi dengan berpedoman pada prosedur atau standar best practice industri yang mengacu POJK Nomor 38/POJK.03/2016 Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan ISO/IEC 27001:2013, serta PCI DSS Versi 3.2 tahun 2016 Requirement 12.1 Establish, Publish, Maintain, Disseminate Security policy. Hal ini dituangkan di dalam Panduan Utama pedoman pelaksanaan pengamanan Informasi meliputi pengamanan aktivitas, pengelolaan, penggunaan, pemusnahan informasi hingga tindak lanjut atas insiden keamanan informasi (PP 08/ISC/09/2020).
4. *Data Governance Framework* : BRI telah menetapkan dan mengadopsi Kerangka Tata Kelola Data yang mengatur peran, tanggung jawab dan fungsi seluruh unit kerja BRI telah diatur dan dituangkan dalam Prosedur Internal tentang Pedoman pelaksanaan Data Governance.
5. *Customer Due Diligence Procedure* : BRI mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap seluruh nasabah maupun calon nasabah. BRI telah memiliki dan menerapkan pedoman operasional terkait dengan *Customer Due Diligence Procedure* (CDD) & *Know Your Customer* (KYC) kepada nasabah yang dituangkan dalam Buku Pedoman Operasional yang dilaksanakan dan menjadi standar bagi seluruh unit kerja BRI.
6. *Data Development Life Cycle* (DDLC) & *Data Sharing Procedure* : siklus pengelolaan data yang mencakup pengembangan sistem terkait data, pembuatan laporan, perubahan infrastruktur terkait pengelolaan data termasuk prosedur data sharing telah disusun dan diatur dalam prosedur internal mengenai DDLC & Prosedur Data sharing.
7. *Internal Culture* terkait Budaya Sadar Risiko : BRI memahami bahwa serangkaian prosedur di atas harus diikuti oleh internalisasi budaya kerja bagi segenap manajemen dan pekerja BRI. Oleh karena itu Internalisasi Budaya Sadar Risiko terhadap segenap pekerja BRI telah diterapkan melalui serangkaian *self learning* rutin, instruksi dan sosialisasi yang berkelanjutan



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Menguatkan Ketahanan Tata Kelola



Keamanan Siber (*Cyber Security*)

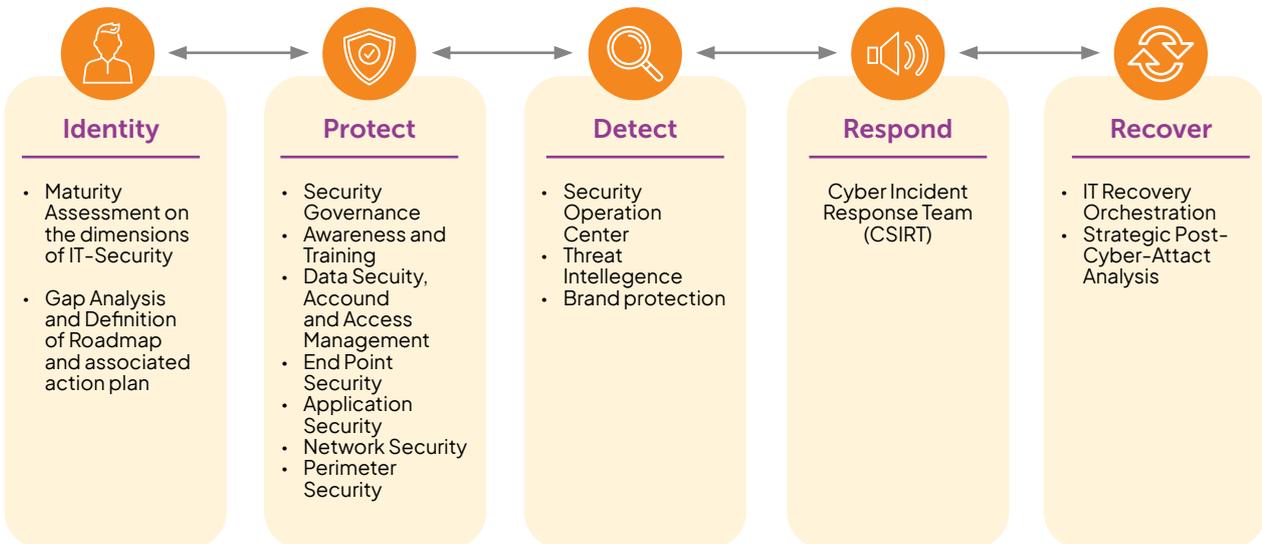
Kejahatan siber merupakan suatu peristiwa yang dilakukan oleh suatu pihak secara sengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan tembusnya mekanisme keamanan atau gagalnya kontrol, sehingga berdampak pada hilangnya atau terganggunya suatu operasi, pelayanan, fungsi organisasi, dan terjadinya kerugian materiil dan nonmateriil, yang bila tidak diantisipasi, ditindaklanjuti dan dimitigasi dapat meningkat menjadi bencana. BRI menentukan insiden siber berdasarkan dampaknya, antara lain sanksi regulator, klasifikasi data, publikasi di media, dan layanan yang terganggu akibat dari insiden tersebut.

BRI menggunakan kerangka NIST Cyber Security yang telah disusun ke dalam Enterprise Security Architecture (ESA), berdasarkan analisis dan kondisi ancaman siber terkini. ESA terdiri dari pilar Identifikasi (Identity), Proteksi (Protect), Deteksi (Detect),

Tanggap (*Respond*), dan Pemulihan (*Recover*) terhadap keamanan informasi. ESA merupakan acuan untuk pengembangan keamanan siber BRI. ESA juga termasuk ke dalam produk dari pilar *Identity* yaitu *gap analysis*, *maturity assessment*, dan penyusunan *roadmap security* BRI.

Pada pilar *Protect*, BRI menerapkan berbagai teknologi pengamanan informasi dan juga tata kelola keamanan. BRI sudah memiliki kebijakan terkait pengamanan informasi yang disusun dengan menggunakan referensi dari Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, ISO27001: 2013, PCI-DSS, dan NIST. BRI juga memiliki ketentuan mengenai pengamanan data nasabah yang disusun berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen.

BRI Cybersecurity Framework (NIST)



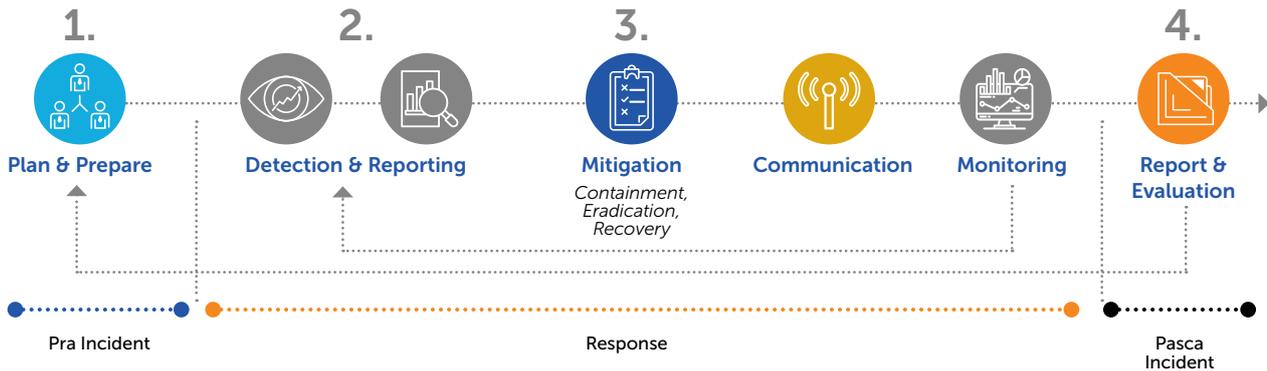
Dalam rangka memastikan tata kelola keamanan informasi telah dilakukan sesuai standar internasional, BRI melakukan sertifikasi ISO 27001:2013 pada ruang lingkup *Big Data, Open API, Managing Event & Cyber Threat Monitoring, Card Production, Spacecraft Operation* dan *Data Center Facility*. BRI telah tersertifikasi PA-DSS (*Payment Application-Data Security Standard*) untuk *API Direct Debit* BRI. Dalam rangka meningkatkan kepedulian pekerja BRI terhadap pengamanan informasi, BRI secara rutin melakukan program peningkatan kepedulian melalui berbagai bentuk dan media antara lain:

1. Poster dan publikasi internal BRI;
2. *E-learning* kepada seluruh pekerja BRI;
3. Webinar kepada seluruh pekerja BRI;
4. *Email phishing campaign*.

Pada pilar *Detect*, BRI memiliki fungsi/bagian khusus berupa *Security Operation Center (SOC)* yang melakukan pengawasan terhadap ancaman siber secara terus-menerus (24jam, setiap minggu, selama 365 hari). BRI juga melakukan pengawasan secara proaktif melalui layanan *threat intelligence service* dari *provider* yang berskala internasional. Selain itu, untuk memonitor dan memitigasi ancaman *Brand abuse*, BRI memiliki program proteksi merek yang bertugas untuk memonitor penyalahgunaan merek BRI di sosial media. BRI juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan identifikasi kerentanan sistem BRI dan tinjauan terhadap keamanan informasi BRI secara independen berupa *vulnerability assessment, penetration test* dan simulasi serangan siber (*red team*).



Pada pilar *Respond* dan *Recover*, BRI mempunyai CSIRT (*Cyber Security Incident Response Team*) yang dengan tanggap akan mengatasi permasalahan atau insiden keamanan informasi. BRI sudah menyusun tata kelola untuk tanggap insiden keamanan informasi yang sejalan dengan *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Business Continuity Plan* (BCP) BRI. BRI juga sudah mempunyai protokol untuk menyampaikan kepada publik apabila terjadi insiden. BRI bekerja sama dengan pakar keamanan siber yang memiliki pengalaman global dalam menanggapi insiden untuk membantu BRI melakukan forensik dan investigasi insiden siber.





Layanan dan Kepuasan Pelanggan

Selain keamanan dan kenyamanan, kepercayaan nasabah banyak ditentukan oleh bagaimana bank memberi pelayanan dan menyelesaikan komplain/masalah yang dimiliki nasabah. BRI memastikan kepercayaan nasabah tetap terjaga dengan memberikan layanan prima dan solusi yang menghasilkan nilai tambah di mata nasabah.

1. Informasi Produk dan Layanan [FS15]

BRI selalu berupaya memberikan informasi yang memadai kepada nasabah mengenai nama produk maupun layanan, jenis-jenisnya, manfaat, persyaratan, biaya-biaya yang melekat, perhitungan bunga atau bagi hasil, maupun jangka waktu berlaku produk atau layanan tersebut. Informasi-informasi tersebut disediakan dalam Bahasa Indonesia yang jelas dan lengkap, baik secara tertulis maupun secara lisan atas permintaan nasabah. Informasi mengenai produk dan layanan BRI, dapat diperoleh di unit kerja BRI maupun melalui website BRI di www.bri.co.id.

2. Survey Kepuasan Nasabah [F.30][F.5]

Dalam proses pengawasan untuk identifikasi suatu *progress* kualitas layanan, BRI melaksanakan survey pengukuran kualitas swadaya, baik secara internal maupun oleh pihak ketiga, sebagai berikut:

- Pengukuran Konsistensi Kualitas Pelayanan Unit Kerja BRI dilakukan dengan menggunakan metode *Mystery Shopping*, untuk memperoleh gambaran yang akurat dan objektif mengenai kualitas pelayanan unit kerja yang meliputi *People* (CS, Teller, Satpam), *Process*, *E-Channel* (ATM/CRM), dan *Premises*.
- Survey Kepuasan Nasabah dilakukan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Telephonic Interview* (CATI) terhadap nasabah yang telah bertransaksi di BRI (maksimal 3 hari setelah bertransaksi).

Berikut adalah hasil survey kepuasan pelanggan yang sudah dilakukan pengukuran kualitas layanan oleh BRI. Detail sebagai berikut:

Tabel Hasil Survey Kepuasan Pelanggan [F.5]

Keterangan	2019	2020	2021
Tingkat Kepuasan Nasabah	85,90%	84,57%	89,28%
Tingkat Penyelesaian Keluhan Nasabah	98,93%	99%	99%

Peningkatan kualitas layanan dilakukan untuk memastikan bahwa layanan BRI selalu berada pada level terbaik di industri perbankan. Oleh karena itu, BRI secara berkala melakukan pengukuran terhadap kualitas layanan sekaligus membandingkannya dengan kompetitor.

BRI fokus memberikan perhatian yang serius terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada seluruh nasabah pada semua kanal layanan, khususnya pada titik kontak (*touch point*) di mana terjadi interaksi langsung antara nasabah dengan bank. Implementasi nilai *Customer Centric* dilakukan dengan meningkatkan kapabilitas pekerja, memperbaiki proses bisnis, serta menciptakan premis yang lebih nyaman kepada nasabah. Seluruh upaya yang dilakukan bermaksud untuk menciptakan standardisasi layanan serta meningkatkan kepuasan nasabah pada semua kanal layanan. Peningkatan kepuasan nasabah nantinya dapat mendorong nasabah untuk meningkatkan jumlah rekening (*new account*), meningkatkan penggunaan rekening (*usage*), atau menambah saldo pada rekening (*top-up*) sehingga memberi dampak positif melalui nilai *CASA* dan *Fee Based Income* BRI.

Di tahun 2021, BRI melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas layanan, yaitu:

1. Peningkatan *People Capabilities*, melalui program *WeAreShine* yang merupakan

program peningkatan kualitas layanan dan operasional unit kerja pada aspek-aspek *People, Process, Premises* dan parameter operasional sehingga nasabah dapat menikmati keseragaman dan konsistensi layanan di seluruh unit kerja BRI.

2. Pengembangan *Service Culture*, melalui *BRI Customer Day*, yaitu kumpulan aktivitas untuk menyemarakkan layanan unit kerja dalam satu wilayah kerja tertentu yang diselaraskan dengan tema-tema setempat untuk meningkatkan *customer engagement* nasabah dengan unit kerja BRI tempat nasabah biasa bertransaksi.
3. Peningkatan *Service Process*, melalui *business process re-engineering* berupa penyederhanaan prosedur dan pengaturan alur proses layanan di unit kerja untuk mempermudah dan mempercepat waktu layanan kepada nasabah.
4. Peningkatan dan perbaikan *Premises*, melalui kegiatan perbaikan dan penyempurnaan sarana infrastruktur unit kerja sehingga nasabah merasa lebih nyaman bertransaksi.

Pandemi Covid-19 membuat BRI terus berjuang bersama seluruh nasabah dalam menghadapi pandemi. BRI berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan melalui penerapan protokol kesehatan. Komitmen ini dibuktikan dengan stabilnya kualitas layanan BRI yang diukur dengan *Service Quality Index* pada tahun 2019 - 2021, sebagai berikut:

Tahun	Indeks Industri Perbankan	Indeks Kinerja BRI
2019	3,99	4,00
2020	4,09	4,10
2021	4,29	4,29

3. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran [GRI 102-17]

[SASB FN-CB-510.a.2]

Indikasi pelanggaran terhadap kode etik BRI dapat dilaporkan melalui sarana *Whistleblowing System* (WBS). BRI akan mengenakan sanksi sesuai ketentuan pelanggaran disiplin BRI kepada pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Penerapan sistem pelaporan pelanggaran didasarkan pada Surat Edaran Direksi BRI Nose: 65-DIR/KEP/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang *Whistleblowing*

System PT BRI (Persero), Tbk. Pengaduan indikasi pelanggaran melalui *Whistleblowing System* harus didasarkan pada itikad baik dan bukan merupakan keluhan pribadi ataupun berupa niat buruk/fitnah. Pengelolaan laporan *Whistleblowing System* dilakukan oleh Unit Pengelola WBS yang berada di bawah Direktur Utama dan dimonitor oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Unit Pengelola WBS bertanggung jawab dalam mengelola dan menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran. [GRI 102-17] [SASB FN-CB-510.a.2]

Sehubungan dengan komitmen BRI untuk mendukung upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilakukan oleh KPK serta memperhatikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) BRI-KPK tentang penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, BRI membangun sarana pelaporan pengaduan pelanggaran yaitu sistem *Whistleblowing System* (WBS) BRI yang terintegrasi dengan KPK.

Pengaduan indikasi pelanggaran serta saran terkait perilaku etis, baik internal maupun eksternal dapat dilakukan melalui sarana *Whistleblowing System*, sebagai berikut: [GRI 102-17]

- Surat : PO BOX 1895 JKP 10900
- Email : whistleblower@corp.bri.co.id
- Sms : 0811 8200 600
- Website : www.bri.co.id/whistleblowing-system

4. Penanganan Pengaduan Nasabah

BRI telah mengadopsi aturan-aturan di atas melalui penerbitan ketentuan internal tentang pengaduan nasabah, yakni Surat Keputusan Tentang Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Melalui prosedur ini, setiap keluhan terkait pelanggaran kerahasiaan nasabah akan langsung ditindaklanjuti. Selain itu, BRI menegaskan perlindungan data dan/atau informasi nasabah pada Surat Edaran tentang Pengamanan Data Nasabah. Surat Edaran tersebut juga secara khusus mengatur tentang:

1. Data nasabah merupakan informasi yang wajib dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Data nasabah tidak boleh dibuka atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.
3. Data nasabah yang tersimpan dalam sistem harus diamankan dengan mekanisme pengendalian akses yang diatur secara formal dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko.
4. File atau dokumen yang mengandung informasi sensitif tidak diletakkan di *server/ folder file sharing*.
5. Data nasabah merupakan hak privasi nasabah yang wajib dilindungi keberadaannya dan kerahasiaannya.
6. Pengendalian Lingkungan Kerja untuk melindungi keamanan data.
7. Penanganan Perangkat *Hardware* dan *software*.

Dalam proses pembukaan rekening, BRI telah meminta persetujuan (*consent*) dari calon nasabah terkait izin penggunaan data calon nasabah untuk keperluan penawaran produk-produk dan jasa perbankan baik oleh BRI ataupun BRI Group. Seiring dengan perjalanan program *data privacy* di BRI, aktivitas *consent* ini akan diperluas sesuai dengan *data subject* yang diatur dalam *framework data privacy management* yang ditetapkan BRI.

Selain itu, BRI juga memiliki Petunjuk Pelaksanaan Rahasia Bank, Penundaan Transaksi dan Pelaporan kepada Pihak ketiga, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang rahasia bank pada umumnya serta prosedur langkah – langkah ketat yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembukaan, penundaan transaksi, penghentian sementara, penyitaan, pemblokiran dan pelaporan terkait data nasabah yang memuat pengertian dan ketentuan, wewenang dan tanggung jawab, alur dan uraian pekerjaan serta *flowchart*.
2. Prosedur ini juga mengatur bagaimana pembukaan rahasia bank dalam hal:
 - a. Kepentingan Perpajakan;
 - b. Kepentingan Peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan nasabahnya;
 - c. Tukar menukar informasi Bank;
 - d. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah secara tertulis;
 - e. Pemeriksaan Bank oleh Bank Indonesia.

BRI juga telah memiliki dan menerapkan peraturan internal terkait Prosedur Penyediaan *Data Sharing* untuk Kebutuhan Pihak Ketiga. Di dalam prosedur ini telah diatur apa saja dokumen yang harus dilengkapi dalam hal permintaan data. Hal ini tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip kerahasiaan bank. Selain itu di dalam prosedur ini juga telah diatur tentang tingkat klasifikasi data yang dimiliki oleh BRI sehingga jelas mekanisme pemenuhannya dari masing – masing tingkat klasifikasi data. Permohonan permintaan data juga wajib mendapatkan otorisasi sesuai dengan tingkat klasifikasi datanya.

BRI juga melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam hal menyerahkan atau menerima data dari Pihak Ketiga untuk melindungi datanya. Maka, dalam hal pertukaran data dengan Pihak Ketiga, BRI selalu meminta Pihak Ketiga untuk sepakat atas Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement*), baik sebagai pengungkap data ataupun di antara para pihak yang saling mengungkapkan data.



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Mengukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Kerahasiaan dan Keamanan Data Nasabah

Saat ini kebijakan mengenai keamanan data dan privasi konsumen di Bank BRI mengacu pada SEOJK No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen serta POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bank BRI membentuk sebuah fungsi *Data Privacy Management* di bawah Divisi *Enterprise Data Management* untuk melindungi data nasabah. Fungsi ini juga sedang menyusun SE Standar dan pengamanan terhadap data pribadi. [F.27]

Selama tahun 2019 hingga 2021, tidak terdapat insiden kebocoran, pencurian atau kehilangan data privasi nasabah. Selain itu, tidak terdapat pengaduan terkait kerahasiaan nasabah dan pencurian data oleh nasabah maupun instansi pemerintah. Oleh sebab itu, tidak ada denda atau penalti yang dibayarkan oleh BRI selama tahun 2021. [GRI 418-1] [SASBFN-CB-230a.1]

Pada tahun 2021, implementasi dari prosedur pengaduan dan penyelesaian komplain secara langsung dilaporkan kepada Direktur Jaringan dan Layanan BRI dan telah menghasilkan pencapaian sebesar 99%. BRI menyadari bahwa keamanan data dan data nasabah merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan usaha bank sehingga hal tersebut telah menjadi KPI untuk Divisi Service dan Contact Center. BRI berkomitmen menjaga privasi nasabah dari berbagai insiden yang dapat terjadi seperti pelanggaran data.

Adapun rincian data keluhan nasabah yaitu sebagai berikut: [GRI 418-1] [GRI 103-3] [F.24]

Jenis produk dan/atau layanan	Sumber Pengaduan (Nasabah, Regulator, dsb)	Jumlah/total	Persentase	Selesai	Persentase	Tidak Selesai	Persentase	Dalam Proses	Persentase
Banking	Customer	1.420.052	29,3%	1.397.306	98,4%	0	0	22.746	1,6%
Availability of information	Customer	2.488.589	51,4%	2.488.589	100%	0	0	0	0%
Non-Banking	Customer	933.230	19,3%	933.230	100%	0	0	0	0%
Service Quality	Customer	3.561	0,1%	3.558	99,9%	0	0	3	0,1%
Jumlah total		4.845.432	100%	4.822.683	99,5%	0	0	22.749	0,5%

Jumlah keluhan nasabah cenderung meningkat pada periode 2019–2021, berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah layanan, transaksi nasabah, serta kompleksitasnya. Namun, persentase keluhan nasabah cenderung menurun setiap tahunnya. Tingkat penyelesaian keluhan menunjukkan performa yang baik, di mana penanganan keluhan yang cukup tinggi terjadi di tengah masa pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dalam persentase penanganan keluhan nasabah yang mencapai 99,53%. Ini juga menunjukkan bahwa BRI berkomitmen untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada nasabah bahkan di tengah pandemi.

Tabel Jumlah Keluhan dan Persentase Penyelesaian

Tahun	Jumlah Transaksi	Jumlah Keluhan	Persentase	Keluhan Diselesaikan	Persentase
2019	8.072.908.908	4.284.801	0,05%	4.239.155	98,94%
2020	9.858.840.739	4.716.338	0,05%	4.698.228	99,62%
2021	10.344.763.049	4.845.432	0,047%	4.822.683	99,53%

Sebagai bentuk komitmen penegakan tata kelola keamanan informasi, BRI menerapkan hukuman terhadap pelaku pelanggaran keamanan informasi yang berdampak terhadap bisnis bank.

Seiring dengan berkembangnya suatu bisnis, maka proses transaksional akan semakin kompleks, arus kas perusahaan pun akan semakin bercabang. Pengawasan atas hal ini dapat dipermudah dengan melakukan integrasi antara panel instrumen (*dashboard*) bisnis dengan API BRI. Proses ini dapat memberikan kemudahan dalam mengelola keuangan perusahaan sebagaimana yang ditawarkan oleh *cash management system* (CMS) perbankan.

CMS adalah jasa perbankan untuk membantu suatu bisnis melakukan transaksi harian dan mengatur keuangan dengan mudah, cepat, dan akurat. Dengan CMS, nasabah BRI dapat mendapatkan informasi mengenai rekening, melakukan manajemen likuiditas, serta bertransaksi secara *real-time* tanpa batasan tempat dan waktu. Layanan ini ditujukan bagi bisnis

yang membutuhkan pengelolaan keuangan yang mudah digunakan, modern, aman, dan dinamis.

Platform ini menyediakan berbagai layanan yang dapat memudahkan nasabah dalam mengelola aktivitas bisnis. Di antaranya adalah API Informasi Saldo untuk melakukan pengecekan saldo perusahaan, API informasi mutasi untuk melihat informasi neraca keuangan termasuk kas, piutang, dan transaksi, serta API transfer bank dan transfer antar bank untuk melakukan aktivitas transfer dana dari perusahaan nasabah ke pihak lainnya

Seluruh layanan API dari BRI API di atas telah memiliki sertifikasi keamanan berstandar internasional yaitu ISO 27001 dan PADSS (*Payment Application Data Security Standard*). Sertifikasi ini menjadi pembuktian bahwa BRI API menjamin data yang tersimpan aman dan tidak bocor ke pihak lain serta dapat meminimalisasi potensi timbulnya *fraud* atau penipuan yang dapat membahayakan reputasi BRI.

[SASB FN-CB-230a.2]

Selain itu, BRI berkomitmen melindungi informasi/ data nasabah, sebagai bentuk kepatuhan atas beberapa peraturan eksternal. Berikut adalah acuan peraturan eksternal dan penjelasan dari peraturan internal BRI terkait perlindungan informasi atau data nasabah:

- a. UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1/ POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- c. Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1/ POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- e. Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen.
- f. Dan berbagai aturan terkait lainnya.







LAPORAN
KEBERLANJUTAN
2021

Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Kode Etik BRI

BRI menerapkan kode etik sebagai dasar bagi perilaku dan sikap setiap pekerja BRI. Kode etik ini memberikan prinsip dasar yang sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, serta peraturan yang berlaku dalam BRI. Ketentuan yang mengatur mengenai elemen kode etik BRI dan implementasinya tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor: 06-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep: S.65-DIR/DKP/12/2013 tentang Kode Etik BRI. BRI memiliki kode etik yang merupakan nilai dasar bagi seluruh pekerja dalam menjalankan pekerjaannya secara profesional. Seluruh pekerja BRI selalu menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap kode etik setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen dalam kepatuhan terhadap kode etik BRI. [GRI102-16]

BRI menerapkan 9 elemen pokok dalam menerapkan kode etik sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap hukum dan Kebijakan Bank
2. Hubungan demi Pemangku Kepentingan
3. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Hidup

4. Hubungan Perusahaan dengan Pekerja Bank
5. Kerahasiaan Informasi Bank
6. Integritas dan Akurasi Pelaporan Bank
7. Benturan Kepentingan
8. Kontribusi dan Aktivitas Politik
9. Larangan Menerima Hadiah

Kode etik BRI berlaku bagi seluruh insan BRI di seluruh jenjang perusahaan. Penerapan kode etik BRI secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan yang mendukung terciptanya budaya BRI. Salah satu bentuk komitmen pekerja atas implementasi Kode Etik perusahaan adalah dengan membuat Surat Pernyataan Kepatuhan atas Kode Etik yang diperbarui setiap tahunnya dan dilaporkan secara digital melalui *Good Corporate Governance Online System (GCG Online System)*. Komitmen dari jajaran Direksi dan Dewan Komisaris sebagai *role model* dalam menerapkan Kode Etik Perusahaan bagi seluruh Pekerja BRI sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Kode Etik Perusahaan. [GRI 102-17]

Terdapat sertifikasi/review dari pihak ketiga terhadap kode etik BRI, antara lain:

Nama Sertifikasi	Masa Berlaku
ISO 9001	2019-2022
ISO 37001	2020-2023



Sanksi Pelanggaran Kode Etik



Sanksi pelanggaran atas kode etik berpedoman kepada Surat Edaran Direksi BRI No: 48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin dengan bentuk sanksi atas pelanggaran Kode Etik sebagai berikut:

- a. Pembinaan
 - i. Teguran Tertulis
 - ii. Surat Pembinaan
 - iii. Peringatan Tertulis
- b. Sanksi Administratif
 - i. Turun Jabatan 1 Golongan Jabatan (TJ 1)
 - ii. Turun Jabatan 2 Golongan Jabatan (TJ 2)

Pemberian sanksi tersebut bergantung pada kategori pelanggarannya yaitu ringan, sedang atau berat sesuai dengan ketentuan pelanggaran disiplin.

Efektivitas Program Manajemen Risiko

[GRI 102-30, 102-31, 102-33, 102-34]

Manajemen Risiko berperan dalam melindungi modal dan mengoptimalkan *return* terhadap risiko. Skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat membuat BRI harus menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh eksposur risiko.

Penerapan Manajemen Risiko secara konsisten pada setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional menjadikan perusahaan yang sehat dan tumbuh secara berkelanjutan. Dalam mengevaluasi efektivitas proses manajemen risiko terkait ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola, badan tata kelola tertinggi BRI diwakili oleh Komite Manajemen Risiko di bawah Direksi.

Metode pengukuran dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal baik berupa metode standar atau metode internal yang dikembangkan sendiri oleh Bank.

BRI telah melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen risiko dan hasilnya menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko telah memadai sehingga parameter limit yang ditetapkan pada setiap jenis risiko telah mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian. Didalamnya telah mempertimbangkan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang terukur serta mengintegrasikan beberapa aspek dalam pengelolaan risiko yang optimal. [GRI 103-3]

Pandemi Covid-19 yang menginfeksi seluruh dunia memberi dampak amat besar ke seluruh industri, tak terkecuali perbankan. Karena itu, perusahaan

membutuhkan strategi yang tepat dalam merespon peluang atau risiko yang muncul, agar bisnis dapat tetap tumbuh secara berkelanjutan. BRI menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit, serta fokus pada penyelamatan UMKM.

BRI juga melakukan *mapping* debitur yang terdampak Covid-19, dan membantu para debitur melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekaligus mendukung program pemerintah dalam penyelamatan perekonomian dan memberikan skema restrukturisasi kredit secara masif meskipun dapat mengakibatkan kontraksi dari sisi pendapatan. [FS6] [FS10]

Keterbatasan interaksi sosial secara fisik mengakibatkan perubahan pola karakter masyarakat menjadi *digital minded*. Pertumbuhan transaksi digital perbankan menandai pergeseran karakter dalam pengelolaan risiko operasional dan digital. BRI secara khusus membentuk *Digital and Operational Risk Division*. Di sisi lain, penurunan daya beli masyarakat dan *demand shock* akibat Covid-19 meningkatkan potensi risiko kredit khususnya segmen UMKM. Diperlukan strategi dan pengelolaan risiko portofolio kredit BRI yang baik dan terukur untuk membantu nasabah terdampak Covid-19 untuk bertahan dan bangkit kembali.

BRI berpedoman pada Kebijakan Manajemen Risiko yang digunakan sebagai acuan yang bersifat strategis dan komprehensif dalam rangka penerapan serta pelaksanaan Manajemen Risiko BRI. Melalui pengawasan secara proaktif, BRI dapat mengendalikan risiko di dalam aktivitas usaha sehingga tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan BRI maupun mengganggu keberlangsungan kinerja dan usaha bank.

Penetapan risiko akan dibahas dan disahkan pada forum *Risk Management Committee*, yang diselenggarakan setiap triwulan dan diungkapkan dalam forum rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan Direktur terkait.

Pada triwulan IV 2021 peringkat profil risiko BRI berada pada tingkat *low to moderate*, hal ini menunjukkan bahwa bank mampu menjaga tingkat pengelolaan risiko seiring dengan berkembangnya bisnis dan persaingan bank di Indonesia. Frekuensi pelaporan profil risiko BRI dilakukan setiap triwulan. Khusus lingkungan, sosial dan tata kelola, pengkajian risiko dilakukan minimal dua kali dalam setahun. [GRI 102-31]

Peringkat profil risiko yang berada di level *Low to Moderate*, kualitas portofolio kredit yang baik dan persentase *non performing loan* yang terjaga pada tahun 2021 merupakan hasil nyata dari sinergi pengelolaan risiko yang baik. Komite Pemantau Manajemen Risiko juga memberikan berbagai masukan dan kajian kepada Dewan Komisaris terhadap keputusan permohonan persetujuan atas tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Dewan Komisaris menilai seluruh Rencana Kerja dan Anggaran Komite Pemantau Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.

Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkesinambungan oleh *three lines of defense*, yaitu seluruh *risk taking* unit selaku *first line*, unit kerja kepatuhan dan manajemen risiko selaku *second line* dan unit internal audit selaku *third line*. [GRI 102-31]

Kondisi pasar yang tidak pasti dan cenderung *volatile* mengakibatkan *yield enhancement* dan meningkatkan potensi kerugian atas *trading asset*. Memperhatikan hal tersebut telah dibentuk divisi *Market, Portfolio & Enterprise Risk* untuk memperkuat fungsi pengawasan transaksi di *middle office* dan *forward looking of market & liquidity* termasuk *outlook, stress testing dan forecasting*.

BRI menyadari perlunya penguatan dan perpanjangan tangan di *Regional Office* BRI di seluruh Indonesia dalam pengelolaan risiko khususnya di masa pandemi ini. Untuk itu, BRI telah membentuk fungsi *Regional Risk Management (RRM)* di seluruh wilayah BRI yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses manajemen risiko unit kerja di wilayahnya.

Selanjutnya, BRI akan tetap proaktif dan prudent dalam melaksanakan manajemen risiko, terutama di setiap lini bisnis dan operasional. Dengan melakukan hal ini, BRI berharap dapat mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan melalui *asset quality specific business and specific risk management*, serta *balancing business and risk policy*. Manajemen risiko BRI juga akan selalu mengembangkan diri melalui *capacity building* di seluruh jajaran *risk management* dan meningkatkan *risk awareness* insan BRILiaN. Pengembangan teknologi untuk mengelola risiko juga dilakukan untuk mempercepat proses identifikasi, penilaian, pengendalian dan monitoring.

Pengelolaan manajemen risiko yang lebih baik dan inovasi produk/layanan yang ramah lingkungan hidup dapat mewujudkan prinsip *pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment*.

Menjadi salah satu Perbankan terbesar dan tersebar di Indonesia, BRI telah menerapkan *Enterprise Risk Management* di seluruh lingkungan perusahaan, tidak terkecuali di Perusahaan Anak baik yang bergerak di sektor perbankan maupun non perbankan. BRI sebagai Entitas Utama paham betul bahwa kelangsungan usaha dipengaruhi juga oleh eksposur risiko yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Perusahaan Anak.

Terkait hal tersebut, BRI telah mengimplementasikan sistem konsolidasi/integrasi manajemen risiko dengan Perusahaan Anak, termasuk Perusahaan Anak yang beroperasi di luar wilayah Indonesia, dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko, mempertimbangkan karakteristik bisnis masing-masing Perusahaan Anak dan menyesuaikan dengan yurisdiksi otoritas/pengawas setempat. BRI terus membangun *Integrated Risk Management* dengan

memperbaiki akuntabilitas pada manajemen risiko terintegrasi mulai dari kebijakan, prosedur, penetapan limit (*Risk Appetite Statement*, Profil Risiko dan Key Risk Indicator di perusahaan anak) dan melakukan Forum Risk Management Induk dan anak perusahaan secara periodik. Adapun Perusahaan Anak BRI adalah Bank Raya Indonesia, Permodalan Nasional Madani, Pegadaian, BRI Life, BRI Ventura Investama, BRI Danareksa Sekuritas, BRI Multifinance Indonesia, BRI Insurance, dan BRI Remittance.

BRI mengembangkan bisnisnya melalui inovasi produk dan jasa secara berkelanjutan serta didukung dengan Fungsi Manajemen Risiko teknologi digital dan jaringan yang handal didukung satelit untuk mengoptimalkan layanan perbankan sampai ke pelosok negeri. BRI menerapkan proses Manajemen Risiko secara konsisten pada setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional yang menjadikan BRI bank yang sehat dan tumbuh secara berkesinambungan.

BRI memiliki 10 (sepuluh) jenis risiko yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategis, risiko transaksi intra group dan risiko asuransi.

Terhadap berbagai risiko itu, BRI telah melaksanakan serangkaian prosedur di dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keseluruhan prosedur tersebut dilakukan BRI melalui Manajemen Risiko. BRI menerapkan manajemen risiko yang independen dan sesuai dengan standar yang merujuk pada ketentuan dari OJK, Bank Indonesia serta *best practices* yang diterapkan di perbankan internasional. Konsep *Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan strategi manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan operasional Bank.

Penerapan ERM akan memberikan nilai tambah (*value added*) bagi Bank dan *stakeholders*. Prinsip kehati-hatian menjadikan Bank selalu mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di perbankan, termasuk dalam penerapan keuangan berkelanjutan, salah satunya melalui Penerapan Manajemen Risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengawasan dan pemantauan risiko sosial dan lingkungan dari proyek atau kegiatan yang dibiayai.



Corporate Governance Performance Index

Hasil penilaian CGPI selama 4 tahun terakhir telah menjadi acuan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan penerapan GCG secara terukur. Secara konsisten BRI terus melakukan perbaikan dan peningkatan GCG secara komprehensif sehingga pada tahun 2021 BRI memperoleh tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini merupakan komitmen manajemen BRI untuk secara terus menerus dan berkesinambungan mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan.

CGPI diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan penerapan GCG secara berkesinambungan.

Alur program riset dan pemeringkatan CGPI melalui 3 (tiga) tahap penilaian yaitu 1) *Self-assessment*, 2) Penilaian Sistem Dokumentasi, dan 3) Penilaian Observasi Wawancara terhadap aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* BRI.

Pelaksanaan penilaian CGPI di tahun 2021 mengusung tema “Membangun Ketahanan Perusahaan Dalam Kerangka Good Corporate Governance”,. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan 3 aspek yaitu:

1. *Governance Structure* meliputi struktur dan kebijakan tata kelola perusahaan.
2. *Governance Process* meliputi sistem dan mekanisme tata kelola perusahaan.
3. *Governance outcome* meliputi *output*, *outcome* dan *impact* dari proses implementasi GCG.



Hasil penilaian terhadap CGPI berdasarkan penilaian tahun 2021 mendapat skor 95,10 poin dengan peringkat Sangat Terpercaya (*Most Trusted*) dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Keterangan	Skor
Governance Structure	33,72
Governance Process	34,38
Governance Outcome	27,00
Total Skor	95,10

Selama 4 tahun terakhir nilai CGPI mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan pencapaian skor sebagai berikut:

Skor CGPI			
2018	2019	2020	2021
89,06	90,75	93,25	95,10

ASEAN Corporate Governance Scorecard

Salah satu penilaian eksternal yang dilakukan terhadap praktik tata kelola BRI selama beberapa tahun terakhir adalah penilaian berdasarkan kriteria ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang mengadopsi prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikeluarkan oleh *The Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). ACGS

merupakan salah satu inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan tercatat di ASEAN dan mempromosikan perusahaan tercatat di ASEAN menjadi asset class. Indonesia menjadi salah satu dari 6 (enam) negara ASEAN yang berpartisipasi dalam inisiatif ini.



Penilaian atas praktik tata kelola perusahaan tercatat dilakukan dengan me-review informasi dalam Bahasa Inggris yang tersedia di publik dan dapat diakses oleh masyarakat umum, serta mencakup informasi yang dimuat dalam Laporan Tahunan, situs web, pengumuman dan edaran yang dibuat oleh perusahaan tercatat

Metodologi penilaian terdiri dari 2 (dua) tingkat yaitu:

1. Tingkat 1: item standar minimum yang diharapkan untuk diterapkan di setiap negara anggota ASEAN dan mencakup peraturan perundangan serta prinsip OECD.
2. Tingkat 2: item bonus yang merefleksikan praktik baik melebihi ekspektasi standar minimum, serta *item penalty* yang merefleksikan tata kelola yang buruk.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian ACGS meliputi 5 (lima) aspek sebagai berikut;

1. Hak-hak pemegang saham
2. Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham
3. Peran Pemangku Kepentingan
4. Pengungkapan dan Transparansi
5. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris

Pihak yang melakukan penilaian

Penilaian dilakukan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) melalui *Domestic Ranking Body* (DRB) sebagai perwakilan di setiap negara peserta untuk melakukan penilaian di skala nasional dan ditunjuk oleh regulator masing- masing negara. Sejak tahun 2016, OJK menunjuk RSM Indonesia sebagai DRB untuk Indonesia. Untuk menjaga independensi penilaian, dilakukan pula verifikasi penilaian oleh DRB negara lain, anggota ASEAN.

Hasil Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Dari hasil penilaian tingkat praktik GCG sesuai kriteria ACGS, BRI memperoleh penghargaan dengan *Top 3 Public Listed Companies* (PLCs) Indonesia dalam pemeringkatan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) dengan skor 110,22.



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Menguatkan Ketahanan Tata Kelola

Strategi Anti Fraud & Pengelolaan Whistleblowing System (WBS)

Dalam rangka meningkatkan aspek Tata Kelola Perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan, Perusahaan telah memiliki kebijakan Strategi *Anti Fraud*. Kebijakan tersebut merupakan wujud komitmen dari Manajemen dalam mengendalikan *fraud* yang diterapkan dalam sistem pengendalian *fraud* dan merupakan wujud perhatian serius dari Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang tidak memberikan toleransi (*zero tolerant*) pada setiap bentuk *fraud* baik internal maupun eksternal. Pada kebijakan tersebut diatur mengenai organisasi dan penerapan Strategi *Anti Fraud* di BRI yang didasarkan pada empat pilar sebagaimana ketentuan yang diatur oleh regulator yaitu : [\[GRI103-2\]](#)[\[GRI103-3\]](#)

Pilar 1 : Pencegahan

Pilar 2 : Deteksi

Pilar 3 : Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar 4 : Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Perusahaan harus selalu menjaga kepercayaan masyarakat, mengingat pihak yang disasar dan dirugikan adalah perusahaan dan nasabah Perusahaan. BRI berkomitmen untuk menerapkan *zero tolerance* pada setiap praktik bisnis dan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) maupun Tindakan pidana korupsi, sebagai tujuan ke 16 TPB. BRI mendorong seluruh pekerja untuk menghindari keterlibatan dalam segala bentuk kegiatan *fraud* melalui sosialisasi. Perusahaan belum melakukan survei terkait operasi yang dinilai memiliki risiko terkait gratifikasi dikarenakan tiap pekerja di tiap divisi memiliki potensi dan terdapat risiko untuk melakukan gratifikasi. Selama tahun 2021, BRI telah menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan kebijakan *anti-fraud* atau anti korupsi kepada 100% pekerja dan badan tata kelola serta kebijakan

tersebut telah disosialisasikan kepada mitra bisnis perusahaan. [\[GRI 205-1\]](#)[\[GRI 205-2\]](#)

Dilingkup internal, BRI mewajibkan Direktur, Komisaris, jajaran manajemen dan seluruh pekerja untuk menandatangani komitmen *anti fraud*. Di lingkup eksternal, BRI terus meningkatkan teknologi untuk mencegah praktik-praktik *fraud*. BRI memberikan bantuan hukum bagi pekerja yang menghadapi permasalahan hukum dari pihak ketiga terkait dugaan *fraud* atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya. Bantuan dan perlindungan hukum tidak berlaku apabila pekerja menjadi pihak yang dilaporkan Perusahaan dan/atau telah dinyatakan bersalah oleh Perusahaan. Pengawasan di lingkup internal BRI terhadap tindakan *fraud* menjadi tanggung jawab Divisi Kepatuhan di bawah Direktur Kepatuhan. BRI juga menyertakan Direktorat Digital Banking dan Teknologi Informasi untuk pencegahan terjadinya *fraud* oleh pihak-pihak di luar BRI. [\[GRI103-1\]](#)

Perusahaan melarang pemberian dan penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dan dengan siapapun sesuai undang-undang yang berlaku. Komitmen Perusahaan terhadap larangan gratifikasi terus digunakan, antara lain dengan menerbitkan kebijakan mengenai Ketentuan Anti Penyusunan dan Pengendalian Gratifikasi yang dijadikan pedoman seluruh insan BRI dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi dan penyusunan yang dapat merugikan kepentingan BRI dan bertentangan dengan prinsip GCG sehingga tercipta lingkungan pengendalian yang kondusif sesuai Surat Edaran Direksi BRI Nomor: SE.63-DIR/KEP/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 dan Surat Edaran Direksi BRI Nomor S.18-DIR/MOP/03/2020 Tentang Strategi *Anti Fraud* BRI.

Program Anti Gratifikasi

Perusahaan melarang pemberian dan penerimaan gratifikasi dari pihak manapun yang memiliki hubungan dengan jabatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta yang bersifat menyimpang dari ketentuan BRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen Perusahaan terhadap larangan gratifikasi terus diinternalisasikan, antara lain dengan menerbitkan kebijakan mengenai Ketentuan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi yang dijadikan pedoman seluruh insan BRI dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi dan penyuapan yang dapat merugikan Perusahaan dan bertentangan dengan prinsip GCG sehingga tercipta lingkungan pengendalian yang kondusif. Ketentuan Anti Gratifikasi BRI tercantum dalam Surat Edaran Direksi BRI Nomor: SE.63-DIR/KEP/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Ketentuan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi

Selain itu Perusahaan juga telah menyampaikan surat pengumuman larangan memberikan dan menerima gratifikasi kepada seluruh pekerja BRI Group menjelang hari raya keagamaan. Adapun dalam rangka menerapkan program anti gratifikasi ini, Perusahaan telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi BRI (UPG BRI) yang menyusun ketentuan pengendalian gratifikasi, menyusun program sosialisasi, melakukan pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi, melakukan analisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi

Apabila menerima atau menolak gratifikasi, pekerja dapat melaporkannya ke Unit Pengendali Gratifikasi. Fungsi ini melekat di *Compliance Division*. Pelaporan pemberian atau penerimaan gratifikasi dapat dilaporkan melalui:



Adapun sebagai bentuk dukungan pekerja terhadap program anti gratifikasi perusahaan, laporan pengaduan gratifikasi yang telah disampaikan oleh pekerja BRI kepada *Compliance Division* selama tahun 2021 yaitu sebanyak 805 laporan. [GRI 205-1] [GRI 103-2] [GRI 103-3]

Perwujudan komitmen BRI pada nilai-nilai integritas tersebut diatur dalam Surat Edaran Nomor: SE.63-DIR/KEP/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 tentang Surat Edaran Ketentuan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi. Pengelolaan pengendalian gratifikasi BRI dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang melekat pada *Compliance*

Division, dengan jumlah Laporan Gratifikasi yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Trend Peningkatan pelaporan gratifikasi di BRI setiap tahunnya diakibatkan karena adanya peningkatan kesadaran terhadap gratifikasi di lingkungan perusahaan. [GRI 205-3]

Mekanisme pelaporan gratifikasi kepada UPG dilakukan secara digital melalui GCG Online System dan surat elektronik dengan alamat upg.bri@corp.bri.co.id yang kemudian diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL), dengan rata-rata pelaporan paling lambat adalah tujuh hari kerja dari tenggat waktu

tiga puluh hari kerja. Sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap anti penyuapan dan bentuk pengendalian gratifikasi yang menyeluruh, BRI juga telah melakukan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan ruang lingkup Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Pusat BRI

Melalui GCG Online System, setiap pekerja dapat mengakses teknis tata kelola, misalnya untuk penandatanganan pernyataan kepatuhan kode etik dan pembuatan *annual disclosure*.

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG, BRI juga mematuhi peraturan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berdasarkan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan transparansi, pencegahan korupsi dan mendukung budaya bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, anggota Komisaris, Direksi, SEVP, EVP dan VP di BRI wajib melaporkan harta kekayaan sesuai dalam ketentuan internal Surat Edaran Direksi BRI No:SE.65–DIR/KEP/12/2020 tanggal 16 Desember 2020. Data yang dilaporkan dalam laporan tersebut meliputi posisi harta kekayaan sebelum, saat, dan setelah menjabat. Ketentuan pelaporan tersebut senantiasa diperbarui agar menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku

BRI telah menyampaikan laporan LHKPN untuk periode laporan tahun 2019 yang dilaporkan pada tahun 2020 dan periode laporan tahun 2020 akan dilaporkan di tahun 2021 sebagai berikut:

Tingkat Kepatuhan Kewajiban LHKPN

No.	Jabatan	Wajib LHKJP	2019			
			Wajib LKHPN yang telah melaporkan		Wajib LKHPN yang belum melaporkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Dewan Komisaris	8	8	100%	-	-
2	Direksi	12	12	100%	-	-
3	Pekerja BRI	287	282	98,26%	5	1,74%
Total		307	302	98,37%	5	1,63%

No.	Jabatan	Wajib LHKJP	2020			
			Wajib LKHPN yang telah melaporkan		Wajib LKHPN yang belum melaporkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Dewan Komisaris	8	8	100%	0	0%
2	Direksi	12	12	100%	0	0%
3	Pekerja BRI	299	283	94,65%	16	5,35%
Total		319	303	94,98%	16	5,02%

No.	Jabatan	Wajib LHKJP	2021			
			Wajib LKHPN yang telah melaporkan		Wajib LKHPN yang belum melaporkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Dewan Komisaris	8	8	100%	0	0%
2	Direksi	16	16	100%	0	0%
3	Pekerja BRI	235	235	100%	0	0%
Total		259	259	100%	0	0%

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA FUNGSI KEPATUHAN SEBAGAI BENTUK PENGUATAN TATA KELOLA

1. Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Di tahun 2021 ini BRI telah melaksanakan *Surveillance Audit* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan berhasil mempertahankan sertifikat ISO SMAP.

2. Penguatan Tata Kelola Terintegrasi

BRI melakukan penyempurnaan *framework* pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi keuangan BRI yang mencakup Kepatuhan Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Audit Intern Terintegrasi dan *Performance Management*.

3. Penguatan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas produk, layanan, pola pemasaran, serta teknologi perbankan, BRI senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan APU-PPT, baik di internal Perusahaan maupun secara grup. Beberapa inisiatif perbaikan yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pengembangan sistem monitoring transaksi mencurigakan dengan memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence* (AI).
- b. Memperkuat *database screening* dan identifikasi nasabah dengan memanfaatkan aplikasi PEP PPAK.
- c. *Review* Penilaian Risiko TPPU & TPPT dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach/RBA*) sesuai *National Risk Assessment* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) terkini.
- d. Optimalisasi penerapan program APU PPT di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang melalui peningkatan peran *Regional Risk Management & Compliance* dan *Branch Risk & Compliance*.

4. Peningkatan Awareness

BRI menyelenggarakan program *awareness* melalui kerja sama dengan *Corporate University* (Corpu) BRI bertajuk *Compliance Skill and Knowledge Upgrade* (COLLEGE) Tahun 2021 secara *online* dengan menghadirkan ekspertise dari OJK, PPAK, KPK, DJP dan POLRI sebagai narasumber. Disamping itu, BRI juga meningkatkan *awareness* melalui *In House Training* (GRC), webinar (gratifikasi) dan *self learning* (pengendalian gratifikasi, WBS). [FS4]

5. Digitalisasi Sistem

- a. Aplikasi *Whistleblowing Sistem* Terintegrasi
BRI bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengelolaan pengaduan indikasi pelanggaran (WBS) yang termasuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
- b. Aplikasi Sistem Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan *Company Tree*
BRI mengembangkan sistem untuk melakukan perhitungan BMPK secara *real time* sesuai dengan ketentuan regulator. Hal ini merupakan salah satu wujud kepatuhan BRI dalam mematuhi ketentuan regulator yaitu POJK Nomor 32/POJK.03/2018 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum serta untuk mendukung perkembangan bisnis BRI.
- c. GCG *Online System 2.0*.
BRI melakukan peningkatan proses pemantauan dan pelaporan terkait dengan tata kelola melalui digitalisasi sistem yang bisa di akses oleh seluruh pekerja sesuai dengan level kewenangan yang telah ditetapkan.

Whistleblowing System adalah sarana pelaporan bagi pekerja BRI maupun masyarakat untuk melaporkan adanya perilaku atau indikasi pelanggaran kode etik, prinsip GCG, atau ketentuan yang berlaku, yang dilakukan oleh pekerja BRI. WBS merupakan bentuk komitmen manajemen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih. Insan BRI yang berintegritas, berpartisipasi aktif dalam pelaporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BRI.

BRI melakukan langkah-langkah identifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank yang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*. Berdasarkan klasifikasi pengaduan indikasi pelanggaran BRI, jumlah pengaduan adalah sebagai berikut: [GRI 205-3]

Klasifikasi Sub Pengaduan Indikasi Pelanggaran

Keterangan	2019			2020			2021		
	Jumlah Pelanggaran	Dalam Proses	Selesai	Jumlah Pelanggaran	Dalam Proses	Selesai	Jumlah Pelanggaran	Dalam Proses	Selesai
Tindakan Fraud	107	34	73	57	11	46	25	2	23
Perbuatan Melanggar Hukum	0	0	0	0	0	0	54	1	53
Pelanggaran SOP	140	42	98	108	9	99	16	1	15
Pelanggaran Kode Etik dan GCG	29	13	16	59	6	53	12	1	11
Pelanggaran Etika	21	0	21	11	0	11	6	2	4
Pelanggaran Proses Akuntansi	0	0	0	1	1	0	3	2	1
Jumlah	297	89	208	236	27	209	116	9	107

Note : Terdapat perubahan kategorisasi sub pengaduan indikasi pelanggaran pada tahun 2021.

Berdasarkan data dari laporan *whistleblowing system*, sanksi telah diberikan kepada pekerja dengan jumlah sebanyak 31 orang. Sebanyak 0 pekerja diberhentikan, sebanyak 8 pekerja dihukum, tidak terdapat laporan yang diajukan oleh publik, tidak terdapat laporan yang diselesaikan secara hukum dan tidak terdapat kontrak yang diakhiri dengan mitra bisnis. [GRI 205-3]

Jumlah Pelaporan dan Tindak Lanjut

Keterangan		2019	2020	2021
Jumlah Pelaporan		297	236	116
Tindak Lanjut	Terbukti	110	104	47
	Tidak Terbukti	187	132	60
	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	-	-	-

Kerugian moneter yang dihasilkan dari salah satu tindakan pelanggaran yang terdeteksi pada tahun 2021 adalah sekitar Rp 10 juta. Kerugian ini merupakan pengaduan dari nasabah yang simpanannya sempat hilang karena skimming. BRI dengan sigap telah menyelesaikan pengaduan ini dan uang nasabah yang hilang tersebut telah kembali. [SASB FN-CB-510a.1][GRI103-3].

Jumlah Tindak Lanjut Kasus Fraud

Internal Fraud Dalam 1 Tahun	Jumlah Fraud Yang Dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pekerja Tetap		Pekerja Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Pekerja Terlibat Fraud	-	-	154	107	21	11
Telah Diselesaikan Proses Hukuman Disiplin	-	-	153	59	21	10
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank (Hukuman Disiplin)	-	-	1	48	-	1
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-





Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Mengukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Kebijakan Komunikasi Pemasaran BRI

[FS15]

BRI menerapkan standardisasi pemasaran dengan mengatur kebijakan tersebut dalam Surat Edaran No : SE.25-DIR/MCM/05/2020 tentang Aktivitas Komunikasi Pemasaran Bank BRI yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan serta Pedoman Iklan Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh OJK.

Pemasaran produk dan/atau jasa keuangan BRI, dikomunikasikan melalui beberapa sarana baik secara lisan oleh tenaga pemasar dan *frontliners* BRI maupun media massa melalui media cetak, TV, radio, poster, spanduk, *banner*, *leaflet*, *filler*, dan dokumen pemasaran produk dan jasa lainnya Guna mendukung implementasi komunikasi pemasaran yang tepat sehingga nasabah memiliki informasi yang cukup sebagai dasar pengambilan keputusan pembelian produk dan jasa keuangan. BRI menerapkan Prinsip Komunikasi Pemasaran dan Perlindungan Konsumen, yaitu: a. transparansi; b. perlakuan yang adil; c. keandalan; d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara

seederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, BRI juga bertanggung jawab dalam menyediakan informasi terkait produk dan jasa layanan perbankan BRI secara akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.

BRI memberikan pelatihan kepada pekerja pemasaran melalui pendidikan dasar komunikasi pemasaran dan *product knowledge* kepada seluruh tenaga pemasar dan *frontliners* BRI. BRI telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komunikasi pemasaran kepada nasabah, baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pemasaran secara internal dilaksanakan oleh *Divisi Compliance* dan Satuan Kerja Audit Internal sedangkan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selama tahun 2021 terdapat beberapa masukan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait iklan jasa keuangan perusahaan di media sosial. BRI telah menindaklanjuti masukan dari OJK dengan lebih tertib dalam mengikuti aturan Pedoman Iklan Jasa Keuangan yang dikeluarkan oleh OJK maupun ketentuan internal. BRI akan mengkaji dan mengupdate kebijakan internal perusahaan melalui standardisasi materi komunikasi media sosial yang berlaku bagi seluruh akun media sosial BRI.

Kebijakan Penagihan Hutang Kredit Bermasalah dan Restrukturisasi

Perbaikan kualitas aset berfokus kepada perbaikan kualitas kredit. Hal ini dilakukan dengan melakukan monitoring atas restrukturisasi kredit bermasalah, sehingga biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dapat ditekan, dan *recovery rate* bisa dioptimalisasi.

Pengelolaan pilar bisnis BRI selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian secara proaktif dan prudent. Dalam pengelolaan kredit, BRI menerapkan *four-eyes principle* dalam proses pemberian pelayanan prima kepada nasabah.

Masing-masing segmen kredit memiliki kebijakan penagihan hutang dan pengelolaan kredit bermasalah. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

- Surat Keputusan Nomor PP.07-DIR/KRD/07/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah;
- Surat Keputusan Nomor PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel;
- Surat Keputusan Nomor PP.07-DIR/KRD/07/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah;
- Surat Keputusan Nomor PP.11-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Korporasi;
- Surat Keputusan Nomor PP.8-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro;
- Surat Keputusan Nomor PP.10-DIR/KRD/12/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Konsumer;
- Surat Edaran Nomor : SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI;
- Surat Edaran Nomor : SE.40-DIR/KRD/06/2021 tentang Restrukturisasi Kredit;

- Surat Edaran Nomor : SE.64-DIR/KRD/12/2020 tentang Kualitas Aset Produktif dan Kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA).

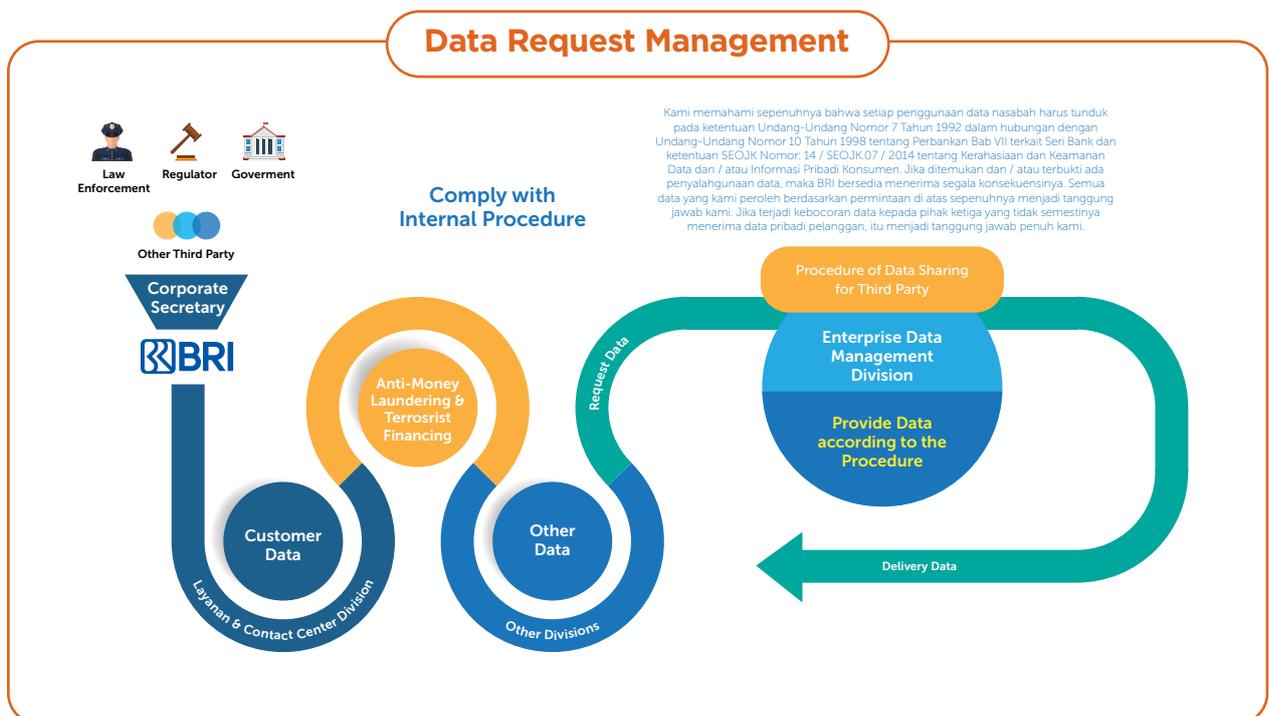
Secara garis besar, kebijakan tersebut mengatur mengenai strategi dan tindak lanjut dalam menangani kredit bermasalah. Tindak lanjut yang dilakukan dalam penanganan kredit bermasalah antara lain dengan pengawasan dan penagihan, restrukturisasi kredit dan penyelesaian kredit. BRI memiliki beberapa langkah dalam prosedur penagihan kepada nasabah. Langkah pertama adalah kontak dengan debitur baik melalui telepon, SMS blast atau pengiriman *Collection / Recovery Letter*. Selanjutnya, debitur akan dikontak langsung baik melalui penagihan lapangan oleh internal BRI atau melalui pihak ketiga khusus. Langkah terakhir adalah penyelesaian melalui klaim asuransi atau perusahaan penjamin. Dari rangkaian proses penagihan tersebut tidak hanya sekedar untuk memproteksi kepentingan internal BRI, namun juga tetap memperhatikan hak dan privasi nasabah.

Credit Restructuring and Recovery Division adalah unit kerja yang berfokus pada *Recovery* kredit bermasalah (di luar segmen kredit mikro dan kartu kredit) dan berfungsi dalam penyehatan dan atau penyelesaian kredit bermasalah. Divisi CRR telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi di jajaran pekerja Divisi CRR baik dari tingkat Divisi, Kantor Wilayah dan Cabang yang berkaitan langsung dalam proses penagihan. Beberapa pelatihan yang telah diberikan adalah *BSDP (BRILiaN Specialist Development Program) for Relationship Manager NPL* dan *In House Training* Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan.

Data Request Management

Corporate Secretary Division menerima permintaan data dari regulator dan pemerintah yang akan diteruskan ke divisi terkait atau disebut sebagai Divisi Pemohon Data. Kemudian Divisi Pemohon Data akan menindaklanjuti permohonan permintaan data tersebut kepada Divisi Enterprise Data Management (EDM). EDM memproses setiap permohonan yang masuk sesuai tingkat kritikalitas datanya untuk kemudian didistribusikan kembali kepada Divisi Pemohon Data. Hal ini telah tertuang dalam Prosedur Data Sharing kepada Pihak Ketiga. Manajemen *sharing data* ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan dari setiap data yang dikelola oleh BRI.

Permintaan data yang berasal dari internal BRI pun sudah diamankan dengan serangkaian prosedur di mana Divisi Pemohon Data akan menuangkan secara jelas tujuan dari permohonan data tersebut serta menandatangani *declaration letter* yang berisi kesadaran sepenuhnya untuk tunduk terhadap regulasi kerahasiaan data seperti UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan maupun Undang - Undang terkait lainnya serta Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen. Selain itu daftar permintaan dari Divisi Pemohon Data dicatat dalam aplikasi Digital Office milik BRI, begitu juga tindak lanjut pemenuhan permohonan datanya dicatat dalam Task Management milik BRI yaitu Jira. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dari BRI untuk menerapkan prinsip data privacy dari setiap data yang dikelola oleh BRI.



Tanggung Jawab Kepada Pemasok

BRI berupaya untuk memastikan proses pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1. Audit Pengadaan Barang dan Jasa untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. BRI senantiasa melakukan audit secara berkala yang dilakukan oleh auditor internal dan auditor eksternal BRI. [FS9]
2. *Vendor Anti Bribery Survey*, merupakan salah satu survei edukasi pada mitra/rekanan. Pada 2021, BRI melakukan survey online kepada rekanan/pemasok BRI. Isi materi dari kegiatan survei yang dilakukan mencakup: [FS4]
 - a. *Sharing* mengenai visi dan misi BRI
 - b. Sosialisasi ISO 37001:2016 serta evaluasi terhadap rekanan
 - c. Forum komunikasi untuk mendapatkan masukan dari rekanan untuk perbaikan proses pengadaan di BRI
 - d. Sosialisasi ISO 37001:2016 serta evaluasi terhadap rekanan.

Pengelolaan rekanan BRI mencakup proses pendaftaran dan seleksi calon rekanan, *monitoring* hingga evaluasi kinerja rekanan, sehingga dengan adanya pengelolaan rekanan diharapkan BRI mempunyai database penyedia barang/jasa yang siap dan mampu mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BRI. [FS1] [FS5] [GRI 205-2]

BRI memiliki kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagai kebijakan seleksi pemasok dalam rangka menjamin kualitas barang dan jasa yang diperoleh. Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Pengadaan BRI mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. KB.01-DIR/MAT/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diberlakukan terhitung mulai bulan Maret tahun 2020. Bank selalu mengkaji kebijakan pengadaan barang dan jasa Perusahaan secara berkala, menyesuaikan perkembangan perusahaan dan industri.

Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Pengadaan merupakan pedoman dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan operasional Bank sesuai kualitas, kuantitas dan waktu yang ditetapkan dengan harga terbaik serta tetap memperhatikan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*). [FS3]

Tujuan dari disusunnya Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik BRI, yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan aktiva tetap dan pelayanan logistik yang berkualitas kepada seluruh unit kerja BRI serta pedoman dalam proses pengadaan barang dan jasa di BRI.

Penyempurnaan terhadap Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik BRI dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan mekanisme kontrol dan tantangan perusahaan. Dengan demikian

diharapkan agar proses pengadaan barang dan jasa di BRI dapat lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis, skala prioritas, ketersediaan anggaran, dan efisiensi anggaran.

Prinsip Pengadaan Barang BRI [GRI103-2]

- Efisien
- Kompetitif
- Terbuka
- Adil dan Wajar
- Akuntabel
- Transparan
- Efektif

BRI telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan vendor sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor Nomor S.35- DIR/MAT/12/2015 perihal Pendaftaran Rekanan Penyedia Barang dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. BRI mengembangkan aplikasi manajemen vendor yang terintegrasi dengan aplikasi BRISMILE yang mencakup proses pendaftaran dan seleksi Calon rekanan, monitoring, pemeliharaan rekanan (Vendor Maintenance) sampai dengan evaluasi performance rekanan sehingga BRI mempunyai database dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BRI. Seleksi pemasok baru harus mencakup kriteria prinsip yang sudah diterapkan di BRI untuk meminimalkan risiko dari dampak negatif sosial. Dalam mewujudkan hal tersebut maka BRI melakukan hal sebagai berikut: [FS3] [FS5]

- Transparansi dan Independensi proses pengadaan barang dan jasa
- Senantiasa patuh terhadap regulasi internal dan eksternal.
- Senantiasa berpedoman pada budaya perusahaan yang berlandaskan pada nilai:
 - a. *Good Corporate Governance*.
 - b. Kode Etik Perusahaan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian
- Mengimplementasikan prinsip manajemen risiko yang meliputi Identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko.
- Mengimplementasikan prinsip manajemen risiko yang meliputi Identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko.
- Melindungi Pekerja sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan para pekerja, misalnya pemberian BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- Memonitor dan memelihara seluruh peralatan yang digunakan oleh pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya untuk meminimalisasi risiko kecelakaan kerja.
- Memperhatikan kesejahteraan pekerja dengan memberikan kompensasi kepada pekerja sesuai peraturan yang berlaku.





LAPORAN
KEBERLANJUTAN
2021

Mengukuhkan Ketahanan Tata Kelola



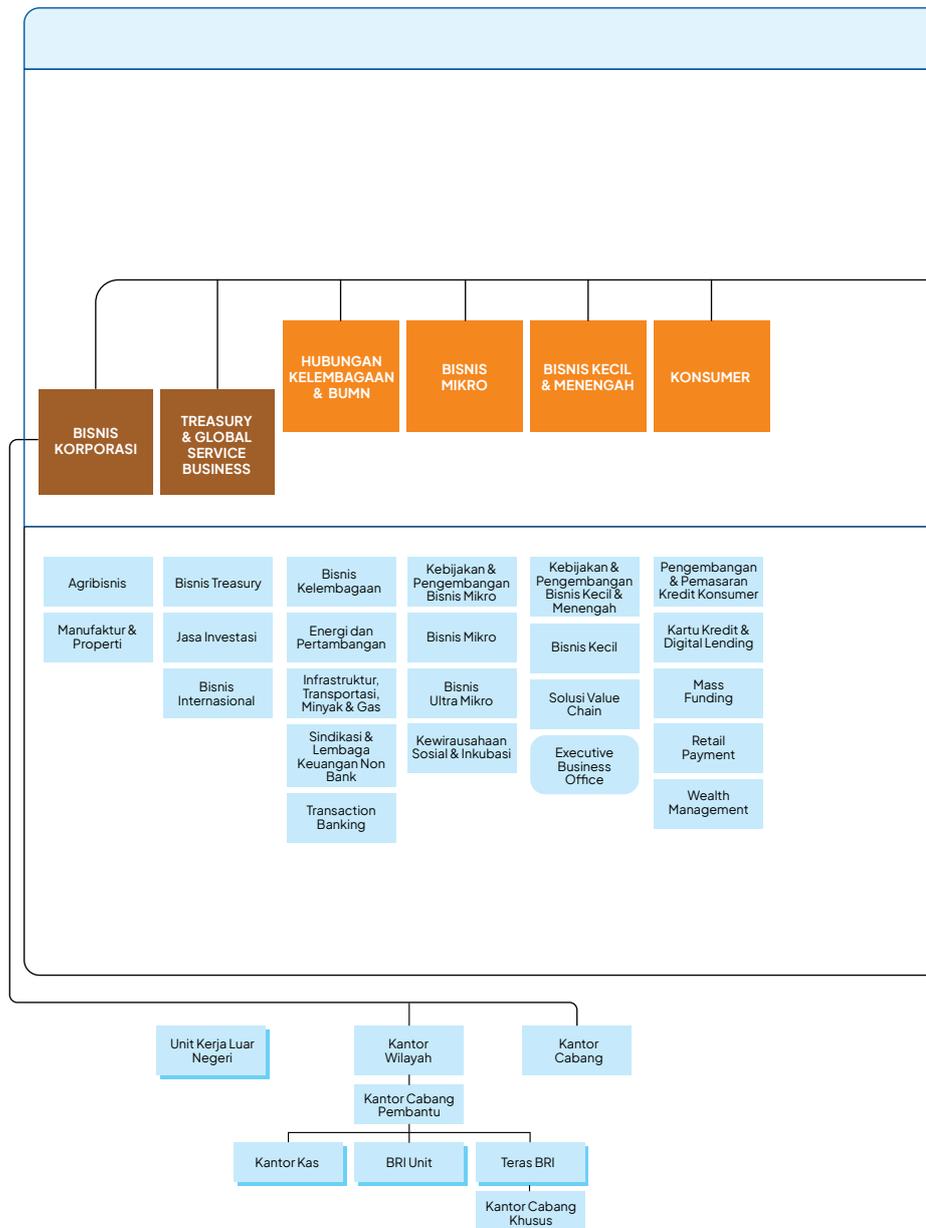
Struktur Tata Kelola

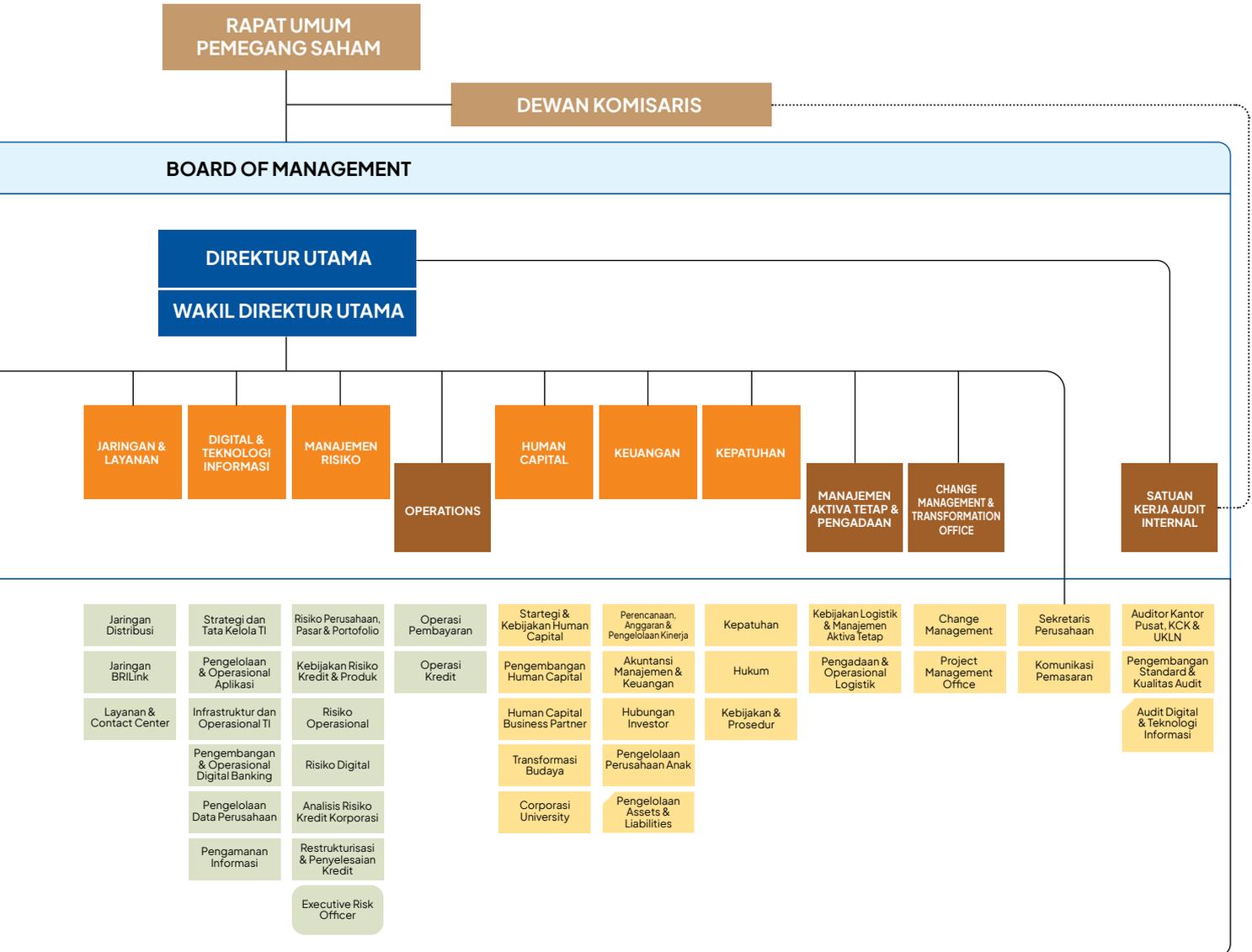
BRI telah melakukan beberapa peningkatan dalam lingkup *Good Corporate Governance*, diantaranya pengkajian Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, implementasi ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan, dan penyempurnaan aplikasi pelaporan *whistleblowing system* melalui *website* BRI. Kondisi pandemi tidak menjadi kendala BRI untuk meningkatkan pemahaman para pekerja terkait implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengendalian gratifikasi dan penyuapan serta pemahaman mengenai ketentuan perbankan lainnya menggunakan sarana webinar maupun *e-learning*. [E.2][GRI 102-32]

Struktur tata kelola perusahaan meliputi: [GRI 102-18][E.1]

- a. Organ Utama, terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.
- b. Organ Pendukung, terdiri dari Komite di bawah Dewan Komisaris, Komite Direksi, dan Unit Kerja yang mendukung penerapan GCG.

Adapun struktur organisasi BRI yang tercantum dalam Surat Keputusan NOKEP :S.365a-DIR/CDS/08/2021 tanggal 18 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:





Perusahaan Anak

Audit Intern Wilayah

■ Direksi
■ SEVP
■ Bisnis
■ Penunjang Bisnis
■ Support
 Divisi
■ Desk
■ Fungsional

Komite Dewan Komisaris : Audit, Nominasi & Remunerasi, Pemantauan Manajemen Risiko, Tata Kelola Terintegrasi
Komite Direksi : Manajemen Risiko, Kebijakan Perkreditan, Kredit, ALCO, Human Capital, TI, Capital & Investment, Produk, Pengadaan Barang & Jasa

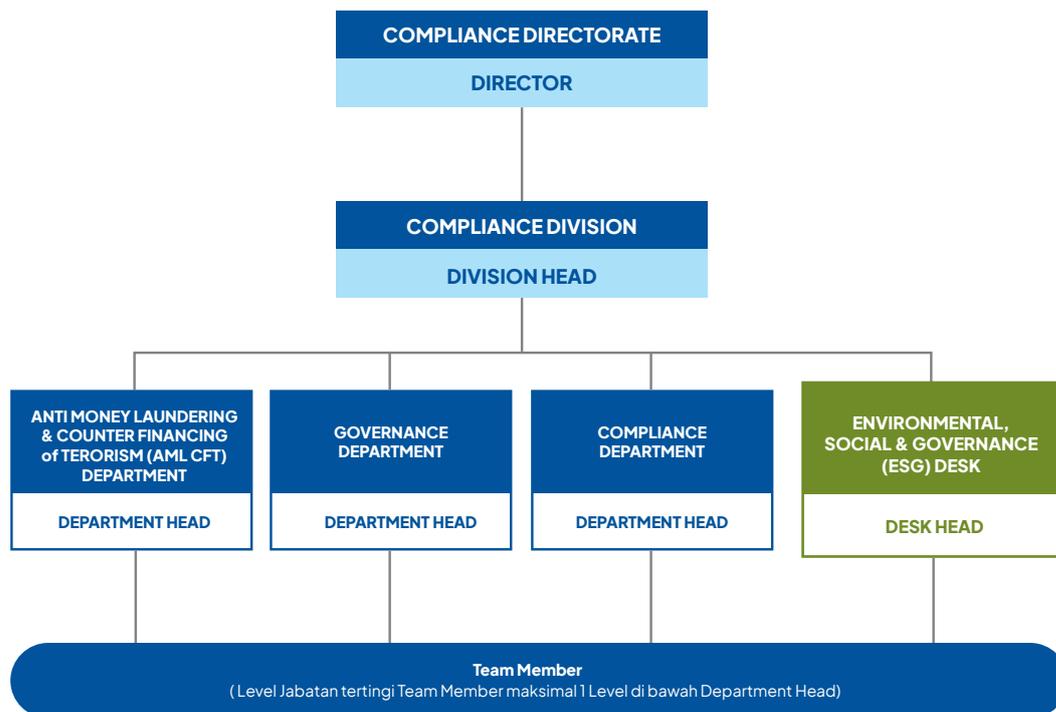
Dalam menjalankan tata kelola perusahaan, BRI memiliki organ pendukung berupa komite di bawah Direksi yang terdiri dari :

- a. Komite Capital Investment
- b. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data
- c. Komite *Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee*
- d. *Asset & Liability Committee (ALCO)*
- e. Komite Barang dan Jasa (PBJ)
- f. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)
- g. Komite Human Capital (HC)
- h. Komite Produk

Sejalan dengan terbitnya POJK 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi, BRI kemudian membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. Satuan ini dibentuk untuk membangun sinergi dan aliansi bisnis yang kuat antara BRI dengan Entitas Perusahaan Anak.

Organ tata kelola di BRI semakin lengkap setelah POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik diberlakukan per 1 Januari 2019.

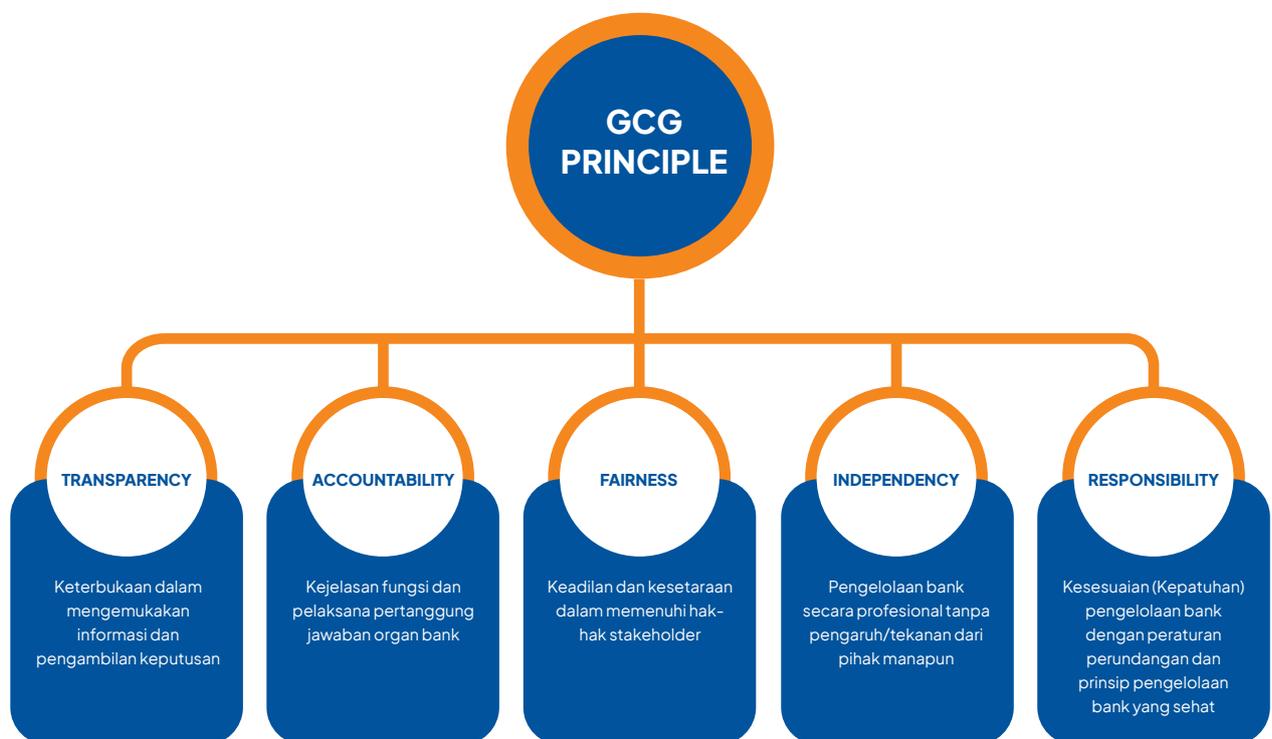
Pada tahun 2021, BRI membentuk struktur Tata Kelola LST untuk memonitor secara langsung kinerja dan pengungkapan LST perusahaan serta membentuk satu komite *Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee* melalui Surat Keputusan NOKEP : 657- DIR/PPM tanggal 29 Oktober 2021. Adapun struktur organisasi Tata Kelola LST sesuai dengan Surat Keputusan NOKEP: 618- DIR/PPM/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:





Prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan

BRI menerapkan prinsip-prinsip GCG guna meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan dalam rangka tata kelola yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:



Perumusan prinsip-prinsip GCG untuk mendukung aktivitas usaha berkelanjutan BRI dijabarkan sebagai berikut:

Transparansi

Bank mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

Akuntabilitas

- Bank menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan jangka pendek yang dipertanggungjawabkan kepada *shareholders* dan *stakeholders*.
- Bank menyampaikan laporan kepada otoritas pengawas Bank dan *stakeholders* lainnya sesuai ketentuan berlaku.

- Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan organisasi perusahaan serta jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi dan misi Bank.
- Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam RUPS.
- Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan organ perusahaan serta jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi dan misi Bank.
- Bank memastikan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- Bank memastikan adanya struktur, sistem dan SOP yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi dan misi Bank.
- Bank memiliki sistem pengendalian internal yang efektif

Tanggung Jawab

- Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal Bank.
- Bank memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam
- Bank bertindak sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*) melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan

Independensi

- Bank menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga bertindak objektif.
- Bank melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran dan Kesetaraan [F.18]

- Bank memberikan perilaku yang wajar dan setara kepada stakeholders sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Bank.
- Bank memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta adanya akses keterbukaan informasi.

BRI juga terus berkomitmen menerapkan GCG yang mampu memberikan dampak positif dalam pencapaian kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Tujuan penerapan GCG adalah untuk: [E.3]

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan melalui kinerja yang signifikan.
2. Memberikan pedoman bagi seluruh insan BRI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi Perusahaan.
3. Memberikan kepercayaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan bahwa Perusahaan dijalankan dan diawasi secara profesional.
4. Mendukung penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
5. Mewujudkan terciptanya *good corporate citizen*.



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Menguukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Pendelegasian Wewenang

[GRI 102-18] [GRI 102-19] [GRI 102-20] [GRI 102-26]



BRI berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan sosial dan perlindungan atas lingkungan hidup melalui pengembangan sistem keuangan berkelanjutan yang stabil dan inklusif. BRI telah menuangkan rencana tersebut ke dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) jangka pendek dan jangka panjang terkait ketiga topik keberlanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Keuangan Berkelanjutan merupakan salah satu bentuk dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Bentuk dukungan BRI dalam mendukung terciptanya keuangan keberlanjutan di Indonesia adalah dengan terlibat menjadi salah satu First Mover on Sustainable Finance dan anggota Inisiatif Keuangan Berkelanjutan di Indonesia (IKBI).

Dalam meningkatkan kinerja ekonomi, BRI berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial yaitu menerapkan konsep 3P (*Profit, People, Planet*) serta LST secara komprehensif. Perusahaan telah membentuk ESG Desk untuk memonitor topik ekonomi, lingkungan, dan sosial yang secara umum melekat pada Direksi dan Komisaris serta melekat pada Divisi Kepatuhan. ESG Desk kemudian melaporkan hasil kinerjanya langsung kepada Direksi dan Komisaris. [GRI 102-19, 102-20] [C.1]

Wewenang untuk menerapkan Konsep 3P dan LST didelegasikan kepada beberapa eksekutif senior oleh masing-masing dewan komisaris dan direksi sesuai dengan komite-komite di bawahnya. Pendelegasian wewenang untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial dari Direksi dan Komisaris melekat pada tugas dan tanggung jawab unit-unit di bawahnya. Proses pendelegasian tanggung jawab tersebut diberikan melalui SK Direksi. [GRI 102-18] [GRI 102-19]

Adapun Kewenangan pada struktur tata Kelola tertinggi adalah sebagai berikut: [\[E.1\]](#)

1. Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada Anggaran Dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

- Memberikan persetujuan atas kebijakan keuangan berkelanjutan yang merupakan salah satu kebijakan spesifik bank.
- Memberikan persetujuan terhadap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
- Memberikan persetujuan terhadap Laporan Keberlanjutan.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan

2. Direksi

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan program Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada Anggaran Dasar Bank serta peraturan perundangundangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

- Menyusun dan mengusulkan rancangan kebijakan keuangan berkelanjutan berikut perubahannya kepada Dewan Komisaris.
- Menyusun dan mengusulkan RAKB kepada Dewan Komisaris.

- Menyusun dan mengusulkan Laporan Keberlanjutan kepada Dewan Komisaris.
- Mengkomunikasikan RAKB kepada Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di bank.
- Memantau satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur keuangan berkelanjutan terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya.
- Membentuk satuan kerja khusus di Kantor Pusat yang bertanggung jawab terhadap penerapan keuangan berkelanjutan di bank.
- Mengawasi kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan.
- Mengawasi Unit Bisnis dan Unit Kerja Operasional agar memiliki pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap penerapan keuangan berkelanjutan di unit kerjanya
- Mengawasi kebijakan dan prosedur keuangan berkelanjutan agar sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi bank serta sesuai dengan perkembangan Keuangan Berkelanjutan.
- Mengawasi program pengembangan kapasitas internal yang berkaitan dengan Keuangan Berkelanjutan secara berkala.
- Mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko sebagai tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi terkait penerapan keuangan berkelanjutan.



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Menguatkan Ketahanan Tata Kelola

Konsultasi Pemangku Kepentingan

[GRI 102-21] [GRI 102-29] [FS2] [E.4] [FS12]



Upaya BRI dalam mencapai keuangan berkelanjutan adalah dengan mengidentifikasi dan mengelola ketiga topik keberlanjutan yaitu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola bersama dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Pencapaian keuangan berkelanjutan harus dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, di mana pencapaian-pencapaian pada tahun 2021 akan dituangkan pada Laporan Keberlanjutan BRI 2021. Sedangkan untuk strategi dan target keberlanjutan sendiri dituangkan pada RAKB Perusahaan.

Menilai dari tingkat pemahaman dan pengetahuan terkait keberlanjutan yang terbatas, konsultasi tersebut tidak hanya dilakukan dengan pemangku kepentingan internal namun juga dengan pemangku

kepentingan eksternal yang memiliki latar belakang pengalaman atau keahlian dalam bidang berkaitan dengan keberlanjutan.

Konsultasi dengan pihak eksternal dilakukan dengan diskusi terbuka minimal sekali dalam setahun oleh badan tata kelola tertinggi yang didelegasikan kepada ESG Desk. Umpan balik dari proses konsultasi tersebut kemudian akan dilaporkan kepada dewan Direksi untuk kemudian didiskusikan dalam rapat. Hasil diskusi tersebut menentukan topik keberlanjutan yang material bagi BRI yang kemudian dituangkan pada RAKB BRI dan Laporan Keberlanjutan BRI 2021. Konsultasi ini dilakukan dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam isu LST dengan tujuan untuk menentukan topik-topik materialitas yang tepat bagi

Perusahaan, antara lain adalah dengan melibatkan lembaga rating LST, media, konsultan CSR, Lembaga Swadaya Masyarakat dan konsultan *Sustainability Report*. [GRI102-29] [FS2]

Selain konsultasi dengan pemangku kepentingan eksternal, Perusahaan juga melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan internal yaitu melalui diskusi antar badan tata kelola tertinggi atau *senior management*. Selain itu, setiap level manajemen juga dapat mengemukakan pendapat mereka terkait topik-topik keberlanjutan melalui kuesioner yang dibagikan minimal sekali dalam setahun dan dikumpulkan serta dievaluasi oleh ESG Desk sebagai delegasi dari badan tata kelola tertinggi. Konsultasi dengan pekerja juga dilakukan melalui *morning briefing* tiap divisi dan rapat monitoring bulanan serta wawancara langsung terkait dengan topik-topik materialitas tahunan untuk tujuan pelaporan. Konsultasi dengan Pemegang Saham dilakukan secara rutin setiap bulan melalui rapat kinerja dan RUPS, maupun melalui koordinasi setiap saat.

Konsultasi yang telah dilakukan dengan pemangku kepentingan dan badan tata kelola tertinggi mengenai isu LST bertujuan untuk menghasilkan RAKB yang komprehensif dan efektif serta dapat dikomunikasikan secara lengkap, akurat dan seimbang kepada seluruh pengguna informasi dan laporan dalam bentuk *Assured Sustainability Report* BRI. Dalam pembuatan RAKB, peran badan tata kelola adalah untuk mengidentifikasi dan mengelola topik ekonomi serta dampak, risiko, peluang, dan uji tuntas. Peran yang dijalankan adalah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program keuangan berkelanjutan. Program keuangan berkelanjutan yang dimaksud adalah dengan mengimplementasikan praktik-praktik keuangan ramah lingkungan dengan mengutamakan transaksi keuangan untuk proyek bisnis yang ramah lingkungan. Penanggung jawab program ini terdiri dari beberapa unit kerja yaitu sebagai berikut: [FS3]

- **Satuan Kerja Manajemen Risiko**
 Bertugas dan bertanggung jawab sebagai Pemantau penerapan setiap pelaksanaan manajemen risiko dan menjadi koordinator pengawasan kebijakan keuangan berkelanjutan
- **Satuan Kerja Kepatuhan**
 Bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan dan prosedur, serta kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait dengan Keuangan Berkelanjutan dan memastikan penerapan keuangan berkelanjutan tetap berjalan dengan baik di setiap unit kerja baik unit bisnis maupun unit kerja operasional.
- **Satuan Kerja Audit Internal**
 Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki garis komunikasi dengan Komite Audit. Audit Internal bertugas sebagai penyedia *assurance* dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan cara melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern dan proses tata kelola perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Bank.
- **Sekretariat Perusahaan**
 Bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan berperan untuk membantu Dewan Komisaris serta Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan serta sebagai penghubung dan pengelola komunikasi baik antara perusahaan kepada pihak internal maupun pihak eksternal diantaranya pemegang saham, regulator serta pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*).
- **Divisi Hubungan Investor**
 Berperan aktif dalam pengelolaan hubungan dan komunikasi dengan investor serta turut memonitor nilai-nilai LST sebagai salah satu fokus dari pemangku kepentingan yang lebih luas.



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Menguatkan Ketahanan Tata Kelola

Komposisi Badan Tata Kelola Tertinggi dan Komitennya

[GRI 102-22] [GRI 102-24]

Komposisi badan tata kelola Perusahaan mengikuti kebijakan keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi BRI mengacu pada rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan bahwa komposisi Dewan Komisaris dan Direksi wajib memperhatikan keragaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi Dewan Komisaris dan Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Dewan Komisaris merupakan perwakilan dari pemegang saham, mempunyai masa jabatan satu periode ditetapkan selama 5 tahun dan untuk masa jabatan Dewan Direksi sendiri ditetapkan 5 tahun namun dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPSLB. Setelah masa jabatannya berakhir, tidak terdapat batasan periode jabatan. [GRI 102-24]

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi berasal dari beragam latar belakang pendidikan, pengetahuan, keahlian, jenis kelamin, usia, ras, dan pengalaman sebagaimana tertuang pada profil

masing-masing anggota Dewan Komisaris, yaitu dari kalangan praktisi perbankan, cendekiawan, akademisi, birokrasi dan mereka yang pernah berkarir sebagai pengambil keputusan/ kebijakan di bidang regulasi maupun korporasi yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Informasi komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya dapat merujuk pada Laporan Tahunan BRI 2021 halaman 719-721.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BRI tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, dengan anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Pengendali serta hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi independensinya. Demikian pula tidak terdapat rangkap jabatan untuk setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung. Badan tata kelola tertinggi merupakan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemilihan RUPS sebagai Badan tertinggi badan tata kelola mengingat bahwa peran pemangku kepentingan yang lebih luas dibutuhkan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya tata kelola perusahaan. RUPS bukan merupakan pejabat eksekutif dalam organisasi. [GRI 102-23] [GRI 102-24] [GRI 102-25]

Prosedur Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

[GRI102-24]



Kriteria, prosedur pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris BRI ditetapkan berdasarkan POJK No. 34/ POJK.04/2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, POJK No. 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK No. 27/03.POJK/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, ketentuan internal Dewan Komisaris BRI Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: 07-KOM/BRI/07/2015 tentang Kebijakan Nominasi Anggota Komisaris dan Direksi serta ketentuan perundang - undangan lain yang berkaitan.

Berdasarkan praktik tata kelola yang baik BRI memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR). Salah satu fungsi dari KNR adalah memberikan rekomendasi

atau mengusulkan calon yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Calon Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti proses evaluasi.

Keragaman, kemandirian dan keahlian tentunya menjadi pertimbangan dalam proses nominasi ini. Dewan Komisaris harus tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris Bank sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Kualifikasi lain adalah memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Bank, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. [GRI 102-25]

Selanjutnya, Dewan Komisaris memutuskan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam rapat Dewan Komisaris yang sekaligus sebagai dasar rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk selanjutnya di sampaikan dalam RUPS. RUPS akan menetapkan Calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang terpilih.

Calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang terpilih wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatuhan (fit and proper test) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/ POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat oleh RUPS namun belum dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK, maka yang bersangkutan belum memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota Dewan Komisaris.

Anggota Direksi BRI yang telah lulus tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia atau OJK memiliki arti bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Pengungkapan terkait kebijakan nominasi perusahaan dapat merujuk pada laporan tahunan BRI 2021 pada halaman 658–663.

Peningkatan Kapasitas Badan Tata Kelola Tertinggi

[GRI102-27] [GRI103-3]

Dewan Komisaris dan Direksi harus senantiasa meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan kebutuhan operasional dan perkembangan perusahaan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi NOKEP S.43-DIR/SKP/01/2018 tentang Kebijakan Program Orientasi dan Pendidikan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Pada tahun 2021, realisasi program pengembangan kompetensi dan pelatihan bagi Dewan Komisaris terkait topik tata kelola, lingkungan dan ekonomi adalah sebagai berikut:

Tabel Program Pelatihan dan Perkembangan Dewan Komisaris 2021

Topik Pelatihan	Nama Peserta	Tanggal Pelatihan		Lokasi Pelatihan
		Mulai	Selesai	
<i>Training of Trainers on Climate Field School (CFS 2021)</i>	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	23 Agustus 2021	27 Agustus 2021	Jakarta
<i>Asset Liability Management in uncharted New Normal – Strategy & Optimization</i>	Kartika Wirjoatmodjo	26 Oktober 2021	26 Oktober 2021	Jakarta
Kepemimpinan di Masa Krisis	Ari Kuncoro, Nicolaus Teguh Budi Harjanto, Hadiyanto, Rabin Indrajad Hattari, Hendrikus Ivo, Dwi Ria Latifa, R. Widyo Pramono, Zulnahr Usman	25 Februari 2021	25 Februari 2021	Jakarta
Pelatihan Investasi Forensik	Rofikoh Rokhim	10 Maret 2021	12 Maret 2021	Jakarta
Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris Dalam Menjaga Kepatuhan Bank menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i>	Rofikoh Rokhim, Hendrikus Ivo, Dwi Ria Latifa, R. Widyo Pramono	25 Maret 2021	25 Maret 2021	Jakarta
<i>Business Policy and Case Studies</i>	Rofikoh Rokhim	22-Apr-21	22-Apr-21	Jakarta
<i>Integrated Auditing for The Public Sector</i>	Rofikoh Rokhim	22 Juni 2021	22 Juni 2021	Jakarta
<i>Financial Consumer Protection Linked Theories & Evindence to Policy Practice</i>	Rofikoh Rokhim	6 Agustus 2021	7 Agustus 2021	Jakarta
<i>How to Thrive Your Business During Pandemic</i>	Rofikoh Rokhim	19 Agustus 2021	19 Agustus 2021	Jakarta
Mencegah korupsi korporasi melalui <i>bisnis judgement rule</i>	Rofikoh Rokhim	27 Agustus 2021	27 Agustus 2021	Jakarta
Pentingnya Sertifikat Halal Bagi UMKM	Rofikoh Rokhim	14 Agustus 2021	14 Agustus 2021	Jakarta
Jurus Baru Manajemen Risiko Kredit selama Pandemi	Rofikoh Rokhim	7 Oktober 2021	7 Oktober 2021	Jakarta

			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Menguukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Topik Pelatihan	Nama Peserta	Tanggal Pelatihan		Lokasi Pelatihan
		Mulai	Selesai	
Pencegahan Korupsi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi dan Organ BUMN/D	Rofkoh Rokhim, Hendrikus Ivo, R. Widyo Pramono, Zulnahr Usman	3–Nov-21	3–Nov-21	Jakarta
<i>Leading Digital Business Transformation Program</i>	Rofkoh Rokhim	6–Nov-21	10–Nov-21	Lausanne - Switzerland
<i>Leading Digital Business Transformation Program</i>	Rofkoh Rokhim	25 Februari 2021	25 Februari 2021	Jakarta
Inovasi, Kolaborasi dan Transformasi Digital, Kunci Akselerasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	14–Sep-21	14–Sep-21	Jakarta
<i>Knowledge Sharing Program on Enhancing the Development of Small and Medium Industry</i>	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	13–Sep-21	17–Sep-21	Jakarta
<i>Webinar - InnoGram Series #2: Mengenal Konsep Product Development</i>	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	3 Agustus 2021	3 Agustus 2021	Jakarta
<i>Webinar - InnoGram Series #3: Mengenal Konsep UI/UX</i>	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	4 Agustus 2021	4 Agustus 2021	4 Agustus 2021
<i>Records and Archive Management: Documenting History of Nation</i>	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	9–Sep-21	9–Sep-21	Jakarta
<i>Integrated Governance Risk Management Compliance</i>	Dwi Ria Latifa	22–Apr-21	23–Apr-21	Jakarta
PSAK Terkini Sesuai Dengan Konversi IFRS	R. Widyo Pramono	15 Oktober 2021	15 Oktober 2021	Jakarta
Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	Heri Sunaryadi	18 Oktober 2021	29 Oktober 2021	Jakarta
Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	Heri Sunaryadi	2–Nov-21	12–Nov-21	Jakarta

BRI juga menyertakan Direksi untuk meningkatkan kompetensi mereka, baik dalam penerapan keuangan berkelanjutan maupun kinerja keberlanjutan yang mencakup topik-topik ekonomi, sosial dan lingkungan, yaitu melalui pelatihan dan keterlibatan aktif BRI pada kegiatan IKBI *CEO Dialogue on Sustainable Finance*. Perusahaan juga mendorong pejabat Perusahaan dalam berbagai tingkat jabatan, untuk meningkatkan kompetensi masing-masing dalam penerapan keuangan berkelanjutan dan kinerja keberlanjutan pada tahun 2021. [F.22][FS4]

Evaluasi Kinerja Badan Tata Kelola Tertinggi

[GRI 102-28] [GRI 103-3]



Proses untuk mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi sehubungan dengan tata kelola topik ekonomi, lingkungan, dan sosial adalah dengan *self-assessment* atau swa penilaian sehingga tidak dilakukan oleh pihak ketiga, dengan frekuensi minimal sekali setahun.

Proses penilaian *self-assessment* tata kelola BRI melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud. Dimana penilaian tersebut mengacu pada Peraturan OJK No.55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka serta Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, salah satu poin penilaian tingkat kesehatan Bank adalah penilaian sendiri atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada bank. Proses penilaian *self-assessment* tata kelola BRI melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud. Untuk kriteria, skor penilaian, serta rekomendasi dan tindak lanjutnya dapat merujuk pada *Annual Report* BRI pada halaman 288.



Tantangan dan Peluang dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan

[E.5] [GRI 102-30] [GRI 102-31] [GRI 102-34]

Penerapan Keuangan Berkelanjutan tidak lepas dari tantangan baik internal maupun eksternal. Tantangan internal di antaranya:

- a. Dibutuhkan upaya ekstra dan waktu yang tidak singkat untuk melatih kompetensi Pekerja yang jumlahnya sangat besar, dengan struktur organisasi dan jaringan unit kerja yang tersebar luas.
- b. Adanya keterbatasan dalam sistem otomasi terintegrasi untuk memantau dan melakukan pelaporan terhadap penerapan keuangan berkelanjutan

Strategi BRI dalam menghadapi tantangan internal adalah dengan meningkatkan pelatihan yang konsisten dan terstruktur, dalam topik-topik keberlanjutan untuk para Pekerja di kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang maupun unit kerja lainnya. Pelatihan ini berupa *e-learning*, video, maupun pelatihan online mengundang para pakar dan pembicara eksternal. Mengenai sistem otomasi yang terintegrasi, BRI mengembangkan sistem yang dapat mempermudah penerapan dan pelaporan keuangan berkelanjutan.

Tantangan eksternal di antaranya:

- a. Berbagai regulasi terkait keuangan berkelanjutan yang diluncurkan mempengaruhi pasar, yang pada gilirannya menimbulkan kendala dalam penerapan keuangan berkelanjutan.
- b. Kemajuan teknologi digitalisasi menuntut dunia perbankan untuk terus beradaptasi, sehingga meningkatkan risiko disrupsi.
- c. Terbatasnya panduan dan informasi yang jelas untuk setiap industri dalam aspek keuangan berkelanjutan memberi tantangan dalam implementasi keuangan berkelanjutan.
- d. Pandemi Covid-19 yang tentunya menyebabkan disrupsi ekonomi dalam skala global, memperlambat proses kerja dan mengganggu kelancaran pembiayaan maupun pendanaan BRI.

BRI berupaya untuk mengantisipasi tantangan yang timbul dari luar melalui penerapan manajemen risiko dan identifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi akibat faktor-faktor eksternal tersebut.

Segmen Bisnis Kecil dan Menengah optimis untuk dapat menciptakan banyak peluang bisnis dan

mendukung pengembangan bisnis dengan kualitas kredit yang tetap terjaga. Dalam memberikan fasilitas pinjaman, Bisnis Korporasi Non-BUMN juga berupaya mengoptimalkan peluang dari sisi *value chain business* dan *cross selling*, sehingga segmen Bisnis Kecil dan Menengah atau pun Bisnis Konsumer BRI dapat turut bertumbuh. Segmen agribisnis dan non-agribisnis merupakan target pasar dari Bisnis Korporasi Non-BUMN.

Pengembangan kredit agribisnis memprioritaskan pembiayaan pada komoditi ekspor yang memiliki *competitive advantage* dan *multiplier effect* kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sedangkan segmen non-agribisnis menyalurkan kredit ke sejumlah industri seperti industri pengolahan, infrastruktur dan utilitas, serta industri minyak dan gas.

Pertumbuhan mikro BRI akan mengikuti stimulus pemerintah, sejalan dengan fungsi BRI untuk menciptakan nilai sosial dan ekonomi. Program ini juga membuka peluang bagi BRI untuk dapat melakukan penetrasi ke pasar *ultra-micro* di Indonesia yang mampu memberikan imbal hasil yang bersaing dan risiko yang terukur.

BRI membuka peluang bisnis, kerjasama dan pendanaan terkait *green fund* baik dengan Lembaga nasional maupun internasional. BRI yakin bahwa strategi yang tepat dalam merespon peluang dan risiko yang muncul akan mampu mempertahankan bisnis dan senantiasa tumbuh secara berkelanjutan. Dalam menyediakan jasa dan produk perbankan, perusahaan dituntut memperhatikan protokol kesehatan, keselamatan dan keamanan yang berlaku.

BRI telah mengubah kesulitan menjadi peluang mengembangkan usaha dan menjadikan kreativitas dalam mengoptimalkan ekosistem digital sebagai

ajang unjuk ketangguhan dalam mengatasi seluruh tantangan berusaha.

Dalam mengkaji efektivitas proses manajemen risiko terkait topik lingkungan, sosial dan tata kelola, badan tata kelola tertinggi BRI diwakili ESG Desk di bawah Direktorat Kepatuhan. Selama periode pelaporan, terdapat satu isu penting yang disampaikan kepada badan tata kelola tertinggi. BRI menyadari bahwa data terkait LST sangat penting bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham. Oleh karena itu, BRI memandang perlu dilakukannya peningkatan kualitas pengungkapan informasi pada laporan keberlanjutan dengan menggunakan standar global yang berlaku seperti penyusunan section khusus terkait TCFD Report dan penyesuaian pengungkapan informasi LST dengan kriteria *Dow Jones Sustainability Indices*. Isu penting ini telah disampaikan kepada badan tata kelola tertinggi melalui perwakilan divisi terkait. Perwakilan divisi mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan menyampaikan masukan tersebut secara langsung kepada badan tata kelola tertinggi dalam forum khusus. [GRI102-18] [GRI102-33] [I02-34]

BRI telah menyelenggarakan Rapat Komite ESG untuk pertama kalinya pada bulan Desember 2021 dan membahas beberapa hal, di antaranya:

- Update informasi dan isu terkini yang sedang berkembang terkait LST kepada Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif BRI.
- Penetapan aspirasi ESG BRI serta perencanaan penyusunan ESG Roadmap BRI

BRI telah menyadari bahwa isu LST telah menjadi salah satu pertimbangan bagi pemangku kepentingan, dan menunjukkan keseriusannya untuk turut andil dalam pencapaian TPB pada tahun 2030.



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Menguukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Potensi Dampak Produk Keuangan Berkelanjutan [F.28]



BRI menyadari pentingnya menerapkan inisiatif keuangan berkelanjutan untuk mendukung pemerintah mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan bersama-sama dunia global membangun kehidupan yang lebih baik bagi generasi masa depan. Sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan, BRI memperhatikan potensi untuk meningkatkan portofolio kredit yang berwawasan LST, yang berdampak positif untuk mendukung pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejak tahun 2017 BRI telah memiliki ketentuan khusus terkait kredit pada sektor kelapa sawit yang tertuang dalam Surat Edaran No 24 -DIR/DMR/04/2017

tentang Kebijakan Manajemen Risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) Kelapa Sawit.

Penerapan keuangan berkelanjutan tidak lepas dari risiko yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja BRI bila tidak dicermati. Salah satunya, kredit berwawasan LST berisiko menyebabkan kenaikan *Non-Performing Loan* (NPL) bila tidak *feasible* (layak, memungkinkan). Oleh karena itu, BRI menerapkan pemeriksaan dan perhitungan yang teliti, serta menjadikan prosedur kredit sebagai acuan untuk mengaplikasikan proses manajemen risiko yang lengkap pada setiap produk pendanaan, termasuk kredit berwawasan LST. [FS13][FS14][FS3]

Kebijakan Remunerasi

[GRI 102-35] [GRI 102-36] [GRI 102-37]

BRI telah memiliki kebijakan tata kelola remunerasi yang telah diatur oleh regulator sebagai pemangku kepentingan perusahaan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015. Kebijakan tata kelola remunerasi BRI diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi R.43-KOM/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan surat Nomor:

S-421/MBU/D5/06/2020 sebagai berikut: perihal Kebijakan Tata Kelola Remunerasi BRI. Peninjauan terhadap Tunjangan Premium secara variabel apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan tingkat kemahalan di setiap wilayah dan kemampuan Perusahaan. Perusahaan Anak memiliki Kebijakan Remunerasi terpisah dan disusun sendiri oleh Perusahaan Anak. Informasi terkait remunerasi dapat dilihat pada Laporan Tahunan BRI 2021 halaman 658-663.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris* [GRI 102-35]

Jenis Remunerasi/fasilitas	Keterangan
Honorarium dan Tantiem	Komisaris Utama 50% dari Gaji Direktur Utama Wakil Komisaris Utama 95% dari Honorarium Komisaris Utama Komisaris 90% dari Honorarium Komisaris Utama
Tunjangan Transportasi	Tunjangan transportasi diberikan setiap bulan sebesar 20% dari honorarium per bulan masing-masing anggota Dewan Komisaris
Tunjangan Hari Raya	1 (satu) kali honorarium
Asuransi Purna Jabatan	Diiikutsertakan dalam Program Asuransi Purna Jabatan. Maksimum premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium per Tahun
Tunjangan lain	Keanggotaan <i>Club</i> dan Pakaian <i>Corporate</i>
Fasilitas	Kesehatan, Bantuan Hukum dan Fasilitas lain

Kebijakan Remunerasi Direksi* [GRI 102-35]

Jenis Remunerasi/fasilitas	Keterangan
Honorarium dan Tantiem	Honorarium dan Tantiem Besarnya Gaji dan Tantiem Direksi ditetapkan proporsional terhadap gaji dan tantiem Direktur Utama, yaitu Wakil Direktur Utama sebesar 95%, gaji Direktur yang membidangi sumber daya manusia sebesar 90% dari Direktur Utama dan gaji Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
Tunjangan Hari Raya	1 (satu) kali honorarium
Asuransi Purna Jabatan	Diiikutsertakan dalam Program Asuransi Purna Jabatan. Maksimum premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium per Tahun
Tunjangan lain	Keanggotaan <i>Club</i> , Pakaian <i>Corporate</i> dan Tunjangan Komunikasi
Fasilitas	Kesehatan dan Bantuan Hukum

* Informasi lebih detail terkait remunerasi dapat merujuk pada Laporan Tahunan BRI 2021 halaman 658-663

Tanggung jawab dalam kebijakan remunerasi dipegang oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) yaitu dengan tanggung jawab mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Proses perancangan remunerasi, KRN meminta Pihak Konsultan Independen yang tidak memiliki hubungan lain dengan Perusahaan

untuk memberikan rekomendasi remunerasi yang independen dan adil. Rekomendasi oleh Pihak independen ini akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris yang kemudian akan diusulkan dan ditetapkan pada RUPS yang melibatkan para pemegang saham.

Sesuai Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Selanjutnya berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang tersebut, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan kewenangan RUPS dimaksud dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: No.PER-13/MBU/09/2021, komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari: gaji, tunjangan, fasilitas dan tantiem.

BRI telah menerapkan kebijakan sistem remunerasi di luar Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan kebijakan internal BRI yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi NOKEP : 208-DIR/SDM/08/2011 tentang Pengupahan Pekerja, baik dari sisi penyesuaian pemberian gaji tahunan maupun dalam sistem pemberian bonus kepada Pekerja. Strategi remunerasi tetap memperhatikan *effective best practice* di industri perbankan dan perbandingan terhadap *market*. Perusahaan telah rutin mengikuti setiap tahun survei mengenai *Total Reward Survey* perbankan melalui konsultan independen yang memang profesional dan telah diikuti oleh mayoritas perbankan di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bahan referensi dan masukan bagi penyesuaian remunerasi di BRI.

Salah satu prinsip remunerasi perusahaan adalah kompetitif secara eksternal dimana remunerasi diberikan pada tingkat yang kompetitif terhadap industri perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut,

BRI bekerja sama dengan *Willis Towers Watson* yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *salary survey* sesuai dengan permintaan perusahaan mengenai kebijakan remunerasi. BRI tidak memiliki hubungan lain dengan konsultan remunerasi. Selain itu, Perusahaan juga selalu memastikan telah memenuhi seluruh aturan yang berlaku yang terkait dengan penerapan sistem remunerasi. [GRI102-36]

Dalam kebijakan remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) bertanggung jawab mengevaluasi kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. Komite Remunerasi dan Nominasi juga bertugas merumuskan kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pekerja secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

RUPS dapat menyetujui dan menetapkan struktur dan besaran remunerasi tersebut dengan persyaratan kuorum kehadiran pemegang saham lebih dari 50% dan persetujuan oleh lebih dari 50% pemegang saham yang hadir. Dalam hal RUPS tidak menyetujui usulan tersebut, maka Dewan Komisaris dan Direksi akan menggunakan struktur dan besaran remunerasi yang sama seperti tahun buku sebelumnya. [GRI102-37]

Prosedur standar penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan sebagai berikut: [GRI 102-36]

- Dewan Komisaris meminta Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk menyusun rancangan usulan remunerasi.
- KRN meminta pihak independen untuk menyusun rancangan remunerasi.
- KRN mengusulkan kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi.
- Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
- RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Rencana Aksi Sebagai Bank Sistemik



Untuk mencegah, memulihkan dan/atau memperbaiki kondisi yang membahayakan kelangsungan bisnis BRI di dalam kondisi pandemi yang menekan perekonomian, BRI telah mempersiapkan analisis skenario yang dapat mengidentifikasi perubahan sistematis menggunakan *stress testing* yang dibagi 2 bagian skenario yaitu skenario *Idiosyncratic* dan skenario *Market-wide*.

Rencana aksi yang dilakukan BRI, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, POJK Nomor 2/POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*, dan POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik. BRI merupakan salah satu Bank Sistemik yang telah Menyusun Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*), dan Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) telah memuat hal, yang telah disahkan dalam POJK. [\[SASB FN-CB-550a.1\]](#) [\[SASB FN-CB-550a.2\]](#)

Skenario *Idiosyncratic*, BRI mengembangkan skenario terkait konsentrasi pada obligor serta industri yang ada. Skenario *Market-wide*, BRI mengembangkan skenario berdasarkan kondisi pandemi Covid-19 sedangkan skenario kombinasi merupakan skenario terburuk yang berasal dari kombinasi *idiosyncratic* dan *market wide*. Dalam 3 (tiga) kondisi skenario *stress test* tersebut, BRI menentukan opsi pencegahan, pemulihan dan perbaikan yang perlu dilakukan hingga indikator-indikator seperti likuiditas, rentabilitas, permodalan dan kualitas aset kembali menurun di angka di bawah *trigger level*. [\[SASB FN-CB-550a.1\]](#) [\[SASB FN-CB-550a.2\]](#)

Pada tahun 2021, tidak terdapat perubahan signifikan terhadap *trigger level* pada tahap evaluasi dan pengkinian. Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah ditinjau sudah mendapat persetujuan oleh Dewan Komisaris dan OJK sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam POJK. [\[SASB FN-CB-550a\]](#)



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Menguukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Laporan Assurance Independen [GRI 102-56]



INDEPENDENT ASSURANCE STATEMENT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sustainability Report 2021

Statement No: 005/IAS/CBC/II/2022

Type 2, Moderate Level

Scope of Engagement in Assurance

CBC Global Indonesia ("CBC Global Indonesia", "us" or "we") were commissioned by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("bank BRI") with the objective to provide assurance of bank BRI's 2021 Sustainability Report (the "Report") in relation with accordance to GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) and the adherence to AA1000 Accountability Principles (2018) with assurance over the Subject Matter presented in the Report, for the reporting year ended 31st December 2021. **This statement is intended to be used by stakeholders & management of bank BRI.**

The **scope and limitation** of our work is restricted to the following areas:

1. Subject Matter

- General Disclosure
- Direct & Indirect Economic
- Procurement Practice
- Anti-corruption
- Material & Energy
- Water & Effluent
- Emission
- Employment
- Training & Education
- Non-Discrimination
- Child-Labor
- Forced-or-Compulsory-Labor
- Local Communities
- Customer Privacy

2. AA1000 Principles (2018)

Our assurance engagement was planned and performed to meet the requirements of a **Type 2 "moderate level"** of assurance as defined by AA1000 Assurance Standard (AA1000AS) v3 to evaluate the nature and extent of bank BRI's adherence to all four AA1000 AccountAbility Principles (2018): Inclusivity, Materiality, Responsiveness and Impact, where sufficient evidence has been obtained to support our statement such that the risk of our conclusion being in error is reduced, but not reduced to very low, but not zero.

We have not performed any work, and do not express any conclusions, on any other information outside of the Subject Matter that may be published in the Report or on bank BRI's website for the current reporting period or for previous periods and assumed that the



financial data and figures provided by bank **BRI** has been audited by independent parties therefore, presentation of financial data and figures in the report NOT within the scope of assurance.

Responsibilities of the Management of bank BRI

The Management of bank **BRI** has sole responsibility for preparing and presenting the Subject Matter in accordance with GRI Standard and preparing the Report in adherence to the AA1000 Principles (2018). Bank **BRI**'s responsibilities also include maintaining effective internal controls over the information and data, resulting in the preparation of the Subject Matter in a way that is free from material misstatements.

Responsibilities, Competencies and Independency of CBC Global Indonesia

Our responsibility is to plan and perform our work to obtain assurance over whether the Subject Matter has been prepared in accordance with the GRI Standard and to report to bank **BRI** in the form of an independent assurance conclusion, based on the work performed and the review progress. We must also express a conclusion over whether the Report adheres to the AA1000 Principles (2018) and comment on the nature and extent of each Principle individually. All this engagement was carried out by an independent team of sustainability assurance professionals whose already obtained the **Certified Sustainability Report Assurer (CSRA) and any relevant certifications.**

CBC Global Indonesia is bounded by rules of conduct and professional practice relating to independence and quality overseen by AccountAbility (www.accountability.org/standards/licensing/AA1000 as licensed-providers) and has established policies and procedures that are designed to ensure that our team maintain independence and integrity. We had no financial interest in the operation of bank **BRI** other than for the assessment and assurance of this report. We don't accept or assume responsibility (legal or otherwise) or accept liability for or in connection with any other purpose for which it may be used, or to any person by whom the independent assurance opinion statement may be read.

Methodology

We conduct the following assurance procedures and activities:

- Pre-engagement to ensure the independence and impartiality of the assurance team.
- Kick-off meeting and initial analysis of the report draft.
- Review, assess and evidence the reliability and quality of sustainability performance and disclosed information as specified in the Report content for the reporting period of 1st of January up to 31st of December 2021.



- Evaluate the adherence of report content, disclosure and presentation **against the criteria of standard, principles, and indicators using references from AA1000AS v3, AA1000AP (2018) (AccountAbility Principles), GRI Standards, POJK51, SEOJK 16, SASB and TCFD.**
- Adopt IPCC Guidelines for calculation methodology of energy used and emission.
- Asses indicators data and traced back data to the sources.
- Conduct in-depth interview on compliance, governance, risk management, business continuity management topics with the representatives of the relevant functions/divisions of the bank BRI.
- Discuss and analysis data and reports with management and data contributor by digital platform.

Finding and Conclusions

From the assurance program and the evidence, we have obtained, a detailed review against the AA1000 AccountAbility Principles of Inclusivity, Materiality, Responsiveness and Impact, the GRI Standards, POJK51, SEOJK 16, SASB, and TCFD is set out below:

INCLUSIVITY

An assessment was made to investigate the engagement of all key stakeholders within the company. The presentation of stakeholder's inclusivity in the report is fairly identified and covers all bank BRI's inclusivity material issues. The stakeholder's engagement has been held through communication based on various methods and approaches in a pandemic situation with the contributions of all key stakeholders includes their internal and external stakeholders to develop an accountable and strategic sustainability topic.

MATERIALITY

An assessment was made to investigate the material information disclosed by the company. The report fairly covers the organization's material issues by using materiality matrix and boundary mapping through the stakeholder's inclusivity process. The materiality topics shows in the report provide a fair and sufficient information and aligned with risk management within the company which enables its stakeholders to make a professional judgment about bank BRI's performance and management.

RESPONSIVENESS

An assessment was made to investigate the transparency act of the company on material sustainability topics and their related impacts. The report covers bank BRI's responsiveness issues. All the information related to the responses from management to its stakeholder's



inputs and complaints have been included in the report and any others company's mechanisms transparently and appropriateness the responses to a strategic stakeholder engagement management. Besides, the engagement with the Indonesia Sustainable Finance (IKBI) indicated the company's commitment towards sustainability issues.

IMPACT

The Report content discloses data and information indicating the impacts of the Company's decisions, activities, and services on the economy, environment, and society. An assessment was made to investigate the practice of the company to monitor, measure and be accountable for how their actions affect their broader ecosystems. In overall, disclosures of impacts in the Report content are rather balance and adequate with both metric and qualitative information. However, the Company still needs to integrate comprehensively the identified impacts into key management processes to conduct an impact assessment on the other stakeholders, including its organizational strategy, governance, goals, objectives, and operations.

GRI STANDARDS PRINCIPLES

The report has followed the comprehensive option of GRI Standards where all disclosure of each material topic is presented in the report. The disclosures of management approach for each material topic in general are fairly disclosed. The Management has applied the principles for defining the report's quality (balance, comparability, accuracy, timeliness, clarity, and reliability) and the principles for defining the report's content (stakeholder inclusiveness, sustainability context, materiality, and completeness) and supporting documents were adequately presented during the assurance program.

Adherence to POJK51, SEOJK16, SASB, AND TCFD

The report has followed or complied to all POJK 51 and SEOJK16 reporting guidelines. However, in terms of the adherence against SASB and TCFD, bank BRI still need to develop more policies and initiatives on environment concern. The company is advised to improve their risk and impact analysis on sustainability and also improve the assessment on high-risk lending sectors with negative impacts towards social and environment issues. Besides, the company should also present the sustainability matrix and target more comprehensively.

Opinion Statement

Our professional and certified team of sustainability report assurer has assured this report in accordance with the AA1000AP (2018), AA1000AS v3 and GRI Standards. From the review progress, we conclude that the bank BRI's Sustainability Report 2021 provides a fair view of the all the bank BRI's programs and performances during 2021. The extent to which the GRI Standards has been applied in the Report and conclude this report has been prepared in accordance with GRI Standards - Comprehensive Option.

			
Mendukung Kesejahteraan Pekerja	Memprioritaskan Nasabah	Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab	Menguukuhkan Ketahanan Tata Kelola



We conclude that the data in 2021 for all material topics performance indicators are fairly represented and there is nothing has come to our attention that would cause us to believe that bank BRI has not given the reliable data.

Recommendations

There are some suggested recommendations for the management of bank **BRI**:

1. Mapping the matrix with specific and clear targets and objectives of sustainability commitment especially on environment sustainability risk measurement and assessment; and
2. Maintaining a more strategic stakeholder engagement management in order to assess materiality topic.

For and on behalf of:

Jakarta, February 3rd, 2022



Dr. Ari Purwanti, Ak., CA., CSRA

Manager

PT. CBC Global Indonesia

Ruko Icon Business Park Blok M No.12
 BSD City, Tangerang, Indonesia 15345
 Tel: (62)(21) 87780058
 Email: services@cbcglobalindonesia.com

INDEKS POJK, GRI, SASB, SUSBA DAN TCFD

Referensi OJK dan Indeks Isi Standar GRI [GRI 102-55]

Referensi silang GRI Standard	Pengungkapan	Halaman	
GRI 101: Landasan 2016			
Pengungkapan Umum			
GRI 102: Pengungkapan Umum 2016	102-1	Nama Perusahaan	42
	102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa	42, 44
	102-3	Lokasi kantor pusat	42
	102-4	Lokasi operasi	42
	102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	42
	102-6	Pasar yang dilayani	42
	102-7	Skala organisasi	47
	102-8	Informasi karyawan	47, 48, 49
	102-9	Rantai pasokan	52, 53
	102-10	Perubahan signifikan	42, 52, 54
	102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan	90, 170, 173
	102-12	Inisiatif eksternal	10, 32, 54, 59, 60, 65
	102-13	Keanggotaan asosiasi	54
	102-14	Sambutan	10, 17, 25
	102-15	Dampak Utama, risiko dan peluang	17, 25, 90
	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	45, 46, 192
	102-17	Mekanisme untuk saran dan masalah etika	185, 192
	102-18	Struktur tata kelola	84, 102, 214, 219, 230
	102-19	Mendelegasikan wewenang	219
	102-20	Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan dan sosial	84, 219
	102-21	Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan	221
	102-22	Badan tata kelola tertinggi dan komitennya	223
	102-23	Ketua badan tata kelola tertinggi	223
	102-24	Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi	223, 224, 225
	102-25	Konflik kepentingan	223, 224
	102-26	Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai dan strategi	45, 65, 95, 219



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Mengukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Referensi silang GRI Standard	Pengungkapan	Halaman
	102-27 Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi	226
	102-28 Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	228
	102-29 Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan dan sosial	221, 222
	102-30 Keefektifan proses manajemen risiko	90, 195, 229
	102-31 Pengkajian topik ekonomi, lingkungan dan sosial	195, 196, 229
	102-32 Peran badan tata kelola dalam pelaporan keberlanjutan	30, 31, 33, 214
	102-33 Hal Kritis	171, 195, 230
	102-34 Sifat dan jumlah hal kritis	195, 229, 230
	102-35 Kebijakan remunerasi	232
	102-36 Proses untuk menentukan remunerasi	232, 233
	102-37 Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi	232, 233
	102-38 Rasio Kompensasi total tahunan	153
	102-39 Persentase kenaikan kompensasi	153
	102-40 Pemangku kepentingan	32, 39, 40, 41
	102-41 Perjanjian perundingan kolektif	47
	102-42 Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	39, 40, 41
	102-43 Pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan	39, 40, 41
	102-44 Topik utama dan Isu	39, 40, 41
	102-45 Entitas dalam laporan keuangan konsolidasian	33
	102-46 Menetapkan isi laporan dan Batasan	33, 34, 36
	102-47 Daftar topik material	35, 36, 38
	102-48 Penyajian kembali informasi	32, 42
	102-49 Perubahan dalam pelaporan	38
	102-50 Periode pelaporan	32
	102-51 Tanggal laporan terbaru	32
	102-52 Siklus pelaporan	32
	102-53 Kontak	32
	102-54 Kesesuaian dengan Standar GRI	32
	102-55 Indeks isi GRI	33, 240
	102-56 Assurance oleh pihak eksternal	33, 235
Kinerja Ekonomi		
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1 Penjelasan topik material dan batasannya	49
	103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya	49
	103-3 Evaluasi pendekatan manajemen	49
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	49, 51

Referensi silang GRI Standard	Pengungkapan		Halaman
	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	90
	201-3	Kewajiban Program Pensiun	167
	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	50
Dampak Ekonomi Tidak Langsung			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	50
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	50
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	50
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	89, 101, 121, 124, 125, 126
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	58, 59, 101, 123, 124, 132, 138, 142, 143
Praktik Pengadaan			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	52
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	52
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	52
GRI 204 : Praktik Pengadaan	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal	53
Anti-Korupsi			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	201
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	201
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	201
GRI 205 : Anti-Korupsi	205-1	Risiko terkait korupsi	201,202
	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi	52,156, 201, 210
	205-3	Kasus korupsi yang terkonfirmasi dan tindakan yang diambil	202,205
Energi			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	104
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	104
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	104
GRI 302 : Energi	302-1	Konsumsi energi didalam perusahaan	104,105
	302-2	Konsumsi energi diluar perusahaan	104,105
	302-3	Intensitas energi	104
	302-4	Pengurangan konsumsi energi	104, 105
	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	102, 105
Emisi			



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Mengukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Referensi silang GRI Standard	Pengungkapan		Halaman
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	104
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	104
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	104
GRI 305 : Emisi	305-1	Emisi GRK langsung	108
	305-2	Emisi GRK tidak langsung	108
	305-3	Emisi GRK tidak langsung lainnya	108
	305-4	Intensitas emisi GRK	108
	305-5	Pengurangan emisi GRK	108,109
	305-6	Emisi Zat perusak ozon (ODS)	107, 108, 109
	305-7	Nitrogen oksida (Nox), Sulfur oksida (Sox), dan emisi udara yang signifikan lainnya	108,109
Kepegawaian			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	146
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	146
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	146
GRI 401 : Kepegawaian	401-1	Pekerja baru dan perputaran pekerja	148, 149, 150, 151, 161, 162, 163
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu	162
	401-3	Cuti Melahirkan	163
Pelatihan dan Pendidikan			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	154
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	154
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	154
GRI 404 : Pelatihan dan Pendidikan	404-1	Pelatihan karyawan setahun	154,155
	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan	155,160, 167
	404-3	Persentasi karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir	154
Non Diskriminasi			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	146
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	146
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	146
GRI 406 : Diskriminasi	406-1	Insiden diskriminasi dan Tindakan perbaikan yang dilakukan	146,147
Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	146
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	146
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	146
GRI 407 : Berserikat dan Perundingan Kolektif	407-1	Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif	147

Referensi silang GRI Standard	Pengungkapan		Halaman
Pekerja Anak			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	146
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	146
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	146
GRI 408 : Pekerja Anak	408-1	Insiden Pekerja Anak	147
Kerja Paksa			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	146
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	146
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	146
GRI 409 : Kerja Paksa	409-1	Insiden Kerja Paksa	147
Masyarakat Lokal			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	118
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	118
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	128
GRI 413 : Masyarakat Lokal	413-1	Keterlibatan masyarakat lokal	121, 123, 124, 128
	413-2	Dampak negatif terhadap masyarakat lokal	128
Privasi Pelanggan			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	187
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	187
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	187
GRI 418 : Privasi Pelanggan	418-1	Pengaduan mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan	176,187

Referensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) [GRI 102-55]

Referensi SEOJK	Pengungkapan		Halaman
Surat Edaran No. 16/SEOJK.04/2021	A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	25
	B.1	Aspek Ekonomi	7, 47
	B.2	Aspek Lingkungan Hidup	6
	B.3	Aspek Sosial	6, 146, 147
	C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan	45, 219
	C.2	Alamat Perusahaan	42, 43
	C.3	Skala Usaha	42, 47, 48, 49, 147
	C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang dijalankan	42, 44
	C.5	Keanggotaan pada Asosiasi	54
	C.6	Perubahan organisasi bersifat signifikan	54
	D.1	Penjelasan Direksi	17, 25



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Mengukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Referensi SEOJK	Pengungkapan	Halaman
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan	214, 220
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan	214
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan	218
E.4	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan	39, 221
E.5	Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan	229
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan	46, 50
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi	49, 50
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan	49, 51
F.4	Biaya Lingkungan Hidup	125
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan	107, 183
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan	105
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan	102, 104
F.8	Penggunaan Air	106
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya	108
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan	110
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja	47, 147, 218
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa	147
F.20	Upah Minimum Regional	152, 153
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman	164
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pekerja	154, 155, 225, 227
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar	140
F.24	Pengaduan Masyarakat	187
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)	60, 129
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan	89, 114
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan	187
F.28	Dampak Produk/Jasa	231
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali	231
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	183
G.1	Verifikasi tertulis dari pihak independen	33
G.2	Lembar Umpan Balik	249
G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya	222

Referensi SEOJK	Pengungkapan	Halaman
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	32, 244

Referensi Sektor Jasa Keuangan [GRI 102-55]

Referensi	Pengungkapan	Halaman	
Keuangan	FS1	Kebijakan dengan komponen lingkungan dan sosial tertentu	52, 59, 65, 90, 95, 97, 210
	FS2	Prosedur untuk menilai dan menyaring lingkungan dan risiko sosial di lini bisnis	60, 65, 90, 93, 95, 96, 99, 221, 222
	FS3	Proses untuk memantau implementasi dan kepatuhan klien terhadap persyaratan lingkungan dan sosial yang termasuk dalam perjanjian atau transaksi	52, 53, 60, 89, 97, 99, 210, 211, 222, 231
	FS4	Proses untuk meningkatkan kompetensi staf untuk menerapkan kebijakan dan prosedur lingkungan dan sosial sebagaimana diterapkan pada lini bisnis	36, 65, 95, 99, 143, 147, 152, 154, 155, 157, 159, 165, 204, 210, 227
	FS5	Interaksi dengan klien/investasi/mitra bisnis mengenai risiko dan peluang lingkungan dan sosial	52, 96, 97, 99, 210, 211
	FS6	Persentase portofolio untuk lini bisnis berdasarkan ukuran wilayah tertentu (misalnya mikro/ukm/besar) dan berdasarkan sektor	55, 56, 57, 58, 61, 65, 135, 138, 142, 143, 195
	FS7	Nilai moneter produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan manfaat sosial tertentu untuk setiap lini bisnis yang dipecah berdasarkan tujuan	132, 134, 135, 136, 137
	FS8	Nilai moneter produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan manfaat lingkungan tertentu untuk setiap lini bisnis yang dipecah berdasarkan tujuan	98, 133
	FS9	Cakupan dan frekuensi audit untuk menilai implementasi kebijakan lingkungan dan sosial serta prosedur penilaian risiko	53, 59, 65, 90, 98, 210
	FS10	Persentase dan jumlah perusahaan yang dipegang dalam portofolio institusi tempat organisasi pelaporan berinteraksi dalam isu lingkungan atau sosial	65, 90, 98, 195
	FS11	Persentase aset yang tunduk pada lingkungan positif dan negatif dari masalah sosial	95, 97, 98, 99, 101
	FS12	Kebijakan pemungutan suara diterapkan pada masalah lingkungan atau sosial untuk dibagikan di mana organisasi pelaporan berhak untuk memilih bagi-bagi atau saran tentang pemungutan suara	39, 90, 221
	FS13	Titik akses di daerah berpenduduk rendah atau kurang beruntung secara ekonomi berdasarkan jenis	65, 114, 115, 116, 125, 129, 132, 135, 137, 138, 140, 231



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Mengukuhkan Ketahanan Tata Kelola

Referensi	Pengungkapan	Halaman
FS14	Inisiatif untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi orang-orang yang kurang beruntung	65, 114, 129, 135, 137, 138, 140, 231
FS15	Kebijakan untuk desain dan penjualan produk dan layanan keuangan yang adil	96, 130, 135, 154, 170, 173, 183, 207
FS16	Inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan berdasarkan jenis atau penerima manfaat	61, 129, 130, 140

Referensi Sustainability Accounting Standard Board (SASB)

[GRI 102-55]

Kode	Keterangan	Halaman
Keamanan Data		
FN-CB-230a.1	(1) Jumlah pelanggaran data (2) Persentase informasi identifikasi pribadi (3) Jumlah rekening yang terpengaruh	187
FN-CB-230a.2	Pendekatan untuk menangani risiko keamanan data	188
Keuangan		
FN-CB-240a.1	Jumlah pinjaman yang memenuhi syarat untuk program promosi usaha kecil dan pengembangan masyarakat	58, 59
FN-CB-240a.2	Jumlah pinjaman jatuh tempo dan non-akrual yang memenuhi syarat untuk mempromosikan usaha kecil dan pengembangan masyarakat	58, 59
FN-CB-240a.3	Jumlah rekening yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank atau yang menghadapi keterbatasan akses	136
FN-CB-240a.4	Jumlah peserta literasi keuangan	135, 136, 137
Inkorporasi		
FN-CB-410a.1	Komersial dan pembukaan kredit berdasarkan industri	55, 56, 57
FN-CB-410a.2	Pendekatan untuk memasukkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam analisis kredit	96, 97, 98
Bisnis		
FN-CB-510a.1	Jumlah kerugian akibat proses hukum terkait penipuan, perdagangan orang dalam, anti-trust, perilaku anti-persaingan, manipulasi pasar, malpraktek, atau undang-undang industri keuangan terkait lainnya	206
FN-CB-510a.2	Kebijakan dan prosedur whistleblowing	185
Risiko		
FN-CB-550a.1	Skor <i>Global Systemically Important Bank</i> (G-SIB), berdasarkan kategori	234
FN-CB-550a.2	Pendekatan terkait stress test	97, 234

Referensi *Sustainable Banking Assessment (SUSBA)* [GRI 102-55]

Indikator	Pengungkapan	Halaman
Tujuan	Strategi keberlanjutan dan pelibatan pemangku kepentingan	2, 26, 36-38, 39-41, 61, 66-73, 90
	Partisipasi dalam inisiatif keuangan berkelanjutan	39-41, 59
Kebijakan	Pernyataan publik tentang LST	59, 61, 95, 96
	Pernyataan publik tentang sektor-sektor tertentu	59, 73, 96, 97
Proses	Penilaian risiko LST dan persetujuan transaksi	73, 96, 97, 98
	Pengawasan dan keterlibatan klien	96, 97
Masyarakat	Tanggungjawab kepada LST	60, 196, 210, 216, 219, 220, 222
	Pelatihan staff lingkungan & sosial, serta evaluasi kinerja	101, 160, 226
Produk	Integrasi LST dalam produk dan layanan	95, 100
Portofolio	Penilaian risiko dan mitigasi LST pada tingkat portofolio	80, 90, 95
	Pengungkapan eksposur risiko LST dan target	33, 57, 98, 101, 108-109

Referensi *Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD)* [GRI 102-55]

Kode	Pengungkapan	Halaman
Governance		
a	Menggambarkan pengawasan dewan dari risiko terkait iklim dan peluang	102
b	Menggambarkan peran manajemen dalam menilai dan mengelola risiko dan peluang terkait iklim	88 - 94
Strategi		
a	Menjelaskan risiko terkait iklim dan peluang organisasi telah mengidentifikasi lebih pendek, menengah, dan jangka panjang.	88 - 94
b	Menjelaskan ampak risiko dan peluang terkait iklim pada bisnis, strategi, dan perencanaan keuangan organisasi	88 - 94
c	Menggambarkan ketahanan strategi organisasi, dengan mempertimbangkan skenario yang terkait dengan iklim yang berbeda, termasuk 2 ° C atau skenario yang lebih rendah	88 - 94
Risk Management		
a	Menggambarkan proses organisasi untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan iklim	88 - 94
b	Menggambarkan proses organisasi untuk mengelola risiko yang terkait dengan iklim.	88 - 94
c	Menggambarkan proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait iklim diintegrasikan ke manajemen risiko organisasi secara keseluruhan.	88 - 94
Metrics and Targets		
a	Mengungkapkan metrik yang digunakan oleh organisasi untuk menilai risiko terkait iklim dan peluang sejalan dengan proses manajemen strategi dan risiko	108
b	Mengungkapkan Lingkup 1, Ruang Lingkup 2, dan, jika sesuai, Ruang Lingkup 3 gas rumah kaca (GRK), dan risiko terkait.	108
c	Menggambarkan target yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola risiko terkait iklim dan peluang dan kinerja terhadap target.	88 - 94



Mendukung Kesejahteraan Pekerja



Memprioritaskan Nasabah



Menjalankan Bisnis yang Bertanggung Jawab



Menguatkan Ketahanan Tata Kelola

LEMBAR UMPAN BALIK

Laporan Keberlanjutan 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero memberikan gambaran kinerja keuangan dan keberlanjutan. Kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dari Bapak/Ibu/Saudara.

1. Laporan ini mudah dimengerti

Tidak setuju

Netral

Setuju

2. Laporan ini sudah menggambarkan informasi aspek material Perusahaan, baik dari sisi positif dan negatif

Tidak setuju

Netral

Setuju

3. Topik material apa yang paling penting bagi anda: (nilai 1=paling penting s/d 4=paling tidak penting)

- Kinerja Ekonomi dan Inklusi Keuangan ()
- Portofolio Produk & Kualitas Pinjaman ()
- Implementasi Keuangan Berkelanjutan berdasarkan RAKB ()
- Teknologi Informasi ()
- Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung ()
- Ketenagakerjaan ()
- Perlindungan Informasi Nasabah ()
- Antikorupsi ()
- Investasi ()
- Komunitas Lokal ()

4. Mohon berikan saran/usul/komentar anda atas laporan ini.

.....

.....

.....

Profil Anda

Nama Lengkap :

Pekerjaan :

Nama Lembaga/Perusahaan :

Golongan Pemangku Kepentingan :

Investor

Nasabah

Pekerja

Masyarakat

Pemerintah

Lainnya

Mohon kirimkan kembali lembar umpan balik kepada

Aestika Oryza Gunanto

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

Gedung BRI I

Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46

Jakarta 10210, Indonesia

Phone : +6221 575 1966

Faksimili : +6221 570 0916



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gedung BRII
Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia

Tel. : (62-21) 251 0244, 251 0254
Fax. : (62-21) 250 0065, 250 0077
Website : www.bri.co.id